

- **Langkah kedua:** menghitung jumlah pengeluaran wajib dan mengikat daerah tahun 2021-2026. Pengeluaran ini terutama terdapat pada sumber pendapatan daerah berupa DAK yang memang sudah diikat peruntukannya oleh Pemerintah Pusat, kemudian dana transfer berupa dana desa yang memang hanya akan numpang lewat aja dalam APBD Kabupaten Serang serta kemudian belanja program non urusan dan gaji yang merupakan syarat minimal bagi berjalannya pelayanan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
- **Langkah Ketiga:** Menghitung Kapasitas Riil Keuangan Daerah dengan pengurangan antara total penerimaan daerah dengan pengeluaran wajib dan mengikat selama periode tahun 2021-2026
- **Langkah Keempat:** Menghitung kebutuhan belanja prioritas I, yaitu belanja pendidikan dan Kesehatan.
- **Langkah Kelima:** menghitung kebutuhan belanja untuk prioritas pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah

- Tabel 3.15 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)
PENERIMAAN DAERAH	3.061.285.487.661	3.006.026.122.913	3.052.281.720.198	3.130.235.395.815	3.138.084.423.303	3.187.737.456.134
Pendapatan Daerah	2.901.230.182.348	2,860,312,745,079	2.927.324.114.378	2.975.208.285.956	3.022.468.121.091	3.071.963.672.198
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	160.055.305.313	145,713,377,834	124.957.605.820	155.027.109.859	115.616.302.212	115.773.783.936
Dikurangi :						
PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT DAERAH TAHUN 2021-2026	1.329.406.272.600	1.340.696.845.000	1.380.595.850.096	1.394.481.807.098	1.409.261.663.240	1.423.839.016.504
DAK	392.827.750.000	392.827.750.000	400.684.305.000	408.697.991.100	416.871.950.922	425.209.389.940
Belanja Transfer	449.451.522.600	422.949.095.000	449.063.545.096	450.044.815.998	451.045.712.318	452.066.626.564
Belanja Program Penunjang urusan	487.127.000.000	524.920.000.000	530.848.000.000	535.739.000.000	541.344.000.000	546.563.000.000
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	1.731.879.215.061	1.665.329.277.913	1.671.685.870.102	1.735.753.588.717	1.728.822.760.063	1.763.898.439.630

- Sumber: Diolah (2021)

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Serang tahun 2021-2026 menunjukkan peningkatan yang konsisten seiring dengan perkembangan pendapatan dan belanja daerah, Pada tahun 2022 kapasitas riil keuangan daerah angka sebesar Rp1,66 trilyun yang kemudian meningkat menjadi Rp.1,67 trilyun pada tahun 2023 dan menjadi sebesar Rp.1,76 trilyun pada tahun 2026. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya asumsi peningkatan pendapatan daerah yang lebih cepat daripada peningkatan kebutuhan belanja mengikat dan belanja wajib. Selanjutnya kondisi tersebut akan terus terjaga dengan persyaratan adanya pertumbuhan pendapatan daerah yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan belanja daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah, selain itu, perlu kebijakan pengetatan terhadap belanja mengikat terutama belanja pegawai dan belanja rutin OPD agar lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya dalam kerangka penyusunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 nantinya maka dapat menggunakan hitungan ruang fiskal ini untuk menentukan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam dua kelompok prioritas:

- a. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja mandatory mengikat yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan nasional di bidang pendidikan dan kesehatan
- b. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan juga alokasi belanja sektor pendidikan dan kesehatan maka selama periode tahun 2021-2026 maka dapat dikemukakan bahwa jumlah alokasi belanja untuk prioritas I mencapai kisaran 75 s/d 79 persen terhadap total kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, sedangkan jumlah alokasi prioritas II yang merupakan program prioritas kepala daerah di luar bidang pendidikan dan kesehatan mencapai kisaran 21 s/d 25 persen dari total kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

Tabel 3.16 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan daerah Kabupaten Serang pada bidang Pendidikan dan Kesehatan tahun 2021-2026

No	URAIAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Rp.Juta	%	Rp.Juta	%	Rp.Juta	%	Rp.Juta	%	Rp.Juta	%	Rp.Juta	%
1	Prioritas 1	1.313.890	75,9	1.311.527	78,8	1.325.575	79,3	1.329.693	76,6	1.363.621	78,9	1.378.052	78,1
	Belanja Bidang Pendidikan	813.513		816.525		820.432		823.679		828.173		831.536	
	Belanja Bidang Kesehatan	500.377		495.002		505.143		506.014		535.448		546.516	
2	Prioritas 2	417.989	24,1	353.802	21,2	346.111	20,7	406.061	23,4	365.202	21,1	385.846	21,9
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	1.731.879		1.665.329		1.671.686		1.735.754		1.728.823		1.763.898	

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJMD atau RPJPD). Adanya *gap* ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Pada penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Serang yang nantinya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2022-2026, perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Permasalahan tersebut merupakan masalah prioritas utama yang menjadi agenda rencana pembangunan dalam periode 2022-2026. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi

keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan Kabupaten Serang ditelaah berdasarkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016-2021. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, dan masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Sementara itu, perumusan masalah dilakukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dimana pemecahan masalah dilakukan melalui strategi pembangunan, sedangkan perumusan akar masalah dilakukan dengan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Berdasarkan evaluasi dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah selama periode RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016-2021, permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Serang dikelompokkan menjadi 6 permasalahan pokok yaitu, (1) tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, (2) taraf kesehatan masyarakat masih rendah, (3) program perlindungan sosial bagi masyarakat belum optimal, (4) ketersediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat belum merata, (5) pertumbuhan ekonomi di daerah belum dirasakan secara merata pada setiap lapisan masyarakat, dan (6) penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, secara akuntabel dan transparan belum berjalan optimal. Secara rinci, masalah pokok, masalah, dan akar masalah pembangunan daerah di Kabupaten Serang ditampilkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Serang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah	Aksesibilitas terhadap pendidikan berkualitas belum merata, kualitas dan tata kelola penyelenggaraan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketersediaan sekolah (PAUD, SD, SMP) yang berkualitas baik belum merata di setiap kecamatan. ➤ Kesadaran akan pentingnya pendidikan formal masih rendah. ➤ Pelaksanaan pendidikan kesetaraan belum menjangkau seluruh kawasan sehingga masih ada penduduk yang melek huruf pada usia lanjut. ➤ Kualitas bangunan sekolah yang baik belum menjangkau seluruh kecamatan. ➤ Kualifikasi tenaga pendidik yang memadai belum tersebar merata di setiap kecamatan dan cenderung terpusat pada ibukota kabupaten. ➤ Pengelolaan manajemen pendidikan dasar yang diiringi dengan ketersediaan data profil pendidikan daerah belum memadai.
2.	Taraf kesehatan masyarakat masih rendah	Pelayanan kesehatan bagi masyarakat belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah fasilitas kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan lanjutan belum sesuai dengan rasio jumlah penduduk ➤ Kondisi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan baik RS Pemerintah maupun Puskesmas belum sesuai

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan belum optimal</p> <p>Pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera belum optimal</p>	<p>standar</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum semua puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar baik jenis, jumlah maupun kompetensinya ➤ Indikator SPM belum mencapai target ➤ Tata kelola pelayanan kesehatan belum berjalan dengan optimal. ➤ Sistem informasi kesehatan belum terintegrasi ➤ Belum seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat belum optimal ➤ Kesadaran masyarakat untuk konsumsi gizi seimbang belum optimal. ➤ Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berawasan kesehatan belum optimal. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelayanan kesehatan reproduksi yang disosialisasikan belum menjangkau seluruh wilayah. ➤ Pemahaman pentingnya keluarga berencana dalam keluarga masih belum memadai. ➤ Sarana penunjang pelayanan KB belum memadai. ➤ Belum optimalnya upaya pendewasaan usia perkawinan sehingga pelayanan keluarga berencana

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3.	Program perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat belum optimal	Penanganan masalah kesejahteraan sosial belum optimal	<p>dan kesejahteraan keluarga tidak optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih rendahnya jumlah kader KB yang berkualitas. ➤ Belum optimalnya kerjasama dengan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga. <ul style="list-style-type: none"> ➤ PMKS yang tertangani belum berjalan optimal ➤ Masih kurangnya jumlah Pekerja Sosial dalam menangani masalah kesejahteraan sosial. ➤ Masih terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. ➤ Belum optimalnya pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial pada masyarakat. ➤ Merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial di masyarakat. ➤ Belum menguatnya perhatian akan pentingnya pengembangan modal sosial, kesetiakawanan sosial, kearifan lokal, dan semangat kegotongroyongan di masyarakat. ➤ Koordinasi lintas bidang dalam penanganan masalah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak belum berjalan optimal</p>	<p>kesejahteraan masih belum optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum adanya rumah singgah sebagai shelter bagi PMKS yang terlantar (Tambahan) ➤ Belum Optimalnya peran dari lembaga lembaga sosial (PSKS), Stake Holder Terkait dan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (Tambahan) ➤ Terbatasnya akses sumber daya dan peran serta perempuan dalam pembangunan. ➤ Rendahnya peranan perempuan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam pembangunan. ➤ Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. ➤ Belum optimalnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah. Banyak kegiatan yang diarahkan untuk pengarusutamaan gender diidentikkan hanya untuk keterlibatan perempuan saja. Munculnya dikotomi dasar tentang arti pengarusutamaan gender ini secara tidak langsung

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>Pelestarian seni budaya daerah belum optimal</p>	<p>justru membuat program pemberdayaan dan pengarusutamaan gender tidak dapat berjalan dengan optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih kurangnya peranan organisasi perempuan dan lembaga terhadap perlindungan perempuan dan anak. ➤ Belum optimalnya OPD dalam Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ➤ Sarana untuk penrtunjukan seni budaya daerah belum memadai. ➤ Penghargaan bagi insan seni budaya daerah masih rendah. ➤ Berkurangnya minat generasi muda untuk belajar seni budaya daerah. ➤ Pembinaan terhadap pegiat seni budaya belum dilakukan secara berkala. ➤ Kurangnya fasilitas penyelenggaraan festival seni berbasis kebudayaan lokal. ➤ Promosi seni budaya lokal belum efektif. ➤ Pemeliharaan pada situs cagar budaya daerah masih terbatas
4.	Ketersediaan	Kuantitas dan dan kualitas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proses konstruksi atau perbaikan jalan membutuhkan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	<p>infrastruktur dasar bagi masyarakat belum merata</p>	<p>ketersediaan infrastruktur dasar (jalan, sumber daya air) belum memadai</p>	<p>waktu yang cukup lama.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih banyak jalan, irigasi, SPAM, pengelolaan air limbah yang bermanfaat besar bagi masyarakat dalam kondisi kurang baik. ➤ Partisipasi masyarakat (Perkumpulan Petani Pemakai Air/P3A) dalam pengelolaan jaringan Irigasi yang masih kurang optimal ➤ Pembangunan jalan yang memadai belum menjangkau seluruh wilayah kecamatan sehingga mobilitas orang dan barang mengalami hambatan. ➤ Rencana pengembangan infrastruktur dasar belum komprehensif ➤ Manajemen infrastruktur dasar belum dikelola dengan baik.
	<p>Kualitas pelayanan kesehatan lingkungan permukiman, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan kebersihan belum optimal.</p>	<p>Kualitas pelayanan kesehatan lingkungan permukiman, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan kebersihan belum optimal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rumah layak huni dan permukiman kumuh belum seluruhnya terdata pada database profil permukiman. ➤ Pembangunan rumah yang dilakukan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah belum memperhatikan pedoman yang telah ditentukan.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan sarana prasarana dan utilitas umum masih belum memadai. ➤ Kerjasama yang dilakukan dengan pihak swasta untuk perbaikan lingkungan permukiman belum berjalan dengan baik. ➤ Fasilitasi penyediaan perbaikan rumah tidak layak huni masih terbatas. ➤ Fasilitasi penanganan persampahan rumah tangga masih terbatas pada daerah tertentu. ➤ Belum tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sampah di Kabupaten Serang ➤ Masih kurangnya sarana dan Prasarana Pengangkutan sampah untuk peningkatan pelayanan. ➤ Kondisi ruang terbuka hijau yang dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat sebagian besar dalam kondisi tidak memadai. ➤ Pengawasan pencemaran lingkungan hidup belum menyeluruh dan penegakan hukumnya cenderung berjalan lambat.
		<p>Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana dan kebakaran.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5.	Pertumbuhan ekonomi di daerah belum dirasakan secara merata pada setiap lapisan masyarakat	dan kebakaran belum optimal Peranan sektor industri didominasi oleh satu industri besar dan pengembangan industri kecil berbasis potensi daerah masih belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam, bencana social dan kejadian kebakaran. ➤ Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan kebakaran ➤ Kegiatan penanganan Resiko Banjir yang belum terpadu antar OPD ➤ Tidak adanya konsep pengembangan industri berbasis kawasan dan potensi unggulan daerah. ➤ Lemahnya akses permodalan untuk industri kecil dan mikro. ➤ Potensi sumber daya lokal belum diolah secara maksimal, padahal bahan baku yang tersedia cukup memadai. ➤ Kualitas SDM yang bergerak di industri kecil belum optimal sehingga masih lemah dalam penerapan teknologi pengolahan. ➤ Lemahnya informasi mengenai kluster industri mikro dan kecil di daerah. ➤ Peran Industri di Wilayah Kabupaten Serang Belum Menjawab Pengurangan Angka Pengangguran

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>Sektor perdagangan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian, tetapi belum mendorong peningkatan kelas usaha pelaku di bidang perdagangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum terealisasinya revitalisasi pasar rakyat di beberapa kecamatan. Perlu adanya perbaikan fasilitas pasar rakyat seperti jalan lingkungan, toilet, dan fasilitas lainnya. ➤ Belum optimalnya penerimaan PAD di sektor perdagangan. Salah satu sumber PAD yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang perdagangan adalah retribusi tera ulang pedagang. ➤ Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat. Selain itu, hal yang mendorong terjadinya praktik yang tidak sehat tersebut adalah belum maksimalnya tingkat kesadaran konsumen dalam menggunakan haknya sebagai konsumen. ➤ Pelaporan arus barang keluar masuk, yang merupakan kewajiban pelaku usaha belum terlaksana dengan baik sehingga informasi ketersediaan barang tidak diketahui. ➤ Produk yang dihasilkan belum berorientasi ekspor.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>Sektor pariwisata yang sesungguhnya dapat menjadi akselerator pengembangan sektor-sektor lain kurang berkembang dikarenakan daya saing yang rendah</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daya tarik objek wisata di Kabupaten Serang perlu dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Selain mempercantik objek wisata, hal lain yang diperlukan adalah peningkatan akses jalan menuju kawasan wisata, sarana pendukung seperti hotel dan restoran, dan mempersiapkan tenaga kerja pariwisata yang berkualitas. ➤ Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata di Kabupaten Serang. ➤ Belum optimalnya PAD yang diperoleh dari pengembangan sektor pariwisata. Sesungguhnya, dengan cukup banyak kunjungan wisatawan, Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan potensi PAD melalui penarikan berbagai jenis retribusi. ➤ Belum sepenuhnya diterapkan prinsip-prinsip pengembangan yang dipakai dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Serang yang mencakup prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (<i>sustainable tourism development</i>) dan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (<i>community based tourism development</i>).

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>Ekonomi kerakyatan yang digerakkan melalui koperasi dan UKM perkembangannya cenderung lambat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurang optimalnya kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam rangka memajukan sektor pariwisata. ➤ Persentase koperasi aktif dan berkembang di Kabupaten Serang masih rendah. ➤ Sebagian besar koperasi di Kabupaten Serang masih bergerak pada kegiatan simpan pinjam. ➤ Belum optimalnya pendampingan penyediaan permodalan dan pembiayaan bagi usaha kecil dan promosi produk UKM masih terbatas. ➤ Belum terbangunnya jaringan kemitraan antara UKM dengan pelaku usaha lain sebagai induk semang dan tingkat produktivitas UKM masih rendah. ➤ Belum tersusunnya data UMKMK potensial yang bermitra dengan PMA/PMDN. ➤ Belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Serang. ➤ Kualitas produk UMKM di Kabupaten Serang belum memenuhi standar nasional karena rendahnya penerapan teknologi dan inovasi produk. ➤ Belum tersedianya regulasi daerah yang mendorong potensi berkembangnya

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	<p>Produktivitas sektor perikanan masih rendah</p> <p>Sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan) menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Serang, namun dari tingkat produktivitas belum optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih terbatasnya SDM, permodalan, dan infrastruktur di bidang perikanan dan industri perikanan. ➤ Masih terbatasnya penerapan teknologi tepat guna untuk mengembangkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat (masyarakat lokal). ➤ Ketersediaan tenaga penyuluh perikanan sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan pelaku usaha di lapangan belum memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingginya alih lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri dan permukiman penduduk. ➤ Produksi dan produktivitas komoditas pertanian pangan dan hortikultura belum optimal karena belum diterapkannya sistem pertanian yang modern. ➤ Masih rendahnya kapasitas SDM petani dalam meningkatkan produksi. ➤ Kegiatan layanan pelatihan dan pendampingan oleh penyuluh sangat terbatas. ➤ Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pertanian seperti irigasi yang dalam keadaan baik. ➤ Keterbatasan akses petani terhadap permodalan yang berkelanjutan.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Petani belum mendapatkan keuntungan yang baik mengingat panjangnya tata niaga produk pertanian. ➤ Terjadinya fluktuasi iklim yang tidak menentu yang banyak menimbulkan kerugian bagi petani. ➤ Keterbatasan petani dalam mengakses pupuk bersubsidi. ➤ Usaha peternakan belum dilakukan dengan intensif (masih menggunakan cara tradisional dan ternak tidak dikandangkan) dan belum menerapkan teknologi terbaru dalam bidang peternakan. ➤ Harga pakan ternak mahal/tidak terjangkau petani/peternak, Bahan baku sumber pakan ternak kurang (utamanya jagung). ➤ Munculnya penyakit hewan yang menular dan bersifat emergensi. ➤ Belum optimalnya pengawasan produk hasil ternak yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). ➤ Jumlah dokter hewan sangat terbatas dimana hal tersebut mengakibatkan masih terjadinya kematian hewan ternak di masyarakat. ➤ Kapasitas penyuluh pertanian dan peternakan belum memadai.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>Daya saing investasi daerah rendah</p> <p>Daya saing tenaga kerja daerah rendah</p> <p>Penggunaan dana desa sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan administrasi aparatur dan pembangunan infrastruktur desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketersediaan infrastruktur dasar yang menjadi daya tarik investasi. ➤ Promosi investasi yang dilakukan kurang tepat sasaran. ➤ Pelaksanaan pemberian kemudahan dan insentif kepada investor mengalami banyak hambatan dan membutuhkan waktu lama. ➤ Potensi sektor potensial yang dapat dikembangkan daerah belum teridentifikasi dengan baik. ➤ Belum memadainya sistem pelayanan terpadu satu pintu berbasis elektronik. ➤ Sebagian besar angkatan kerja berpendidikan rendah ➤ Produktivitas tenaga kerja daerah masih rendah. ➤ Ketersediaan sarana pelatihan kerja yang memadai untuk peningkatan kompetensi masih terbatas. ➤ Belum teridentifikasinya potensi unggulan pada setiap desa. ➤ Perencanaan pembangunan belum integratif dengan perencanaan pembangunan daerah. ➤ Kapasitas perangkat desa dalam perencanaan pembangunan desa masih sebatas menghabiskan anggaran.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
6.	Penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, secara akuntabel dan transparan belum berjalan optimal	Akuntabilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lemahnya pembinaan pada perangkat desa dari OPD teknis dan kecamatan ➤ Pengawasan penggunaan dana desa masih sebatas pada administrasi keuangan dan belum pada dampak yang ditimbulkan dari belanja.
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Publikasi pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum optimal. ➤ Kurangnya koordinasi baik antar sektor maupun tingkatan pemerintahan. ➤ Diseminasi produk hukum daerah yang strategis belum terkomunikasikan dengan baik ke masyarakat. ➤ Tindak lanjut evaluasi kebijakan strategis daerah masih belum optimal. ➤ Belum lancarnya pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah. ➤ Belum maksimalnya penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat. ➤ Masih adanya permasalahan pada kelembagaan seperti tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>Kualitas perencanaan pembangunan daerah belum optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah. ➤ Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk penentuan kebijakan strategis daerah. ➤ Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif antar wilayah serta sektor perekonomian daerah. ➤ Belum dimanfaatkannya hasil monitoring dan evaluasi sebagai basis perbaikan perencanaan pembangunan daerah. ➤ Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah masih belum baik. ➤ Belum optimalnya kordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal dengan OPD-OPD, maupun dengan pemerintah Pusat dan Provinsi. ➤ Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas. ➤ Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Belum Optimal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum tersedianya instrumen penganggaran daerah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. ➤ Sistem Pengelola Keuangan Daerah belum sempurna mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban. ➤ Sistem Pengelola Keuangan Daerah belum terintegrasi dengan SIRUP, ATISIBADA, Pelaporan Pertanggungjawaban dan Kinerja Pemerintah Daerah. ➤ Tingkat kedisiplinan pemangku kepentingan guna menyusun APBD tepat waktu dan berkualitas masih belum baik. ➤ Tingkat keperdulian kepala OPD terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan masih kurang. ➤ Pelayanan penatausahaan daerah masih belum optimal. ➤ Belum tersedianya sistem pengendalian internal terkait pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disertai peningkatan dan pengembangan pengelolaan pemanfaatan BMD. ➤ Sebanyak 1.391 Bidang Tanah milik pemda belum

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>bersertifikat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementasi analisis standar belanja dalam penganggaran masih belum optimal. ➤ Basis data tentang potensi pajak daerah masih belum akurat; ➤ Belum optimalnya penggalan sumber-sumber pajak daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi ➤ Masih kurangnya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang belum patuh dalam melaksanakan kewajibannya selaku wajib pajak daerah; ➤ Kurangnya kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata kelola perpajakan daerah; ➤ Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan pajak daerah; ➤ Belum adanya pegawai yang menjabat fungsional pemeriksaan, penilai, jurusita, dan PPNS yang melakukan tugasnya secara teknis sehingga Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih belum memadai khususnya petugas yang melakukan pengelolaan pajak daerah;

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	<p>Sistem pengawasan kinerja pembangunan belum akuntabel berjalan secara optimal</p> <p>Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran organisasi perangkat daerah. ➤ Tindak lanjut hasil pemeriksaan atas temuan masih rendah. ➤ Belum optimalnya sistem pelayanan pengaduan masyarakat atas layanan publik. ➤ Masih kurangnya kapasitas aparatur pengawasan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. ➤ Lemahnya pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas dan proses pelayanan belum dilakukan secara online. ➤ Ketersediaan sarana pelayanan cenderung terpusat di ibukota kabupaten dan belum dibagi berdasarkan kluster kawasan. ➤ Tingkat pemahaman masyarakat rendah akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
7	Kehidupan beragama di sebagian kelompok masyarakat tampak eksklusif baik dalam hubungan intern umat beragama maupun dalam hubungan antarumat beragama	Pembangunan desa belum berjalan dengan optimal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kualitas perangkat desa dari kualifikasi pendidikan masih rendah. ➤ Perencanaan pembangunan desa belum berdasarkan potensi desa, dan cenderung berdasarkan kemudahan penyerapan anggaran. ➤ Pembangunan desa cenderung pada aspek infrastruktur, belum mengoptimalkan peningkatan kapasitas masyarakat desa. ➤ Pendampingan pengelolaan keuangan desa belum optimal. ➤ Pengawasan belum dilakukan secara optimal.

4.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Permasalahan urusan ditelaah berdasarkan data target indikator kinerja masing-masing urusan pemerintahan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang dilaporkan setiap tahun. Gambaran analisis menunjukkan bahwa secara umum, terdapat ketidakkonsistenan antara indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD dan rencana strategis perangkat daerah. Hal tersebut mengakibatkan banyak indikator kinerja yang tidak diketahui capaiannya. Selain itu, beberapa indikator kinerja urusan pada perangkat daerah kurang tepat dan harus dilakukan perbaikan pada perencanaan di periode mendatang. Untuk menjaga konsistensi antara dokumen RPJMD dan dokumen rencana strategis perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang harus memberikan asistensi secara intensif kepada perangkat daerah. Jika hal itu terjadi kembali, permasalahan yang sama akan muncul dan mengakibatkan banyak indikator kinerja di RPJMD yang tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja RPJMD yang kemungkinan tidak akan tercapai hingga tahun 2021 merujuk data capaian pada tahun 2019 terdapat pada urusan sebagai berikut:

a. Pendidikan

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan pendidikan adalah: indeks pendidikan, harapan lama sekolah, angka partisipasi kasar PAUD, angka partisipasi kasar SD/ sederajat, angka partisipasi kasar SLTP/ sederajat, angka putus sekolah SLTP/ sederajat, proporsi jumlah SLTP/ Sederajat dalam kondisi baik terhadap total jumlah SLTP/ sederajat.

Secara rinci, permasalahan pada urusan pendidikan dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

b. Kesehatan

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan kesehatan adalah: angka harapan hidup, angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup), angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup), optimalisasi kunjungan rumah sakit, dan tingkat daya tampung RSUD. Selain itu, indikator pada urusan kesehatan di perangkat daerah terkait sangat banyak dan tidak diketahui bagaimana capaian kinerjanya (Tabel 4.2). Secara rinci, permasalahan pada urusan kesehatan dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah: persentase tingkat kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten) dan persentase tingkat kondisi drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (proporsi panjang drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang drainase kabupaten). Selain itu, indikator pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di perangkat daerah tidak diketahui bagaimana capaian kinerjanya (Tabel 4.2). Secara rinci, permasalahan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah: persentase rumah tangga yang terlayani air limbah rumah tangga, cakupan pelayanan air limbah rumah tangga, dan persentase rumah layak huni. Secara rinci, permasalahan pada

urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

e. Tenaga Kerja

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan tenaga kerja adalah tingkat kesempatan kerja. Secara rinci, permasalahan pada urusan tenaga kerja dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

f. Lingkungan Hidup

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan lingkungan hidup adalah tingkat pengelolaan RTH. Secara rinci, permasalahan pada urusan lingkungan hidup dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

g. Perhubungan

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan perhubungan adalah: rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat, tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten, tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek, dan tersedianya pelabuhan penyeberangan pada kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran. Secara rinci, permasalahan pada urusan perhubungan dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

h. Penanaman Modal

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan penanaman modal adalah: laju pertumbuhan investasi PMDN dan nilai investasi PMDN. Secara rinci, permasalahan pada urusan penanaman modal dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

- i. **Kepemudaan dan Olah Raga**
Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan kepemudaan dan olah raga adalah tingkat ketersediaan sarana olah raga masyarakat. Secara rinci, permasalahan pada urusan kepemudaan dan olah raga dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.
- j. **Kelautan dan Perikanan**
Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan kelautan dan perikanan adalah: jumlah produksi perikanan dan nilai produksi perikanan. Secara rinci, permasalahan pada urusan kelautan dan perikanan dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.
- k. **Pariwisata**
Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan pariwisata adalah: jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan tingkat pengembangan kawasan strategis pariwisata. Secara rinci, permasalahan pada urusan pariwisata dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.
- l. **Perdagangan**
Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan perdagangan adalah tingkat pembangunan resi gudang. Secara rinci, permasalahan pada urusan perdagangan dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.
- m. **Perindustrian**
Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan perindustrian adalah tingkat pembangunan kawasan sentra IKM baru. Secara rinci, permasalahan pada urusan perindustrian dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

- n. Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan fungsi penunjang administrasi pemerintahan adalah: tingkat ketersediaan lahan siap bangun di kawasan pusat pemerintahan kabupaten dan tingkat pembangunan gedung perkantoran di kawasan pusat pemerintahan kabupaten. Secara rinci, permasalahan pada urusan fungsi penunjang administrasi pemerintahan dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.
- o. Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan adalah: pelaksanaan Diklat PIM II, pelaksanaan Diklat PIM III, dan pelaksanaan Diklat PIM IV. Secara rinci, permasalahan pada urusan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.
- p. Fungsi Penunjang Keuangan
Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan fungsi penunjang keuangan adalah rasio PAD terhadap pendapatan daerah. Secara rinci, permasalahan pada urusan fungsi penunjang keuangan dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.
- q. Fungsi Penunjang Pengawasan
Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan fungsi penunjang pengawasan adalah tingkat makuantitas APIP. Secara rinci, permasalahan pada urusan fungsi penunjang pengawasan dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Serang

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar				
1. Pendidikan				
1.1	Indeks pendidikan	<	➤ Pencapaian indeks pendidikan belum sesuai dengan target yang diharapkan, capaiannya pada tahun 2020 sebesar 59,92%.	✓ Pembangunan unit sekolah SD dan SMP pada kecamatan-kecamatan yang memiliki jumlah rasio murid-sekolah rendah.
1.2	Rata-rata lama sekolah (RLS)	<	➤ Masih terdapat gap antara rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Penduduk di Kabupaten Serang memiliki harapan lama sekolah hingga perguruan tinggi, sedangkan sebagian besar penduduk hanya mengenyam pendidikan dasar hingga kelas 7 SMP.	✓ Penambahan ruang kelas baru pada sekolah-sekolah yang telah melebihi kapasitas.
1.3	Harapan Lama Sekolah	<	➤ Pelaksanaan pendidikan kesetaraan belum optimal. Masih terdapat penduduk di Kabupaten Serang belum melek huruf pada usia lanjut.	✓ Perbaikan/rehabilitasi pada sekolah dengan bangunan yang kurang memadai.
1.4	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	<	➤ Ketersediaan PAUD belum merata pada setiap kecamatan dan masih ada PAUD yang belum terakreditasi sehingga kualitas pembelajarannya belum optimal.	✓ Penyediaan alat praktik dan peraga siswa yang memadai.
1.5	Angka partisipasi kasar (APK) SD/Sederajat	>	➤ Masih ada masyarakat yang belum mengetahui	✓ Peningkatan pemahaman tenaga pendidik untuk kelembagaan dan manajemen sekolah.
1.6	Angka partisipasi murni (APM) SD/Sederajat	>		
1.7	Angka partisipasi kasar (APK) SLTP/Sederajat	>		
1.8	Angka partisipasi murni (APM) SLTP/Sederajat	=		
1.9	Angka kelulusan (AL) SD/Sederajat	>		
1.10	Angka kelulusan (AL) SLTP/Sederajat	>		
1.11	Angka putus sekolah (APS) SD/Sederajat	=		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1.12	Angka putus sekolah (APS) SLTP/Sederajat	<	pentingnya pendidikan formal ditandai dengan masih ada 0,02% anak putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs.	✓ Peningkatan kualitas sekolah SD dan SMP dengan mendorong akreditasi sekolah menjadi A.
1.13	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	>	Pemuhan SPM pada jenjang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten belum menjadi perhatian.	✓ Pembangunan PAUD di kecamatan yang belum memiliki PAUD yang memadai.
1.14	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	>	Sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan dasar belum memadai. Proporsi bangunan SD dalam kondisi baik pada tahun 2019 sebesar 96%, sedangkan bangunan SMP dalam keadaan baik sebesar 82%.	✓ Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan proses belajar PAUD.
1.15	Proporsi jumlah SD/Sederajat dalam kondisi baik terhadap total jumlah SD/Sederajat	>	Persentase guru yang memiliki sertifikat masih kurang.	✓ Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah non formal/kesetaraan.
1.16	Proporsi jumlah SLTP/Sederajat dalam kondisi baik terhadap total jumlah SLTP/Sederajat	<	Kualitas penyelenggaraan pendidikan belum berjalan optimal. Tenaga pendidik masih banyak berkebutuhan pada urusan administrasi dibandingkan dengan peningkatan kualitas siswa. Manajemen pengelolaan sekolah masih belum maksimal.	✓ Pemerataan kuantitas dan peningkatan kualitas pendidikan pada satuan pendidikan dasar.

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas belum berjalan optimal 	
2.	Kesehatan			
2.1	Indeks kesehatan	>	<ul style="list-style-type: none"> Indikator kinerja terlalu banyak, OPD belum memahami perencanaan pembangunan daerah dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan rumah sakit umum daerah di wilayah kecamatan yang jauh dari pusat ibukota kabupaten.
2.129	Persentase rujukan sesuai standar	>		
2.130	Cakupan penilaian kinerja puskesmas	=	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar indikator kinerja tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan puskesmas di kecamatan-kecamatan yang rasio per satuan penduduknya masih rendah.
2.131	Rasio jumlah puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya dalam kondisi baik terhadap total jumlah puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya yang ada	=	<ul style="list-style-type: none"> Indikator kinerja hanya menjadi tempelan dan tidak diperhatikan pencapaiannya 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan fasilitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas.
2.132	Optimalisasi kunjungan rumah sakit	<	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah angka kematian bayi pada tahun 2019 belum memenuhi target yang ditetapkan. Kasus kematian bayi pada tahun 2019 sebanyak 9 kasus per 1.000 kelahiran hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan fasilitas rumah sakit dan puskesmas yang kondisinya masih belum memadai.
2.133	Tingkat daya tampung RSUD	<		<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan obat dan vaksin secara merata pada fasilitas kesehatan.
2.134	Tingkat kualitas sarana prasarana RSUD dengan kondisi baik	=	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah angka kematian ibu pada tahun 2019 tidak mencapai target, kasus kematian ibu pada tahun 2019 sebesar 221 kasus per 100.000 kelahiran hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan tata kelola dan mutu pelayanan fasilitas kesehatan.
2.135	Persentase Pasien yang Terlayani Sesuai Standar		<ul style="list-style-type: none"> Adanya kasus stunting pada balita yang merupakan dampak dari gizi buruk 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan balita.
2.136	Indeks Kepuasan Masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
2.137	Penerimaan Pendapatan Rumah Sakit			

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			<p>fasilitas kesehatan belum memadai dan belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Serang belum memadai untuk mengakomodasi pelayanan bagi penduduk. ➤ Penerapan SPM bidang kesehatan belum optimal. ➤ Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk masih minim ➤ Rasio puskesmas masih minim pada beberapa kecamatan ➤ Pelayanan fasilitas kesehatan belum maksimal. ➤ Belum semua masyarakat yang berhak menerima bantuan pembayaran jaminan kesehatan terdata dengan baik. ➤ Pengetahuan masyarakat terhadap sumber makanan yang bergizi, sehat, dan aman masih rendah. ➤ Imunisasi dasar pada balita belum menjangkau seluruh masyarakat. ➤ Kesadaran masyarakat untuk menerapkan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan pelayanan promosi kesehatan masyarakat. ✓ Peningkatan pelayanan kesehatan pada penyakit menular dan tidak menular. ✓ Perbaikan data dan informasi kesehatan masyarakat. ✓ Perbaikan pada pendataan masyarakat miskin yang belum mendapat pelayanan jaminan kesehatan. ✓ Kemudahan pemberian izin praktik tenaga kesehatan. ✓ Pengembangan mutu kualitas tenaga kesehatan melalui monitoring berkala dan pelaksanaan uji kompetensi. ✓ Advokasi, pemberdayaan dan kemitraan, serta peningkatan peran serta masyarakat pada pelaksanaan upaya kesehatan berbasis masyarakat.

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			<p>PHBS masih rendah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketersediaan tenaga kesehatan masih terpusat pada wilayah kecamatan yang termasuk perkotaan seperti di ibukota kabupaten. ➤ Ketersediaan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis masih rendah. ➤ Dengan adanya kebijakan pusat terkait rujukan berjenjang sehingga pasien tidak bisa langsung berkunjung ke RSDP mempengaruhi tingkat kunjungan pasien. ➤ Bed Occupancy Rate (BOR) terlihat bahwa pemanfaatan tempat tidur RS belum terisi optimal dikarenakan tingkat kunjungan RS dan adanya pandemi covid-19 ➤ Usia bangunan RS sudah lama dan perlu ada rehabilitasi secara periodik ➤ Masih adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap layanan rs diberikan dengan kenyataan yang dirasakan. ➤ Belum semua tergali potensi penerimaan RS baik dari pelayanan maupun penunjang medis dan yang lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kebijakan pusat terkait rujukan ke RS sangat mempengaruhi keberhasilan optimalisasi kunjungan pasien khususnya pasien BPJS ke RSUD. ✓ Trend BOR dapat dioptimalkan dengan peningkatan pelayanan yang prima dan mensosialisasikan melalui media online bahwa pelayanan kesehatan RS sudah sangat Safety. ✓ Perlu dilakukan pemeliharaan dan pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan ✓ Adanya peningkatan dan evaluasi etika dan mutu layanan RS secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan ✓ Selalu menggali potensi pendapatan RS baik dari penerimaan umum maupun lembaga Asuransi sehingga target dapat tercapai

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten)	<	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD tidak diketahui capaiannya. ➤ Kondisi jalan di Kabupaten Serang yang berkualitas baik belum tercapai pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 15,79% ➤ Drainase dalam kondisi baik belum sesuai dengan target RPJMD. Persentase pada tahun 2019 sebesar 74,50% ➤ Proses konstruksi atau perbaikan jalan sesuai standar berjalan kurang optimal. ➤ Pembangunan jalan belum optimal menghubungkan kawasan strategis produksi dan pusat-pusat kegiatan ekonomi. ➤ Masih terdapat jaringan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dalam kondisi kurang baik. ➤ Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan irigasi belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perbaikan manajemen pengelolaan administrasi proyek sehingga proses konstruksi dapat berjalan dengan baik dan kualitasnya optimal. ✓ Pembangunan jalan sesuai standar yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan daerah. ✓ Peningkatan jaringan irigasi pada kawasan pusat produksi di sektor pertanian. ✓ Pembangunan dan perluasan SPAM di kawasan perkotaan dan perdesaan. ✓ Pembangunan dan rehabilitasi sistem pengelolaan air limbah. ✓ Pembangunan dan rehabilitasi RTH yang memadai
3.2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	=		
3.3	Persentase kondisi jalan mantap (perkerasan beton)	n.a		
3.4	Persentase tingkat kondisi jembatan kabupaten dalam kondisi baik (Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik terhadap total jumlah jembatan kabupaten)	>		
3.5	Persentase tingkat kondisi drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Proporsi panjang drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang drainase kabupaten)	<		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
3.6	Cakupan fungsi pelayanan jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap total areal irigasi	>	➤ Pendangkalan beberapa sungai, keterbatasan sumber air baku.	✓ Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW.
3.7	Capaian tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	>	➤ Terbatasnya penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sehingga wilayah yang dilayani masih terbatas.	✓ Penyusunan dokumen turunan dari Perda RTRW.
3.8	Ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang wilayah Kab. Serang beserta rencana rinci (peta struktur dan pola ruang melalui peta analog dan peta digital)	n.a	➤ Pengelolaan air limbah belum menjadi perhatian dan sarana yang ada belum memadai.	✓ Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah.
3.9	Tingkat Ketersediaan rencana tata ruang (RTRW, RDTR dan rencana rinci tata ruang lainnya)	=	➤ Pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi implementasi rencana penataan ruang belum optimal.	✓ Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang.
3.10	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen tata ruang	n.a	➤ Belum optimalnya peran masyarakat dalam pengendalian penataan ruang	✓ Pembuatan sistem informasi penataan ruang daerah.
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
4.1	Persentase Rumah Tangga yang terlayani air bersih / air minum Cakupan penanganannya rumah tidak layak huni (RTLH)	>	➤ Prasarana dasar permukiman bersih, jalan lingkungan, akses air bersih/air minum, SPAL, dan sanitasi belum memadai untuk terwujudnya lingkungan permukiman dan perumahan sehat.	✓ Pendataan status layak huni rumah masyarakat. ✓ Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan sesuai

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
4.2	Persentase Rumah Tangga yang terlayani air limbah rumah tangga	<	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum adanya IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) di Kabupaten Serang. ➤ Pendataan rumah layak huni belum berjalan optimal sehingga target persentase rumah layak huni bagi masyarakat berprestasi rendah belum tercapai. ➤ Penanganan kawasan kumuh yang belum optimal sehingga masih terdapat permukiman kumuh di wilayah perkotaan. ➤ Pemahaman masyarakat akan kondisi rumah yang baik sesuai standar masih rendah. ➤ Belum terbangunnya gedung PUSPEMKAB (Pusat Pemerintahan Kabupaten). 	<p>prosedur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyusunan rencana dan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh. ✓ Peningkatan penyadaran publik tentang pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh. ✓ Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat prioritas. ✓ Perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan gedung PUSPEMKAB (Pusat Pemerintahan Kabupaten).
4.3	Cakupan pelayanan persampahan (Proporsi volume sampah yang tertangani (Rasio jumlah sampah yang ditangani terhadap jumlah produksi sampah)	>		
4.4	Tersedianya Akses Air Minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan bukan perpipaan, memenuhi kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	>		
4.5	Cakupan pelayanan air limbah rumah tangga	<		
4.6	Cakupan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH)	>		
4.7	Persentase Rumah Layak Huni	<		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat				
5.1	Cakupan pembinaan organisasi politik dan kemasyarakatan	=	Belum optimalnya pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum.	✓ Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten.
5.2	Tingkat penyelesaian konflik SARA	=	Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah lebih dioptimalkan dengan kesadaran hukum masyarakat yang masih belum baik	✓ Peningkatan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
5.3	Rasio jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang ditindaklanjuti terhadap total jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang terjadi	=	Belum tersedianya dokumen kajian risiko bencana, dokumen rencana penanggulangan bencana dan dokumen rencana kontijensi daerah.	✓ Penyediaan sistem pencegahan dan kesiapsiagaan serta penanggulangan bencana.
5.4	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	=	Belum optimalnya pelayanan mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	✓ Peningkatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana.
5.5	Cakupan pencegahan bencana	=	Masih kurangnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku bencana dan anggota damkar.	✓ Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana.
5.6	Cakupan penanggulangan korban bencana	=	Peningkatan jumlah daerah rawan bencana karena kondisi alam yang menurun dan perubahan iklim.	✓ Pendataan dan penilaian sarana prasana proteksi kebakaran.
5.7	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	=	Masih kurang optimalnya pelayanan tanggap darurat bencana dan kebakaran.	✓ Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan pelatihan.
5.8	Cakupan penanganan daerah rawan bencana	=	Masih kurang memadainya sarana dan prasarana pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran.	
5.9	Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana	=		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
6.	Sosial		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih kurang optimalnya pelayanan penanganan pasca bencana. ➤ Masih kurangnya peningkatan kapasitas SDM personil yang menangani pasca bencana. ➤ Peran serta organisasi masyarakat dalam menjaga ketertarikan dan ketertiban umum belum optimal. ➤ Masih belum optimalnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu. ➤ Pemberdayaan organisasi politik dan organisasi masyarakat belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
6.1	Persentase keluarga miskin yang meningkat pendapatannya	n.a	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan Kapasitas Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan
6.2	Persentase PRSE yang meningkat penghasilan usaha ekonomi	n.a	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih banyaknya Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang belum memiliki kemampuan berwirausaha 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan Kapasitas Perempuan Rawan Sosial
6.3	Persentase Penyandang Cacat (Disabilitas) yang meningkat penghasilan usaha ekonomi	n.a	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemberian Alat Bantu, Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penangan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan Kapasitas Ekonomi (PRSE) melalui pelatihan pelatihan .

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
6.4	Persentase Tuna Sosial yang mengalami perubahan perilaku (yang tadinya Pekerja Seks Komersial/PSK tidak lagi jadi PSK)	n.a	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyandang Cacat (Disabilitas) masih terbatas. ➤ Keterbatasan dalam pemberian bantuan social kepada Tunas Sosial dan factor kebutuhan hidup yang tinggi dari pada pendapatan ekonomi Tuna Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemberian Alat Bantu, Sarana dan prasarana yang dibutuhkan kepada Penyandang Cacat (Disabilitas) di tingkatan
6.5	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhannya (sandang, pangan dan papan) sesuai standar/layak	n.a	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum terkoordinasinya penanganan Lanjut Usia Terlantar antar lembaga di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemberian Bimbingan Sosial dan Keagamaan ditingkatkan ✓ Peningkatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanganan Lanjut Usia Terlantar
6.6	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhannya (sandang, pangan dan papan) sesuai standar/layak	n.a	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum terkoordinasinya penanganan Anak Terlantar antar lembaga di daerah. ➤ Masih Kurangnya kepedulian Keluarga, lingkungan dalam membantu Korban Tindak Kekerasan dan Traficking dalam pemulihian kondisi psikologisnya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial. ✓ Perbaikan database fakir miskin kabupaten.
6.7	Persentase Korban Tindak Kekerasan dan Traficking yang pulih kondisi psikologisnya	n.a	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lembaga Sosial (PSKS) masih belum memiliki kapasitas yang mumpuni dalam membantu dalam penanganan Kesejahteraan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanganan Anak Terlantar.
6.8	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	n.a		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemberian Bimbingan Sosial dan Keagamaan.
6.9	Indeks Kepuasan Masyarakat	n.a		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan Kapasitas PSKS
6.10	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	n.a		<ul style="list-style-type: none"> ✓ melalui pelatihan pelatihan
6.11	Penanganan PMKS (Rasio jumlah PMKS yang tertangani terhadap jumlah PMKS yang ada)	>		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurang sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan kesejahteraan Sosial

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
7. Tenaga Kerja				
7.1	Tingkat kesempatan kerja (TKK)	<	➤ Target tingkat kesempatan kerja dalam RPJMD belum tercapai. TKK pada tahun 2019 adalah sebesar 40%.	✓ Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan berdasarkan kompetensi.
7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	>	➤ Tingkat pengangguran di daerah cukup tinggi, persentase pada tahun 2019 sebesar 10,65%	✓ Pembinaan kerjasama dengan investor untuk menggunakan pekerja lokal.
7.3	Kualitas Tenaga Kerja	n.a	➤ Produktivitas tenaga kerja daerah belum optimal karena sebagian besar berada pada kualifikasi pendidikan dasar.	✓ Penumbuhan minat wirausaha bagi calon tenaga kerja yang tidak memenuhi kompetensi pencari kerja.
7.4	Produktivitas tenaga kerja	n.a	➤ Ketersediaan lapangan pekerjaan belum menjangkau seluruh angkatan kerja sehingga tingkat kesempatan kerja menjadi rendah.	✓ Penyediaan bursa tenaga kerja tingkat kabupaten.
7.5	Perlindungan tenaga kerja	n.a	➤ Penyediaan informasi lapangan pekerjaan belum menjangkau seluruh daerah.	✓ Pendataan masalah hubungan industrial tingkat kabupaten.
			➤ Kompetensi SDM calon tenaga kerja masih belum sesuai kebutuhan pencari kerja.	
			➤ Para calon tenaga kerja yang dibina kurang	

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			<ul style="list-style-type: none"> memiliki minat wirausaha dan bekerja di sektor informal. ➤ Penanganan permasalahan hubungan industrial berjangsur lama. ➤ Belum seluruh instansi menggunakan UMK sebagai aspek penting dalam penggajian. 	
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak			
8.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	>	➤ Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten masih lemah.	✓ Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender.
8.2	Cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap perempuan dan anak yang tertangani sampai dengan selesai	n.a	➤ Terbatasnya akses perempuan dalam peningkatan kapasitas karena kurangnya pengetahuan.	✓ Pemberdayaan perempuan pada bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi di organisasi kemasyarakatan.
8.3	Jumlah fasilitas kecamatan menuju layak anak	n.a	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemahaman kesetaraan gender belum teraplikasi dalam kehidupan bermasyarakat. ➤ Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan waktu yang lama sehingga ada keengganan untuk pelaporan kasus kepada dinas terkait. ➤ Pemahaman kesadaran masyarakat atas hak-hak dasar anak masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan pelayanan pencegahan kekerasan dan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. ✓ Peningkatan pendampingan pengembangan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
9.	Pangan			
9.1	Ketersediaan energi	>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Angka ketergantungan terhadap makanan pokok berbasis beras masih tinggi. ➤ Belum adanya neraca kebutuhan pokok untuk mengetahui produksi, kebutuhan dan stok pangan daerah. ➤ Peta kerentanan dan ketahanan pangan belum tersedia. ➤ Produk pangan segar yang beredar belum diawasi secara optimal. ➤ Skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan selama ini berjalan lambat dan fluktuatif. ➤ Ketersediaan pangan dari sumber protein hewani masih rendah. ➤ Belum terjaganya stabilitas pasokan dan harga pangan pokok sepanjang tahun pada setiap periode. ➤ Pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan ketersediaan pangan belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan koordinasi terkait penyediaan infrastruktur pokok dan pendukung kemandirian pangan. ✓ Penyediaan informasi harga pangan serta pemantauan stok pangan. ✓ Pemberdayaan masyarakat dalam pengankaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. ✓ Penyediaan cadangan pangan kabupaten. ✓ Penyediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah. ✓ Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat. ✓ Pemanfaatan lahan pekarangan dalam rangka peningkatan produktivitas lahan.
9.2	Ketersediaan protein	>		
9.3	Skor PPH	>		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
10. Pertanian				
10.1	Tingkat penyelenggaraan administrasi pertanian untuk infrastruktur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pertanian	n.a	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan tanah untuk pelayanan publik banyak mengalami hambatan karena ketidakcocokan proses ganti rugi. ➤ Database pemanfaatan tanah tingkat kabupaten belum tersedia. ➤ Belum semua tanah milik Pemerintah Daerah memiliki sertifikat. ➤ Belum semua masyarakat miskin yang memiliki tanah memiliki sertifikat dan terlayani pelayanan sertifikasi tanah gratis dari Pemerintah Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan fasilitasi sengketa tanah di masyarakat. ✓ Penyediaan database pemanfaatan tanah di daerah. ✓ Fasilitasi pelayanan sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin. ✓ Inventarisasi tanah milik Pemerintah Daerah yang belum memiliki sertifikat.
10.2	Luas tanah yang dibebaskan untuk infrastruktur	n.a		
11. Lingkungan Hidup				
11.1	Cakupan pelayanan penanganan sampah (Proporsi volume sampah yang tertangani (rasio jumlah sampah yang tertangani terhadap jumlah produksi sampah	>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan pencemaran lingkungan hidup dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat sehingga penanganannya belum optimal. ➤ Belum tersedianya dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati daerah. ➤ Pelayanan terhadap pengelolaan limbah B3 belum berjalan optimal. ➤ Belum adanya apresiasi yang layak bagi penggerak kelestarian lingkungan hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengendalian pelaksanaan RPPLH. ✓ Pemberian informasi peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat. ✓ Penanggulan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada kawasan prioritas. ✓ Peningkatan pengelolaan ruang
11.2	Indeks kualitas lingkungan hidup	n.a		
11.3	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah 3R	>		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum adanya ketegasan daerah dalam penegakan terhadap pelanggar hukum lingkungan. ➤ Kapasitas TPSA belum memadai dan sarana pelayanan persampahan terbatas. ➤ Pelayanan persampahan masih berada pada kawasan tertentu dan belum menjangkau seluruh wilayah. ➤ Belum optimalnya penerapan 3R di masyarakat. ➤ Belum semua kegiatan usaha menerapkan pengelolaan limbah sesuai aturan yang berlaku. ➤ Kapasitas penilai AMDAL/UKL/UPL dalam penilaian belum memadai. ➤ Abrasi di wilayah pantai cukup tinggi. ➤ Tingkat pengelolaan RTH belum mencapai target yang ditetapkan, persentase RTH yang dikelola dengan baik sebesar 90% pada tahun 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ terbuka hijau daerah. ✓ Penyediaan tempat penyimpanan dan pengolahan limbah berbahaya. ✓ Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten. ✓ Pemberiaan apresiasi kepada pegiat pemerhati lingkungan hidup. ✓ Perluasan pelayanan persampahan melalui peningkatan sarana dan prasarana persampahan. ✓ Peningkatan sosialisasi 3R di masyarakat. ✓ Peningkatan kapasitas penilai AMDAL/UKL/UPL.

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
12.1	Cakupan pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil	=	➤ Data kependudukan cenderung statis dan update data berjalan kurang optimal.	✓ Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk menuju pelayanan prima.
12.2	Cakupan pelayanan pendataan penduduk	<	➤ Pelayanan administrasi kependudukan lainnya belum optimal.	✓ Peningkatan pelayanan pencatatan sipil menuju pelayanan prima.
12.3	Tingkat ketersediaan data mobilitas penduduk	=	➤ Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil.	✓ Penataan administrasi kependudukan untuk kepentingan pembangunan daerah.
12.4	Data administrasi kependudukan	=	➤ Pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan sipil membutuhkan waktu sehingga masyarakat terkadang enggan untuk mengurus.	✓ Penyusunan profil kependudukan dan proyeksi penduduk daerah.
12.5	Tingkat pencatatan kelahiran dan kematian	=	➤ Masih Kurang nya Sumberdaya Manusia dalam pelayanan Dokumen Kependudukan dan pencatatan Sipil.	✓ Peningkatan jumlah operator pelayanan dan penambahan alat bantu yang memadai.
12.6	Tingkat penerbitan akta perkawinan, perceraian, dan pengelolaan dokumen	=	➤ Terganggunya jaringan administrasi kependudukan.	✓ Publikasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara berkala setiap bulan.
12.7	Jumlah kelahiran dan kematian yang dilaporkan oleh tenaga kesehatan dan perangkat desa	=		
12.8	Jumlah perubahan KK dan KTP	>		
12.9	Tingkat ketersediaan data pengakuan, pengangkatan, dan pengesahan anak.	=		
12.10	Jumlah operator	<		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
13.1	Cakupan pembinaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa	=	➤ Data pencapaian kinerja banyak yang tidak diketahui.	✓ Perbaikan dokumen perencanaan yang sesuai dengan standar penyusunan.
13.2	Cakupan pembinaan pemerintahan desa	=	➤ Dokumen perencanaan kurang baik dan tidak sesuai standar penyusunan.	✓ Pencatatan kinerja perangkat daerah setiap periode waktu dan diketahui faktor penentu keberhasilan untuk masing-masing indikator.
13.3	Jumlah karang taruna yang dibina	<	➤ Pemanfaatan dana desa sebagian besar digunakan untuk infrastruktur desa dan belum menjangkau optimalisasi potensi sumber daya desa eksisting.	✓ Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penunjang optimalisasi pelayanan desa.
13.4	Jumlah posyandu yang dibina	<	➤ Kapasitas dan kualitas kelembagaan dan SDM perangkat desa tidak memadai,	✓ Fasilitasi kerjasama antar desa
13.5	Jumlah LPM yang dibina	<	➤ Pembinaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa belum berjalan baik.	✓ Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa.
13.6	Jumlah RT/RW yang dibina	<	➤ Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih rendah.	✓ Fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
13.7	Tersusunnya dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	=	➤ Potensi desa belum dipetakan dengan baik.	✓ Fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan badan usaha milik desa berbasis potensi unggulan desa.
13.8	Jumlah terbentuknya kawasan perdesaan berdasarkan potensi desa	<	➤ Belum terbentuknya LINMAS di Desa	
13.9	Tingkat masyarakat tentang tata cara pengelolaan BUMDes bersam	=		
13.10	Tingkat kemampuan masyarakat di kawasan wisata dalam menggunakan bahasa asing	<		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
13.11	Jumlah ketersediaan sarana prasarana dan sosial desa sesuai standar pelayanan yang terbangun	<		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fasilitasi penyusunan profil desa dan perkembangan desa setiap tahun. ✓ Fasilitasi pembentukan BUMDes yang mandiri berdasarkan potensi desa.
13.12	Jumlah BUMDes yang terbentuk	<		
13.13	Jumlah UPK yang matang	<		
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
14.1	Persentase jumlah peserta KB terhadap pasangan usia subur (Prevalensi peserta KB aktif)	>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya keselarasan dan keterpaduan kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten tentang pengendalian kuantitas penduduk. ➤ Pemahaman pentingnya keluarga berencana dalam keluarga masih belum memadai. ➤ Sarana penunjang pelayanan KB belum memadai dimana belum semua kecamatan memiliki Balai Penyuluh KB. ➤ Jumlah tenaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang memiliki kompetensi belum optimal. ➤ Sarana penunjang pelayanan KB belum memadai dimana belum semua kecamatan memiliki kantor KB. ➤ Jumlah dan kompetensi tenaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Advokasi pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta modal model solusi sebagai peringatan dini dampakan kependudukan kepada pemangku kepentingan. ✓ Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk kabupaten. ✓ Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB di semua kecamatan dan penyediaan obat dan alat kontrasepsi. ✓ Promosi dan konseling kesehatan reproduksi, serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan.
14.2	Penurunan perempuan yang menikah usia kurang dari 21 tahun	>		
14.3	Jumlah sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB MKJP	>		
14.4	Persentase poktan tribina, UPPKS dan PPKS yang aktif ber-KB	>		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya kerjasama dengan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga. ➤ Ketersediaan obat dan alat kontrasepsi masing kurang. ➤ Ketersediaan obat dan alat kontrasepsi masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dna kesehatan reproduksi. ✓ Peningkatan kerjasama dengan organisasi masyarakat dalam program keluarga berencana dan keluarga sejahtera. ✓ Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. ✓ Peningkatan kerjasama dengan organisasi masyarakat dalam program Pembangunan Keluarga , Kependudukan dan keluarga Berencana (Bangsa Kencana)
15.	Perhubungan			
15.1	Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat	<	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perencanaan indikator kinerja dalam rencana strategis perangkat daerah belum baik. ➤ Semua indikator kinerja tidak tercapai. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perbaikan dokumen perencanaan daerah dalam periode ke depan. ✓ Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang menjadi
15.2	Tersedianya angkutan umum yang melayani	<		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
15.3	wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	<	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemasangan rambu lalu lintas belum menjangkau seluruh kawasan prioritas yang wajib dipasangkan. ➤ Rendahnya disiplin pengemudi dan pengguna jalan. ➤ Sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor belum memadai. ➤ Berpindahnya pola mobilitas masyarakat dari kendaraan umum ke kendaraan pribadi yang mengakibatkan beberapa trayek angkutan tidak beroperasi. ➤ Pelayanan terminal yang menjadi kewenangan kabupaten belum optimal. ➤ Perparkiran sebagai sumber PAD belum dikelola dengan optimal. ➤ Manajemen rekayasa lalu lintas kurang tertata. 	<p>prioritas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan. ✓ Penyediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan. ✓ Pembinaan dan bimbingan keselamatan lalu lintas. ✓ Peningkatan fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor. ✓ Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor. ✓ Pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan sistem manajemen keselamatan angkutan umum. ✓ Penyediaan trayek angkutan umum antar daerah yang belum layak secara komersial. ✓ Perbaikan pengelolaan perparkiran daerah yang menjadi sumber PAD. ✓ Perbaikan manajemen pengelolaan lalu lintas melalui kerjasama dengan pihak terkait.
15.4	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	<		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
16.	Komunikasi dan Informatika			
16.1	Terbangun dan teraksnesnya media pelayanan informasi daerah	=	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemanfaatan sistem jaringan yang dimiliki perangkat daerah belum digunakan secara optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah.
16.2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan	=	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelolaan dan sinkronisasi informasi dan komunikasi pemerintah daerah belum berjalan dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi publik pemerintah daerah.
16.3	Ratio ketersediaan hotspot internet di tingkat kecamatan	>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelolaan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah belum berjalan dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
16.4	Peningkatan Penerapan Keterbukaan Sistem Informasi Publik	n.a	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum terwujudnya Kabupaten Serang Smart City. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik.
16.5	Persentase Penyebaran Informasi	n.a	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih kurangnya sarana dan prasarana. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten cerdas.
16.6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi dan Informasi	n.a	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi publik belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan integritas dan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika.
16.7	Peningkatan Tata Kelola Teknologi dan Informasi	n.a	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perencanaan indikator kinerja dalam rencana strategis perangkat daerah belum baik. 	

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
16.8	Peningkatan SDM Teknologi dan Informasi	n.a		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan. ✓ Simplikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
17.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
17.1	Rasio Koperasi Aktif (Proporsi jumlah koperasi aktif terhadap total jumlah koperasi yang ada)	>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keterbatasan sarana dan prasarana produksi UMKM. ➤ Daya saing produk UMKM belum memadai untuk meningkatkan daya saing produk daerah. ➤ Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan koperasi belum optimal. ➤ Sumber daya manusia pengelola koperasi belum memiliki kapasitas yang memadai terkait pengelolaan koperasi yang baik. ➤ Minat masyarakat untuk bergabung ke dalam koperasi rendah karena tidak transparannya pengelolaan koperasi. ➤ Usaha kecil menengah masih banyak yang berjalan di tempat dan belum menunjukkan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemeriksaan dan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi di daerah. ✓ Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi. ✓ Pendataan dan potensi pengembangan usaha mikro. ✓ Fasilitas kemudahan perizinan dan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha
17.2	Rasio usaha mikro dan kecil (Rasio jumlah usaha mikro dan kecil terhadap jumlah usaha kecil dan menengah)	>		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			<ul style="list-style-type: none"> ➢ pengembangan usaha yang signifikan. ➢ Keterbatasan akses permodalan ke lembaga perbankan dan pemasaran produk ke luar daerah. ➢ Banyak UKM belum memiliki kapasitas yang memadai terkait pengelolaan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ mikro. ✓ Fasilitas pengembangan usaha melalui peningkatan kualitas produksi, pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi.
18.	Penanaman Modal			
18.1	Laju Pertumbuhan investasi PMA	>	➢ Indikator terkait pelayanan terpadu satu lintu belum diperhatikan pencapaiannya.	✓ Pembuatan peta potensi investasi daerah.
18.2	Laju Pertumbuhan Investasi PMDN	<	➢ Laju pertumbuhan investasi yang berasal dari dalam negeri belum sesuai dengan target yang ditetapkan.	✓ Penambahan SDM yang mumpuni dalam fasilitasi pelayanan perizinan.
18.3	Nilai Investasi PMA	>	➢ Investor masih dihadapkan pada kerumitan dalam pengurusan izin investasi.	✓ Penyusunan strategi promosi penanaman modal.
18.4	Nilai Investasi PMDN	<	➢ Promosi investasi yang dilakukan belum tepat sasaran dan pelaksanaan secara online masih mengalami kendala.	✓ Peningkatan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem elektronik.
18.5	Persentase ijin yang dilaksanakan sesuai peruntukannya	n.a	➢ Pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum optimal.	✓ Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
18.6	Persentase ijin yang diselesaikan tepat waktu	n.a	➢ Pemberian kemudahan dan insentif yang	
18.7	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	n.a		
18.8	Rata-rata waktu penyelesaian Perizinan (Berkas Lengkap)	n.a		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			<p>diberikan belum menarik minat investor untuk menanamkan modal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Potensi unggulan daerah belum teridentifikasi dengan baik. ➤ Pelayanan perizinan belum baik sesuai standar pelayanan. ➤ Peralatan yang digunakan untuk pelayanan perizinan kurang memadai dan SDM yang ada masih terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koordinasi dan sinkronisasi penempatan pemberian kemudahan dan insentif daerah.
19.	Kepemudaan dan Olah Raga			
19.1	Cakupan pembinaan organisasi kepemudaan	>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Target tingkat ketersediaan sarana olahraga masyarakat dalam RPJMD belum tercapai. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor.
19.2	Tingkat pembinaan kepemudaan	n.a	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Target pada tahun 2019 dalam RPJMD adalah sebesar 10%, sedangkan yang tercapai sebesar 4%. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, serta pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi tingkat kabupaten.
19.3	Cakupan atlet yang berprestasi	>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan yang kreatif dan produktif belum berjalan optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyelenggaraan kejuaraan olahraga secara berkala tingkat kabupaten.
19.4	Tingkat Ketersediaan Sarana Olahraga Masyarakat	<	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kompetisi olahraga di tingkat kabupaten secara berkala belum terselenggara dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyelenggaraan kejuaraan olahraga secara berkala tingkat kabupaten.
19.5	Tingkat pengembangan olahraga	n.a	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistem pembinaan cabang olahraga prestasi daerah belum berjalan optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyelenggaraan kejuaraan olahraga secara berkala tingkat kabupaten.

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan olahraga prestasi belum memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan pengembangan olahraga prestasi dan organisasi olahraga. ✓ Penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai standar nasional di kabupaten.
20.	Statistik			
20.1	Buku Kabupaten Dalam Angka	=	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data statistik yang ada masih belum menjadi satu data terpadu pemerintah daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyediaan statistik satu data kabupaten yang aman dan handal..
20.2	Buku PDRB Kabupaten	=	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tidak tersedianya metadata statistik daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koordinasi dan sinkronisasi
20.3	Buku IPM Kabupaten	=	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kualitas SDM pengelola bidang statistik masih belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. ➤ Ketersediaan dan kualitas data statistik yang lengkap dan terkini sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah belum memadai. ➤ Perangkat daerah yang memiliki kewenangan urusan statistik belum menjalankan pelaksanaan urusan karena tumpang tindihnya kewenangan. ➤ Masih kurangnya sarana dan prasarana. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan kapasitas SDM dalam peningkatan kualitas statistik daerah yang terintegrasi.

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
21. Persandian				
21.1	Cakupan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi	n.a	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah.
21.2	Cakupan Penyiapan, Pemanfaatan dan Pengembangan SDM Sandi, Materil Sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi	n.a	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Urusan persandian dianggap belum terlalu penting dalam komunikasi internal pemerintah daerah. ➤ Pemanfaatan implementasi persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan masih kurang. ➤ Masih kurangnya sarana dan prasarana. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyediaan SDM di bidang persandian. ✓ Implementasi persandian dalam penyebaran informasi penting penyelenggaraan pemerintahan daerah.
22. Kebudayaan				
	Rata-rata cakupan SDM, organisasi, pelestarian, kajian, fasilitasi, gelar, misi dan tempat kesenian dan budaya	=	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sarana prasarana pertunjukan seni budaya daerah kondisinya belum memadai. ➤ Penyediaan alat kesenian untuk setiap seni dan budaya yang dibina belum memadai ➤ Pelaku pelestarian seni budaya daerah semakin lama semakin berkurang karena minat generasi muda yang rendah. ➤ Apresiasi kepada penggiat seni budaya daerah belum optimal. ➤ Kondisi cagar budaya daerah dalam kondisi yang belum memadai sehingga kurang menarik minat masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan sarana prasarana yang mendukung pertunjukan seni budaya daerah. ✓ Pembinaan generasi muda untuk mencintai dan melestarikan seni budaya daerah. ✓ Pemberian apresiasi kepada pegiat seni budaya daerah. ✓ Peningkatan kerjasama dengan lembaga adat dalam pelestarian seni budaya daerah.

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
23.	Perpustakaan			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah daerah. ✓ Pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan cagar budaya daerah.
23.1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Rasio jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah terhadap jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah)	>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Minat literasi masyarakat untuk membaca masih kurang. ➤ Koleksi yang ada di perpustakaan daerah cenderung stagnan sehingga masyarakat enggan berkunjung ke perpustakaan. ➤ Sarana prasarana perpustakaan daerah kurang memadai dengan layanan masih bersifat manual dan belum menggunakan teknologi informasi. ➤ Tenaga pustakawan di daerah semakin berkurang. ➤ Pengembangan minat budaya baca masyarakat belum berjalan secara optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembudayaan gemar membaca untuk masyarakat. ✓ Penyediaan layanan perpustakaan keliling yang menjangkau seluruh wilayah. ✓ Peningkatan koleksi dan bahan pustaka di perpustakaan. ✓ Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dengan teknologi informasi dan penyediaan wifi gratis di area perpustakaan. ✓ Penyediaan tenaga pustakawan di perpustakaan daerah.
23.2	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan daerah terhadap target jumlah kunjungan perpustakaan daerah	>		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
24. Kearsipan				
24.1	Rasio jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku terhadap total jumlah SKPD yang ada	>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelolaan arsip pada masing-masing OPD belum mengikuti standar kearsipan. ➤ Pengelolaan arsip daerah belum terpadu pada dinas teknis. ➤ Sarana dan prasarana penyimpanan arsip daerah masih belum memadai. ➤ Database kearsipan daerah belum memadai. ➤ Pengumpulan data arsip masih menggunakan sistem secara manual ➤ Kualitas dan kuantitas tenaga teknis kearsipan belum memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengelolaan arsip daerah baik statis maupun dinamis secara elektronik. ✓ Peningkatan sarana dan prasarana gudang arsip daerah. ✓ Penerapan pengelolaan arsip sesuai standar kearsipan pada masing-masing OPD. ✓ Penambahan tenaga arsiparis yang mengerti pengelolaan arsip sesuai standar
Urusan Pemerintahan Pilihan				
1. Kelautan dan Perikanan				
1.1	Tingkat Konsumsi Ikan	>		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap secara kelompok.
1.2	Jumlah Produksi Perikanan	<	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Produksi ikan yang berasal dari perikanan tangkap laut cenderung stagnan. Pertumbuhan produksi cenderung melambat. 	
1.3	Nilai Produksi Perikanan	<	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Armada perikanan tangkap yang digunakan sebagai masih skala kecil sehingga produktivitasnya rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil.
1.4	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Produksi ikan yang berasal dari perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fasilitasi bantuan pendanaan,

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			<p>budidaya cenderung stagnan. Pertumbuhan produksi cenderung melambat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cara budidaya yang digunakan masih skala tradisional dan belum menggunakan teknologi budidaya intensif. ➤ Belum optimalnya pengembangan koordinasi antar satuan kerja dalam menuntaskan program unggulan minapolitan. ➤ Program minapolitan tidak berjalan optimal. ➤ Rendahnya kesejahteraan pembudidaya dan nelayan. ➤ Rendahnya posisi tawar pembudidaya dan nelayan dalam memasarkan hasil perikanan sebagai akibat rendahnya kualitas produk perikanan dan lemahnya permodalan serta adanya ketergantungan terhadap pihak lain. ➤ Belum optimalnya pengelolaan sumber daya kelautan perikanan dan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pengembangan ekonomi masyarakat. 	<p>bantuan pembiayaan, dan kemitraan usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Introduksi teknologi budidaya secara intensif. ✓ Fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya. ✓ Penyediaan benih ikan yang berkualitas baik. ✓ Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi pelaku usaha perikanan. ✓ Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan. ✓ Fasilitas pemasaran pelaku usaha perikanan.

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian sumber daya kelautan perikanan yang akan menghambat pulihnya sumber daya kelautan dan perikanan. ➢ Terjadinya degradasi kualitas perairan sebagai akibat kegiatan aktivitas di darat baik rumah tangga maupun industri yang menyebabkan terganggunya ekosistem kelautan dan perikanan. 	
2.	Pariwisata			
2.1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengembangan kawasan strategis pariwisata belum berjalan optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan sarana dan prasarana pada objek wisata eksisting yang dikelola pemerintah daerah.
2.2	Laju pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ketersediaan sumber daya dan fasilitas pariwisata serta infrastruktur pendukung pada kawasan strategis pariwisata belum memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penggalan potensi objek wisata pada kawasan-kawasan yang memiliki keunikan daya tarik.
2.3	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	<	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Daya tarik objek wisata belum digali secara optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitoring evaluasi pengelolaan kawasan wisata yang dikelola pemerintah daerah.
2.4	Laju pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan nusantara	>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengelolaan objek wisata eksisting belum dilakukan secara profesional. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Promosi objek wisata yang kreatif melalui media internet (website pemerintah daerah, media sosial, dll).
2.5	Tingkat pengembangan kawasan strategis pariwisata	<	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengembangan pariwisata belum optimal memanfaatkan partisipasi masyarakat lokal. 	
2.6	Tingkat pengembangan dan Pengelolaan destinasi pariwisata	n.a	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Selain itu, kuantitas dan kualitas SDM pariwisata lokal belum memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
2.7	Tingkat promosi pemasaran potensi wisata	n.a	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kesadaran masyarakat dalam mendukung Sapta 	

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
2.8	Cakupan kemitraan pelaku usaha pariwisata	n.a	<ul style="list-style-type: none"> Pesona Pariwisata masih rendah. Promosi pariwisata yang dilakukan belum tepat sasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> tingkat dasar. ✓ Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.
3.	Pertanian			
3.1	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB	>	<ul style="list-style-type: none"> Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung, serta kualitas produk unggulan pertanian, perkebunan, dan peternakan belum memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan pendampingan penggunaan introduksi teknologi pertanian yang maju.
3.2	Tingkat pembangunan kawasan pertanian	>	<ul style="list-style-type: none"> Produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perkebunan, dan peternakan masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fasilitas penyediaan benih dan bibit unggul bagi petani.
3.3	Tingkat pembangunan kawasan perkebunan	>		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembangunan prasarana pertanian.
3.4	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	>	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kesejahteraan petani rendah karena usaha belum memenuhi skala ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rehabilitasi pemeliharaan sarana
3.5	Tingkat pembangunan kawasan peternakan	<	<ul style="list-style-type: none"> Penyuluhan belum berjalan optimal karena persebarannya belum merata di setiap kecamatan. 	<ul style="list-style-type: none"> prasarana pendukung akselerasi produk pertanian.
3.6	Produksi padi	n.a		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengawasan peredaran hewan
3.7	Produksi jagung	n.a	<ul style="list-style-type: none"> Introduksi teknologi produksi pertanian yang modern belum tersebar merata pada pelaku usaha di bidang pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> dan produk asal hewan.
3.8	Produksi kedelai	n.a		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penanggulangan hama dan wabah yang mengganggu tanaman

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
3.9	Produksi cabe merah	n.a	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelaku usaha pertanian didominasi penduduk tua dan regenerasi petani berjalan lambat. ➤ Sebagian besar tanaman perkebunan dalam kondisi tanaman tua sehingga produk yang dihasilkan tidak optimal. ➤ Perubahan iklim membuat pola tanam petani mengalami perubahan yang mengakibatkan penurunan produksi. ➤ Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi fungsi lainnya seperti permukiman, sarana dan prasarana publik. ➤ Keterbatasan dalam pengelolaan usaha sehingga usaha cenderung stagnan. ➤ Sebagian besar pemasaran produk pertanian masih mengandalkan tengkulak (<i>middlemen</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ pertanian maupun hewan. ✓ Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian. ✓ Peningkatan kapasitas kelembagaan petani. ✓ Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan usaha bagi petani. ✓ Pembentukan badan usaha milik petani yang menyalurkan produk pertanian secara langsung kepada konsumen. ✓ Fasilitas pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan daerah.
3.10	Produksi bawang merah	n.a		
3.11	Produksi durian	n.a		
3.12	Produksi sedap malam	n.a		
3.13	Produksi kelapa	n.a		
3.14	Produksi kakao	n.a		
3.15	Produksi cengkeh	n.a		
3.16	Produksi lada	n.a		
3.17	Produksi daging itik	n.a		
3.18	Produksi daging kerbau	n.a		
4.	Kehutanan			
5.	Energi dan Sumber Daya Mineral			
6.	Perdagangan			
6.1	Indeks Daya Beli	>	➤ Sebagian besar pasar rakyat dalam kondisi kurang baik.	✓ Reabilitasi sarana dan prasarana pasar rakyat sehingga menarik
6.2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap	>		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
	PDRB		Upaya pemeliharaan dan pengelolaan pasar tradisional belum memadai.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ penguji. ✓ Pembinaan kepada pedagang pasar untuk memperhatikan aspek kebersihan. ✓ Koordinasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting. ✓ Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang. ✓ Pengawasan dan penyuluhan metrologi legal.
6.3	Rasio jumlah Pasar Rakyat (Tradisional Milik Pemda) yang direvitalisasi terhadap total jumlah pasar Rakyat (Tradisional Milik Pemda)	>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase alat yang tertera belum diketahui sehingga dapat merugikan konsumen. ➤ Keberadaan pasar rakyat terancam dengan kehadiran pasar modern. ➤ Sistem perdagangan daerah belum berjalan efektif dan efisien. 	
6.4	Jumlah Pasar Rakyat (Tradisional Milik Pemda) yang dibangun	>		
6.5	Tingkat pembangunan resi gudang	<		
7.	Perindustrian			
7.1	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kualitas SDM pelaku industri kecil belum memadai. ➤ Manajemen pengelolaan usaha belum berjalan efektif dan efisien. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan industri kecil berbasis potensi masing-masing kawasan. ✓ Fasilitasi peningkatan mutu
7.2	Tingkat pembangunan kawasan sentra IKM baru	<		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
7.3	Tingkat pengembangan kawasan sentra IKM lama	>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Akses permodalan pelaku industri kecil belum memadai. ➤ Penerapan teknologi pengolahan yang terkini belum sepenuhnya dijalankan sehingga kualitas produk belum baik. ➤ Sentra kawasan industri kecil belum direncanakan dengan baik sehingga belum tertata. ➤ Belum terintegrasinya pengembangan industri berbasis potensi sumber daya lokal seperti sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. ➤ Kualitas produk yang dihasilkan industri kecil belum mampu menembus pasar luar daerah. ➤ Terbatasnya akses pemasaran produk industri kecil. 	<p>produk industri kecil daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fasilitasi pemasaran produk industri kecil daerah. ✓ Penyediaan informasi yang mencakup data industri daerah berbasis sektoral. ✓ Fasilitasi pembinaan pengelolaan usaha pelaku industri kecil.
8.	Transmigrasi			
8.1	Terlaksananya monitoring, pengawasan dan evaluasi untuk memberikan motivasi kepada warga transmigran	n.a	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Minat pelaksanaan transmigrasi mengalami penurunan. ➤ Perpindahan penduduk cenderung berlangsung berdasarkan inisiatif pribadi untuk perbaikan standar hidup. ➤ Promosi pelaksanaan transmigrasi mengalami 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan promosi program transmigrasi bagi masyarakat. ✓ Peningkatan kecepatan pelaksanaan program transmigrasi. ✓ Pemberian insentif bagi

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ kemunduran. ➤ Fasilitas dan pembinaan kepada calon transmigran belum optimal. 	<p>masyarakat yang melakukan program transmigrasi.</p>
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
1. Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan				
1.1	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	=	➤ Tindak lanjut evaluasi kebijakan strategis daerah masih belum optimal.	✓ Fasilitas pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah secara elektronik.
1.2	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	=	➤ Nilai dan budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih perlu direvitalisasi di setiap jenjang birokrasi (pembentukan kelompok budaya kerja sebagai wadah diskusi untuk memecahkan permasalahan pekerjaan).	✓ Evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis daerah untuk perbaikan pelaksanaan ke depan.
1.3	Tingkat penataan kelembagaan pemerintahan daerah	>	➤ Belum lancarnya pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah.	✓ Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan kebijakan strategis daerah.
1.4	Tingkat ketersediaan dokumen evaluasi pembangunan daerah	>	➤ Belum maksimalnya penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat.	✓ Peningkatan diseminasi produk hukum daerah strategis kepada masyarakat.
1.5	LKPj	=	➤ Masih adanya permasalahan pada kelembagaan seperti tumpang tindih kewenangan yang	✓ Evaluasi penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat.
1.6	LKPj AMJ	=		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1.7	LPPD	=	mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal.	✓ Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD.
1.8	LAKIP	=	Belum adanya dukungan ketersediaan data	➢ Peningkatan kapasitas SDM pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel.
1.9	Nilai kinerja pemerintah daerah	>	kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.	✓ Penyediaan data informasi untuk mendukung penetapan kebijakan strategis daerah.
1.10	Tingkat ketersediaan dokumen rencana kawasan pusat pemerintahan kabupaten	=	Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah.	✓ Penataan organisasi kelembagaan agar tepat fungsi dan tidak tumpang tindih.
1.11	Tingkat ketersediaan lahan siap bangun di kawasan pusat pemerintahan kabupaten	<	Belum dimulainya penerapan pelaporan kegiatan LPUK berbasis online menggunakan sistem aplikasi.	✓ Penyediaan data kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
1.12	Tingkat Pembangunan Infrastruktur Pendukung kawasan pusat pemerintahan kabupaten	>	Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar-unit kerja serta antar-instansi.	✓ Peningkatan kapasitas aparatur dalam mendukung fungsi DPRD.
1.13	Tingkat Pembangunan Gedung Perkantoran di kawasan pusat pemerintahan kabupaten	<	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan selama ini belum sepenuhnya melibatkan <i>civil society</i> .	✓ Penyediaan tim ahli dalam mendukung tugas DPRD.
1.14	Raperda yang disetujui DPRD tahun berkenan (Proporsi jumlah Raperda yang disetujui DPRD menjadi Perda terhadap jumlah Raperda yang diusulkan)	=	Kurangnya pembinaan tenaga pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah agar menjadi tenaga profesional sehingga pelaksanaan pengadaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan yaitu efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel.	✓ Penyediaan sistem penyerapan aspirasi masyarakat dan
			Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat	

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			<p>dan komprehensif untuk penentuan kebijakan strategis daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya kinerja TPID dalam mengendalikan inflasi daerah. ➤ Pembentukan peraturan daerah terkendala dengan terbatasnya kapasitas aparatur. <p>Penyusunan program kerja DPRD membutuhkan waktu yang lama karena pandangan yang berbeda dari anggota dewan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyerapan dan pengumpulan aspirasi masyarakat masih tradisional dan belum menjadi sebuah sistem. ➤ Informasi penyampaian kinerja DPRD belum optimal. ➤ Pendelegasian kewenangan ke kecamatan berjalan lambat. ➤ Fungsi kecamatan dalam pelayanan publik belum optimal karena sarana dan prasarana yang belum memadai. 	<p>diseminasi kinerja DPRD berbasis elektronik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fasilitasi kerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi. ✓ Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. ✓ Percepatan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan. ✓ Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan. ✓ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang di kecamatan dan kelurahan. ✓ Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. ✓ Fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. ✓ Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fungsi kecamatan dalam pembinaan desa terkendala dengan keterbatasan kapasitas aparatur. ➤ Belum terealisasinya rencana pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang (Puspemkab) . 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembangunan desa. ✓ Percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan kabupaten untuk kemudahan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
2.	Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan			
2.1	Tingkat pemenuhan ketersediaan dokumen rencana lima tahunan dan tahunan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan SKPD	>	➤ Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif antar wilayah serta sektor perekonomian daerah.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Identifikasi permasalahan pembangunan daerah. ✓ Pengintegrasian data untuk perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi.
2.2	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah :	=	➤ Belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan baik pada tingkat daerah maupun OPD.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tindak lanjut dari pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah.
2.3	RPJMD	=		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitoring capaian target pembangunan secara berkala.
2.4	RKPD	=		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran daerah.
2.5	RKPD Perubahan	=	➤ Belum optimalnya kordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal dengan OPD-OPD, maupun dengan pemerintah Pusat dan Provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah tahunan, 5 tahunan, dan jangka panjang.
2.6	KUA PPAS	=	➤ Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan kualitas sumber daya perencana di daerah.
2.7	KUA PPAS Perubahan	=	➤ Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat	

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
3.	Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan		<ul style="list-style-type: none"> ➤ dalam perencanaan pembangunan daerah. ➤ Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya perencanaan di daerah. ➤ Masih belum optimalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. ➤ Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tahunan, 5 tahunan, dan jangka panjang. ✓ Penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan proses perencanaan pembangunan daerah yang integratif.
4.	Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya inovasi pembangunan daerah untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat. ➤ Terbatasnya sumber daya aparatur dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah. ➤ Belum dimanfaatkannya hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengelolaan data penelitian dan pengembangan. ✓ Perumusan rekomendasi atas rencana penetapan kebijakan strategis daerah. ✓ Pengembangan inovasi dan teknologi pada aspek pelayanan publik.
4.1	Tingkat pemenuhan pendidikan dan pelatihan PNS :	<	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi aparatur.
4.2	Diklat PIM II	<		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
4.3	Diklat PIM III	<	Masih rendahnya profesionalisme birokrasi.	✓ Penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi aparatur.
4.4	Diklat PIM IV	<	Belum berkembangnya sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	✓ Pembinaan, pengordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi aparatur.
4.5	Prajabatan	>	Masih kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi dalam jabatan dengan kompetensi dan prestasi kerja.	✓ Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan satu pintu yang dikelola oleh OPD terkait.
4.6	Tingkat indisipliner PNS	>	Pengembangan pegawai belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan kompetensi.	
			Data kepegawaian masih belum terintegrasi dengan baik.	
			Pembinaan kepegawaian di perangkat daerah belum optimal.	
			Spesialisasi keahlian PNS belum optimal.	
5.	Fungsi Penunjang Keuangan			
5.1	Jumlah pendapatan daerah	>	Belum optimalnya laporan mengenai keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran.	✓ Penyusunan APBD dan APBD perubahan tepat waktu.
5.2	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	>	Tingkat kedisiplinan pemangku kepentingan guna penyusunan APBD tepat waktu dan berkualitas masih belum baik.	✓ Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan anggaran pendapatan dan belanja.
5.3	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	<	Belum optimalnya implementasi Analisis Standar Belanja dalam perencanaan pagu kegiatan.	✓ Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembiayaan.
5.4	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	=		✓ Koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum tersedianya sistem pengendalian internal terkait pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disertai peningkatan dan pengembangan pengelolaan pemanfaatan BMD. ➤ Belum optimalnya pengelolaan aset daerah. ➤ Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah yang ditandai dengan belum optimalnya kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan daerah. ➤ Masih rendahnya kontribusi unit usaha BUMD dalam pengelolaan potensi unggulan daerah terhadap PAD. ➤ Belum akuratnya database pajak dan retribusi daerah. ➤ Belum optimalnya penggalan potensi dan pemetaan potensi pendapatan daerah ➤ Masih banyak wajib pajak daerah yang memiliki kesadaran rendah untuk membayar pajak. ➤ Koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung peningkatan PAD masih belum optimal. 	<p>lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Optimalisasi sistem informasi data pengelolaan keuangan daerah. ✓ Peningkatan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. ✓ Peningkatan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah. ✓ Koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah. ✓ Inventarisasi berkala barang milik daerah. ✓ Koordinasi, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, atau penghapusan barang milik daerah. ✓ Inventarisasi potensi PAD yang

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
6.	Fungsi Penunjang Pengawasan			<p>berasal dari pajak dan retribusi daerah pada masing-masing OPD.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyediaan sistem informasi penerimaan pajak dan retribusi daerah secara elektronik. ✓ Penyusunan dan evaluasi kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak dan retribusi daerah.
6.1	Tingkat Kapabilitas APiP	=	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran organisasi perangkat daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan pembinaan pada OPD yang belum menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
6.2	Tingkat Mutualitas SPiP	=	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh organisasi perangkat daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan pemantauan kinerja dan keuangan OPD.
6.3	Tingkat Kuantitas APiP	<	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih kurangnya kapasitas aparatur pengawasan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. ➤ Belum optimalnya sistem pelayanan pengaduan masyarakat atas layanan publik. ➤ Kurangnya pemahaman objek pemeriksa terhadap ketentuan aturan yang berlaku dalam menindaklanjuti LHP> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evaluasi kinerja dan keuangan OPD secara intensif. ✓ Peningkatan asistensi dan pendampingan kepada OPD secara intensif. ✓ Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan. ✓ Penyediaan sistem pelayanan pengaduan masyarakat secara elektronik.

4.3 Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Identifikasi isu-isu strategis yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan arah prioritas pembangunan daerah yang menjadi tujuan dan sasaran yang dapat dioperasionalkan serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, isu-isu strategis juga merupakan salah satu sumber masukan dalam melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal terhadap proses perencanaan. Jika analisis lingkungan eksternal dan internal diidentifikasi dengan baik dan tepat, maka pemerintahan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan akan dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah yang tidak menyesuaikan atau memperhatikan isu strategisnya kemungkinan akan menghadapi hambatan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau tidak berhasil dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Secara teknis Isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam berbagai bidang pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat memberi warna serta mempengaruhi pelaksanaan agenda pembangunan dalam lima tahun ke depan, baik dalam lingkup regional, nasional dan global.

4.3.1 Isu Strategis Global/Internasional

Pada tahun 2014, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk agenda pembangunan global baru yang bernama Tujuan Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan-tujuan yang tertuang dalam SDGs merupakan penyempurnaan tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs). Melalui mandat SDGs, PBB berupaya untuk mewujudkan sumberdaya manusia global yang berkualitas, meningkatkan perekonomian global yang tidak mengesampingka kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta indikator-indikatornya untuk 2016-2030 meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;

16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs sudah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, Indikator TPB/SDGs yang dapat diukur menjadi bagian dari rencana kerja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Serang baik dalam bentuk rumusan, program, kegiatan dan indikator. Selain itu, upaya pencapaian target TPB/SDGs juga menjadi prioritas dalam pembangunan, hal ini terlihat dari sinkronisi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 4.3 Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals/SDGs)

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.		
		Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Operasional Pelayanan JKN	

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
	kelompok miskin dan rentan.			
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.		

GOALS/TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi Ketidakcukupan (underweight) pada anak balita.		
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Proporsi Balita Gizi Buruk	Renstra
		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.		
TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu	
		Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi	
		Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	Angka kematian bayi	
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunitas dasar lengkap pada bayi.	Cakupan Desa / Kelurahan UCI	Renstra
		Kejadian TB per 1000 orang.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	Renstra
		Kejadian Malaria per 1000 orang.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	Renstra
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan			

GOALS/TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS	<p>kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</p> <p>Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</p> <p>Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</p>	Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR).		
		Median Kawin Pertama.		
		Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).		
		Total Fertility Rate (TFR).		
		Unmet need pelayanan kesehatan.		
		Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk.		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.		

GOALS/TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan penguasaan anak usia dini, penguasaan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).		
	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.		
	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.		
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.		

GOALS/TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.		
TUJUAN : 5 KESETARAAN GENDER	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	
	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-19 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh pasangannya dalam 12 bulan terakhir.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-19 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh pasangannya dalam 12 bulan terakhir.	
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	
	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	

GOALS/TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	
	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen pemerintah daerah dan pemerintah daerah.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	
	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	
		Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	
TUJUAN 6 : AIR BERSIH	Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	1. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		
		2. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)		
		3. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan system terpusat skala kota, kawasan dan komunal		
DAN SANITASI LAYAK				

GOALS/TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
	<p>Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.</p> <p>Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global</p> <p>Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat</p>	<p>4. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat</p> <p>Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.</p>		
		<p>1. Jumlah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</p> <p>2. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja</p>		
		<p>Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.</p> <p>Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.</p>		

GOALS/TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.		
TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	Rasio Elektrifikasi		
		Konsumsi listrik per kapita		
TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	Laju pertumbuhan PDB per kapita		
		PDB per kapita		
	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	Persentase tenaga kerja formal.		
		Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.		

GOALS/TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.		
	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.		
TUJUAN 9: INDUSTRI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	Rasio Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.		

GOALS/TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
TUJUAN 10 BERKURANG KESENJANGAN	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	Koefisien Gini Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		
TUJUAN 13 : PERUBAHAN IKLIM	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).		
TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.		
TUJUAN 16 : PERDAMAIAN, KEADILAN DAN	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		

GOALS/TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
KELEMBAGAA N YANG TANGGUH	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).		
		Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.		
		Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.		
	Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020	Pertumbuhan ekspor produk non migas		
	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		

4.3.2 Isu Strategis Nasional

4.3.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau, sebaliknya, ancaman bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu;

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Selanjutnya terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, di antaranya sebagai berikut: **Pilar Pertama** Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; **Pilar Kedua** Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; **Pilar Ketiga** Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan **Pilar Keempat** Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan

- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui:
 - 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - 6) Pengentasan kemiskinan; dan
 - 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
 4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.
Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
 - 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
 - 2) Memajukan kebudayaan;
 - 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
 - 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
 - 5) Meningkatkan budaya literasi.
 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
 - 5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - 2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
 - 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;

- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

4.3.2.2 Penanganan Pandemi COVID-19

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China yang kemudian diidentifikasi sebagai jenis baru coronavirus (*novel coronavirus*). Pada awal tahun 2020 virus jenis ini mulai menjadi penyebab pandemi global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa negara di luar China. WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Kemudian pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease* (COVID-19). COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (saat ini kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS.

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Sebelum itu, pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui Keppres No. 9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk

mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, serta pertahanan dan keamanan.

Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, pemerintah perlu mengambil respon kebijakan secara cepat dan benar. Belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara, respon kebijakan untuk memitigasi dampak COVID-19 dapat dibagi menjadi empat tahap: **pertama** adalah menguatkan sektor kesehatan, **kedua** melindungi masyarakat dan dunia usaha, **ketiga** mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan **keempat** adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascapandemi COVID-19. Sedangkan beberapa program yang telah dan akan dijalankan oleh Pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 antara lain;

1. *Pertama*, program rakyat aman dari virus corona. Pemerintah akan memperluas tes polymerase chain reaction (PCR), pelacakan, dan karantina terhadap masyarakat yang positif terkena virus corona.
2. *Kedua*, program Indonesia sehat. Pemerintah mendorong kemandirian pelayanan kesehatan di rumah sakit dan penyediaan obat-obatan. Di dalamnya ada transformasi sistem kesehatan termasuk BPJS Kesehatan yang berkualitas.
3. *Ketiga*, program Indonesia berdaya. Pemerintah akan terus mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) demi mendongkrak daya beli masyarakat domestik. "Kemudian program lainnya seperti program kartu prakerja, subsidi gaji, kredit modal kerja, dan subsidi listrik
4. *Keempat*, pemerintah menyiapkan program Indonesia tumbuh. Beberapa poin yang masuk dalam program tersebut, antara lain peningkatan ekspor transformasi perpajakan, dan mendorong ekonomi di level mikro.
5. *Kelima*, pemerintah juga menyiapkan program jangka panjang (*multiyears*) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca dihantam pandemi corona."

Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan maka penanganan COVID-19 dapat dijadikan sebagai isu strategis di setiap urusan kewenangan Pemerintah daerah. Dalam merumuskan permasalahan pembangunan di setiap urusan kewenangan pemerintah daerah maka perlu dianalisa sejauhmana pengaruh COVID-19 terhadap pelaksanaan urusan kewenangan. Selanjutnya juga harus dirumuskan arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh dalam mengatasi kendala dan hambatan yang disebabkan oleh COVID-19. Identifikasi seberapa jauh pengaruh COVID-19 terhadap pelaksanaan masing-masing urusan kewenangan pemerintah daerah serta arahan kebijakan dan strategi yang ditempuh akan memandu daerah dalam menentukan pilihan prioritas program, kegiatan dan sub-kegiatan penanganan COVID-19 secara efisien, efektif dan tepat guna.

4.3.3 Isu Strategis Provinsi Banten

Analisis isu-isu strategis yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Bantem 2017-2022 yaitu :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infratraktur.
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas.
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan.
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Beberapa isu strategis yang dikemukakan dalam RPJMD Banten Tahun 2017-2022 tersebut juga sangat relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Serang. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mengembangkan sinergisitas pembangunan yang produktif dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten terutama dalam menangani berbagai isu strategis tersebut melalui program dan kegiatan bersama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Serang.

Penelaahan mengenai isu strategis yang ada di Provinsi Banten dan terkait dengan isu strategis di kabupaten/kota Provinsi Banten adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4 Perbandingan Isu Strategis di Provinsi Banten dan Kabupaten/kota

No	Isu Strategis		
	Provinsi Banten	Kabupaten Serang	Kabupaten lain
1.	<p>a. Kesenjangan wilayah</p> <p>Kesenjangan wilayah yang menjadi isu strategis adalah mengenai aksesibilitas endidikan dan Kesehatan, dimana rata-rata lama sekolah masih dibawah dan jangkauan ketersediaan rumah sakit minim. Selain itu mengenai kurangnya infrastruktur ekonomi masyarakat dan potensi ekonomi wilayah</p>	<p>1. Kualitas pelayanan endidikan bagi masyarakat belum merata</p> <p>2. Masih adanya kasus-kasus AKI dan AKB serta Stunting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta belum meratanya akses dan layanan endidika yang berkualitas</p> <p>3. Belum tuntasnya pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang</p>	<p>Kota Tangerang memiliki isu strategis mengenai :</p> <p>1. Peningkatan Kualitas Pendidikan;</p> <p>2. Peningkatan Kualitas pelayanan Kesehatan;</p> <p>Kabupaten Lebak untuk isu strategis meliputi :</p> <p>Aksesibilitas dan kualitas layanan endidikan dan endidika;</p> <p>Kabupaten Pandeglang mengenai : Sarana dan prasarana dasar belum memadai, permasalahan ini terkait dengan kurang optimalnya sarana dan prasarana endid khususya sarana dan prasarana endidikan, endidika, dan jalan serta sarana dan prasarana penunjang perekonomian;</p> <p>Kota Tangerang Selatan adalah mengenai : Pengembangan dan penataan Transportasi di Kota Tangerang Selatan;</p>

No	Isu Strategis		
	Provinsi Banten	Kabupaten Serang	Kabupaten lain
	<p>b. Daya saing daerah</p> <p>Terjadinya ketimpangan investasi dan pemanfaatan sumber daya alam disebabkan oleh adanya kurang daya dukung infrastruktur</p>	<p>4. Masih tingginya angka ketergantungan endid daerah pada Pemerintah dan Provinsi Banten dalam hal pendanaan pembangunan</p>	<p>Kabupaten Pandeglang :</p> <p>Belum optimalnya pemanfaatan potensi unggulan daerah, permasalahan ini terkait dengan masih dilakukannya aktivitas perekonomian barang mentah pada endid unggulan, belum dilakukannya aktivitas perekonomian pada endid unggulan dengan meningkatkan nilai tambah dan nilai rantainya;</p> <p>Kabupaten Lebak :</p> <p>Iklim investasi dan daya saing daerah;</p> <p>Kota Serang :</p> <p>Peningkatan iklim investasi yang kondusif bagi berkembangnya endid endidik, perdagangan dan jasa berbasis pemanfaatan sumber daya setempat dalam rangka memperluas kesempatan kerja;</p> <p>Kota Tangerang Selatan :</p> <p>Mengoptimalkan produksi tanaman hortikultura khususnya komoditas Anggrek dan Phylodendron;</p>

No	Isu Strategis		
	Provinsi Banten	Kabupaten Serang	Kabupaten lain
	<p>c. Kemiskinan dan Pengangguran</p> <p>Masih tingginya desa tertinggal, migrasi yang masuk juga menjadikan salah satu alasan tingginya angka pengangguran di daerah perkotaan Provinsi Banten</p>	<p>5. Masih tingginya angka kemiskinan ditengah-tengah masyarakat, terutama terkait dengan tingginya angka pengangguran</p> <p>6. Kegiatan perekonomian masyarakat belum berkembang secara optimal terutama pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi endi.</p>	<p>Kota Tangerang: Perluasan Kesempatan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja; dan Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Ekonomi Lokal;</p> <p>Kota Serang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan iklim investasi yang kondusif bagi berkembangnya endid endidik, perdagangan dan jasa berbasis pemanfaatan sumber daya setempat dalam rangka memperluas kesempatan kerja; 2. Peningkatan daya saing daerah melalui pembinaan prestasi olahraga, seni dan budaya daerah, serta kewirausahaan di kalangan pemuda. <p>Kabupaten Lebak : Kemiskinan dan ketenagakerjaan;</p> <p>Kabupaten Pandeglang : a. Kualias sumber daya manusia masih rendah, permasalahan ini terkait dengan masih rendahnya tingkat endidikan masyarakat dan kurang berdayanya masyarakat khususnya di perdesaan;</p>

No	Isu Strategis		
	Provinsi Banten	Kabupaten Serang	Kabupaten lain
			<p>b. Pertumbuhan ekonomi daerah belum menunjukkan tingkat perkembangan yang signifikan, permasalahan ini khususnya terkait dengan belum optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif, serta belum berkembangnya jiwa kewirausahaan;</p>
2.	<p>1. Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Perlunya perbaikan pada capaian kinerja mengingat hasil evaluasi akuntabilitas kerja masih dalam tahap CC</p>	<p>1. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Serang terutama pada Organisasi Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitasnya</p>	<p>Kota Serang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; 2. Aparatur yang berintegritas, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera; 3. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel 4. Pelayanan publik yang berkualitas; <p>Kabupaten Pandeglang :</p> <p>Tata kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah masih lemah, permasalahan ini terkait dengan masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur pemerintahan daerah.</p>

Sumber: RPJMD Provinsi Banten 2017-2023

4.3.4 Penelaahan RPJPD Kabupaten Serang 2005-2025

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD periode ke-4 dari RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026. RPJMD ke-4 ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Serang yang semakin maju, sejahtera, berkeadilan dan agamis melalui pembangunan yang merata dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan sosial-ekonomi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yang didukung oleh masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Serang pada periode akhir RPJMD ini meliputi:

1. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan prasarana dan sarana publik untuk mendukung pengembangan sektor unggulan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Menyelenggarakan pembangunan berwawasan lingkungan.
6. Menghayati dan mengembangkan nilai-nilai religius Islam.
7. Meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pendayagunaan sumber daya ekonomi lokal.
8. Meningkatkan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

4.3.5 Penelaahan KLHS RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026

KLHS RPJMD merupakan instrumen kebijakan yang telah melalui berbagai macam penelaahan secara terukur dan berjangka dalam hal analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif. Tujuan dari adanya KLHS adalah sebagai upaya pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta mengintegrasikan hasil capaian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pergeseran orientasi kebijakan

pengelolaan lingkungan yang sekarang telah memiliki cakupan focus pada tingkat makro akhirnya menjadi bagian dari tujuan penyelesaian permasalahan lingkungan yang semakin kompleks. Indikator yang telah disusun untuk pencapaian TPB yaitu sebanyak 319 indikator, yang terdiri dari 241 indikator mengacu pada TPB yang ditetapkan PBB mencakup kondisi umum daerah, yaitu daya dukung, daya tampung, geografis, demografis dan keuangan daerah, capaian indikator TPB yang relevan dengan pembagian urusan, kewenangan, karakteristik daerah, dan pembagian peran antara pemerintah daerah, maka berikut penelaahan KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Serang.

1. Isu strategis Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Serang yang wajib diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah :
 - a. Kemiskinan, pengangguran dan penyerapan tenaga kerja
 - b. Pelayanan kesehatan pada daerah terpencil dan perbatasan, tenaga kesehatan, serta penanggulangan gizi buruk
 - c. Jangkauan dan fasilitas pendidikan
 - d. Jangkauan dan pelayanan terhadap perumahan yang layak dan terjangkau
 - e. Pengembangan infrastruktur kabupaten berbasis lingkungan,
 - f. Pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan pangan, pencemaran, dan revitalisasi sumber daya air
 - g. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur transportasi
 - h. Pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik menggunakan system informasi
 - i. Penanganan serta manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana alam
2. Kesimpulan bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Serang, meliputi:
 - a. Penguatan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

- Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
 - Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi
 - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sector riil, dan industrialisasi
 - Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- Pengendalian pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
 - Percepatan cakupan administrasi kependudukan, yang mencakup: perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil bagi seluruh penduduk Kabupaten Serang, peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus
 - Integrasi sistem administrasi kependudukan
 - Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dengan cara penguatan sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, penguatan kapabilitas kelembagaan kabupaten dalam bidang pengendalian penduduk; dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga.
 - Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial seperti penguatan pelaksanaan jaminan sosial dalam pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk pengembangan jaminan pekerjaan, keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata Kelola SJSn, peningkatan efektivitas JKN didukung pemerataan penyediaan pelayanan Kesehatan, serta penguatan kelembagaan SJSN

termasuk perbaikan tata Kelola hubungan antarlembaga dan harmonisasi peraturan perundangan yang terkait

- Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan social dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran
- Perlindungan sosial adaptif dengan cara pengembangan perlindungan social yang terintegrasi dengan risiko ekonomi dan social terhadap perubahan iklim dan bencana alam, penguatan system kelembagaan perlindungan social yang responsive
- Peningkatan kesejahteraan social dengan penguatan implementasi standar pelayanan minimal bidang social untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, pembangunan masyarakat, lingkungan, dan sarana prasarana ramah anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu seperti penataan manajemen pengelolaan sumber daya manusia terutama aspek kesejahteraan social, peningkatan peran dan kapasitas pendamping masyarakat, juga mengenai peningkatan pengetahuan, pemahaman mengenai Pendidikan anak, Kesehatan gizi serta pengelolaan keuangan bagi keluarga
- Peningkatan pelayanan terpadu Kesehatan melalui peningkatan Kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, dan peningkatan pengendalian penyakit,
- Penguatan system Kesehatan dan pengawasan obat dan makanan melalui penguatan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan dna peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan, serta pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan.
- Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan pemerataan akses layanan Pendidikan di selama jenjang dan percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, peningkatan

- profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, peningkatan tata Kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran Pendidikan
- Pengentasan kemiskinan melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga, serta keberantaraan usaha dan dampak social
- c. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
 - Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman
 - Infrastruktur ketahanan bencana, meliputi pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur Tangguh bencana di Kawasan prioritas rawan bencana, penilaian dan peningkatan keamanan infrastruktur vital terhadap bencana, penetapan standar bangunan Tangguh bencana, serta pengembangan infrastruktur hijau
- d. Pembangunan Lingkungan Hidup, untuk Peningkatan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
 - Peningkatan ketahanan bencana dan iklim seperti penanggulangan bencana (data, informasi, dan literasi bencana, system, regulasi, dan tata Kelola, peningkatan sarana prasarana mitigasi, integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana, penguatan penanggulangan darurat bencana) dan peningkatan ketahanan iklim
 - Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

4.3.6 Penentuan Isu Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditentukan tata cara merumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Penentuan Isu Strategis

Dokumen RPJMD memiliki jangka menengah 5 (lima) tahun, maka akan dirumuskan isu strategis yang berpotensi muncul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan meliputi isu internasional, nasional, dan daerah. Isu internasional yang berpengaruh terhadap isu strategis daerah adalah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, selanjutnya isu strategis nasional berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan penanganan pandemi COVID-19, sedangkan isu daerah berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026, dan KLHS RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026. Berdasarkan penjabaran pada sub bab sebelumnya, maka ringkasan menurut tingkatan isu ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Serang

Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah
Internasional (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya; 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan; 3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia; 4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan; 7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua; 8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua; 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi; 10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara; 11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; 12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;

Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah
	<p>14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;</p> <p>15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;</p> <p>16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;</p> <p>17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.</p>
Nasional (RPJMN 2020-2024)	<p>1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.</p> <p>Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan b) Akselerasi peningkatan nilai tambah <i>agrofisery industry</i>, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. <p>2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.</p>

Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah
	<p>Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; d) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata. <p>3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.</p> <p>Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;

Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah
	<p>d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;</p> <p>e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;</p> <p>f) Pengentasan kemiskinan; dan</p> <p>g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.</p> <p>4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.</p> <p>Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:</p> <p>a) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;</p> <p>b) Memajukan kebudayaan;</p> <p>c) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;</p> <p>d) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan</p> <p>e) Meningkatkan budaya literasi.</p> <p>5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.</p> <p>Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:</p>

Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah
	<p>a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;</p> <p>b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;</p> <p>c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;</p> <p>d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan</p> <p>e) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.</p> <p>6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.</p> <p>Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:</p> <p>a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;</p> <p>b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan</p> <p>c) Pembangunan Rendah Karbon.</p> <p>7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.</p> <p>Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:</p>

Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; b) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.
<p>Nasional (Penanganan COVID-19)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pertama</i>, program rakyat aman dari virus corona. Pemerintah akan memperluas tes polymerase chain reaction (PCR), pelacakan, dan karantina terhadap masyarakat yang positif terkena virus corona. 2. <i>Kedua</i>, program Indonesia sehat. Di sini pemerintah mendorong kemandirian pelayanan kesehatan di rumah sakit dan penyediaan obat-obatan. Di dalamnya ada transformasi sistem kesehatan termasuk BPJS Kesehatan yang berkualitas. 3. <i>Ketiga</i>, program Indonesia berdaya. Pemerintah akan terus mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) demi mendongkrak daya beli masyarakat domestik. "Kemudian program lainnya seperti program kartu prakerja, subsidi gaji, kredit modal kerja, dan subsidi listrik 4. <i>Keempat</i>, pemerintah menyiapkan program Indonesia tumbuh. Beberapa poin yang masuk dalam program tersebut, antara lain peningkatan ekspor transformasi perpajakan, dan mendorong ekonomi di level mikro. 5. <i>Kelima</i>, pemerintah juga menyiapkan program jangka panjang (<i>multiyears</i>) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca dihantam pandemi corona."

Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah
Daerah (RPJMD Provinsi Banten 2017-2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Membangun dan meningkatkan kualitas infratraktur 3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas 4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan 5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
Daerah (RPJPD Kabupaten Serang 2006-2026)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan secara menyeluruh dan berkesinambungan. 2. Meningkatkan prasarana dan sarana publik untuk mendukung pengembangan sektor unggulan. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 5. Menyelenggarakan pembangunan berwawasan lingkungan. 6. Menghayati dan mengembangkan nilai-nilai religius Islam. 7. Meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pendayagunaan sumber daya ekonomi lokal. 8. Meningkatkan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
Daerah (KLHS RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. 3. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 4. Pembangunan Lingkungan Hidup, untuk Peningkatan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

2. Pembobotan

Setiap isu strategis yang telah ditentukan, akan dilakukan pembobotan untuk menentukan isu strategis yang paling prioritas dan akan menjadi dasar penyusunan visi dan misi. Kriteria dalam penentuan isu strategis didasarkan pada 6 kriteria dengan bobot yang berbeda. Kriteria beserta bobotnya tersebut sebagai berikut: (1) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional (bobot: 20 poin), (2) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah (bobot: 10 poin), (3) dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat (bobot: 20 poin), (4) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah (bobot: 10 poin), (5) kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani (bobot: 15 poin), dan (6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan (bobot: 25 poin). Berdasarkan kriteria beserta bobotnya tersebut, didapatkan hasil pembobotan isu strategis Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis Kabupaten Serang
Tahun 2021-2026**

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Jml
		1	2	3	4	5	6	
1	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat	20	10	20	10	15	25	100
2.	Masih adanya kasus- kasus AKI dan AKB serta Stunting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta belum meratanya akses dan layanan kesehatan yang berkualitas	20	10	20	10	15	25	100
3.	Belum tuntasnya pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang	20	10	20	10	15	25	100

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Jml
		1	2	3	4	5	6	
4.	Masih tingginya angka kemiskinan ditengah-tengah masyarakat, terutama terkait dengan tingginya angka pengangguran	20	10	20	10	10	25	95
5.	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Serang terutama pada Organisasi Pemerintah daerah belum seluruhnya mencapai tingkatan pada standar yang baik	20	10	20	7	10	25	92
6.	Kegiatan perekonomian masyarakat belum berkembang secara optimal terutama pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi lokal	20	10	20	10	5	25	90
7.	Tingkat kesadaran masyarakat yang belum mencerminkan ketentraman, keamanan dan ketertiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	20	10	15	10	10	20	85
8.	Belum meratanya pembangunan antar wilayah (kecamatan)	20	10	15	10	5	10	70
9.	Masih banyak ditemukan tatakelola lingkungan hidup baik yang berada di wilayah industri, permukiman dan perumahan belum sesuai dengan standar lingkungan hidup, terutama terkait dengan persoalan penanganan pencemaran lingkungan dan limbah	20	4	10	4	5	15	58
10.	Masih tingginya angka ketergantungan fiscal daerah pada Pemerintah dan Provinsi Banten dalam hal pendanaan pembangunan	10	10	10	10	5	10	55

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Jml
		1	2	3	4	5	6	
11.	Masih banyak ditemukan kondisi kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang belum memenuhi persyaratan hidup layak, terutama terkait dengan rumah tidak layak huni, kualitas sanitasi lingkungan dan persampahan	10	7	10	4	5	15	51
12	Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai	10	10	10	10	5	10	55

Tabel 4.7 Rata-rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Jumlah	Rata-rata Skor
1.	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat	100	17
2.	Masih adanya kasus- kasus AKI dan AKB serta Stunting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta belum meratanya akses dan layanan kesehatan yang berkualitas	100	17
3.	Belum tuntasnya pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang	100	17
4.	Masih tingginya angka kemiskinan ditengah-tengah masyarakat, terutama terkait dengan tingginya angka pengangguran	95	16
5.	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Serang terutama pada Organisasi Pemerintah daerah belum seluruhnya mencapai tingkatan pada standar yang baik	92	15
6.	Kegiatan perekonomian masyarakat belum berkembang secara optimal terutama pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi lokal	90	15

No	Isu Strategis	Jumlah	Rata-rata Skor
7.	Tingkat kesadaran masyarakat yang belum mencerminkan ketentraman, keamanan dan ketertiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	85	14
8.	Belum meratanya pembangunan antar wilayah (kecamatan)	70	12
9.	Masih banyak ditemukan tatakelola lingkungan hidup baik yang berada di wilayah industri, permukiman dan perumahan belum sesuai dengan standar lingkungan hidup, terutama terkait dengan persoalan penanganan pencemaran lingkungan dan limbah	58	10
10	Masih tingginya angka ketergantungan fiscal daerah pada Pemerintah dan Provinsi Banten dalam hal pendanaan pembangunan	55	9
11.	Masih banyak ditemukan kondisi kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang belum memenuhi persyaratan hidup layak, terutama terkait dengan rumah tidak layak huni, kualitas sanitasi lingkungan dan persampahan	51	9

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Serang dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kabupaten Serang. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Serang sesuai dengan urutan pembobotannya yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat belum merata
2. Masih adanya kasus- kasus AKI dan AKB serta Stunting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta belum meratanya akses dan layanan kesehatan yang berkualitas
3. Belum tuntasnya pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang
4. Masih tingginya angka kemiskinan ditengah-tengah masyarakat, terutama terkait dengan tingginya angka pengangguran
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Serang terutama pada Organisasi Pemerintah daerah belum seluruhnya mencapai tingkatan pada standar yang baik
6. Kegiatan perekonomian masyarakat belum berkembang secara optimal terutama pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi lokal.
7. Tingkat kesadaran masyarakat yang belum mencerminkan ketentraman, keamanan dan ketertiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8. Belum meratanya pembangunan antar wilayah (kecamatan)
9. Masih banyak ditemukan tatakelola lingkungan hidup baik yang berada di wilayah industri, permukiman dan perumahan belum sesuai dengan standar lingkungan hidup, terutama terkait dengan persoalan penanganan pencemaran lingkungan dan limbah
10. Masih banyak ditemukan kondisi kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang belum memenuhi persyaratan hidup layak, terutama terkait dengan rumah tidak layak huni, kualitas sanitasi lingkungan dan persampahan.
11. Masih tingginya angka ketergantungan fiscal daerah pada Pemerintah dan Provinsi Banten dalam hal pendanaan pembangunan
12. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Serang, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju,
Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis”**

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Serang yaitu:

MAJU

Pembangunan dilakukan di segala sektor untuk meningkatkan pelayanan dasar dan perekonomian masyarakat yang didukung dengan pembenahan infrastruktur pada diseluruh wilayah Kabupaten Serang.

SEJAHTERA

Perwujudan terpenuhinya kebutuhan lahiriah (pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan) dan kebutuhan batiniah (agama dan budaya) masyarakat Kabupaten Serang. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Serang untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik.

BERKEADILAN

Pembangunan di Kabupaten Serang dilakukan secara merata dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

AGAMIS

Perwujudan implementasi norma agama dan nilai budaya sebagai landasan moral dan spiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Serang yang memiliki keutamaan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

5.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional

3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Selanjutnya Prioritas pembangunan Daerah yang disusun dalam kerangka RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi yang kemudian dituangkan ke dalam 12 prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
3. Pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang yang sesuai dengan kapasitas anggaran daerah
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang salah satunya melakukan penurunan angka pengangguran
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal yang lebih mengutamakan sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKM serta potensi - potensi yang berhubungan dengan pengembangan industri kreatif yang berada ditengah - tengah masyarakat
7. Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
8. Pemerataan pembangunan antar wilayah (kecamatan)
9. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih difokuskan kepada Penanganan pencemaran lingkungan dan limbah

10. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang lebih difokuskan kepada pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan dan pengelolaan persampahan secara menyeluruh
11. Peningkatan kemampuan fiskal daerah untuk pendanaan pembangunan
12. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Selanjutnya dari sasaran dimaksud dijadikan indikator Visi dan misi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, sebagai berikut :

5.3.1 Misi 1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat

Tabel 5.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 1

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal	1. Rata-Rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan
	Tingkat Warisan Budaya yang Dilestarikan	Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal	Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional

a. Tujuan :

Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal, dengan indikator tujuan yaitu Rata-rata lama sekolah, Harapan lama sekolah dan Tingkat warisan budaya yang dilestarikan

b. Sasaran:

- 1) Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan. Dengan indikator yaitu Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan.
- 2) Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal. Dengan indikator yaitu Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami melalui gambar sebagai berikut:



Gambar 5.1 : Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-1

Selanjutnya untuk mencapai target misi 1 yaitu “Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi mulai dari penentuan isu strategis, misi, tujuan indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dengan OPD yang menganpu implementasi dari misi dimaksud, yang dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 5.2 : Pemetaan Kinerja terhadap pencapaian Isue strategis dalam Misi-1

5.3.2 Misi 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang professional.

Tabel 5.2. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 2

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	Angka kematian ibu
			Angka kematian bayi
			Angka Prevalensi stunting
			Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi
			Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit

a. Tujuan

Meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat, dengan indikator tujuan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH).

b. Sasaran

- 1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat. Dengan indikator yaitu Angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka prevalensi stunting, Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi dan Persentase Pemenuhan Standar Akreditas Rumah Sakit

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami melalui gambar sebagai berikut:



Gambar 5.3 : Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-2

Selanjutnya Untuk mencapai target misi 2 yaitu “Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang professional” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi mulai dari penentuan isu strategis, misi, tujuan indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dengan OPD yang menganpu implementasi dari misi dimaksud, yang dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 5.4 : Pemetaan Kinerja terhadap pencapaian Isue strategis dalam Misi-2

5.3.3 Misi 3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.

Tabel 5.3. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 3

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	Cakupan aksesibilitas antar wilayah
			Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum
			Persentase Desa yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik
			Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik
			Persentase kawasan kumuh
			Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi
			Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik
			Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik
			Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan
			Indeks Kinerja Sistem Irigasi
		Cakupan ketersediaan air baku	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam	Indeks kualitas Air
			Indeks Kualitas udara
			Indeks tutupan Vegetasi
Persentase Penanganan Sampah			
Persentase Rumah Layak Huni			

a. Tujuan

Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan, dengan indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur.

b. Sasaran

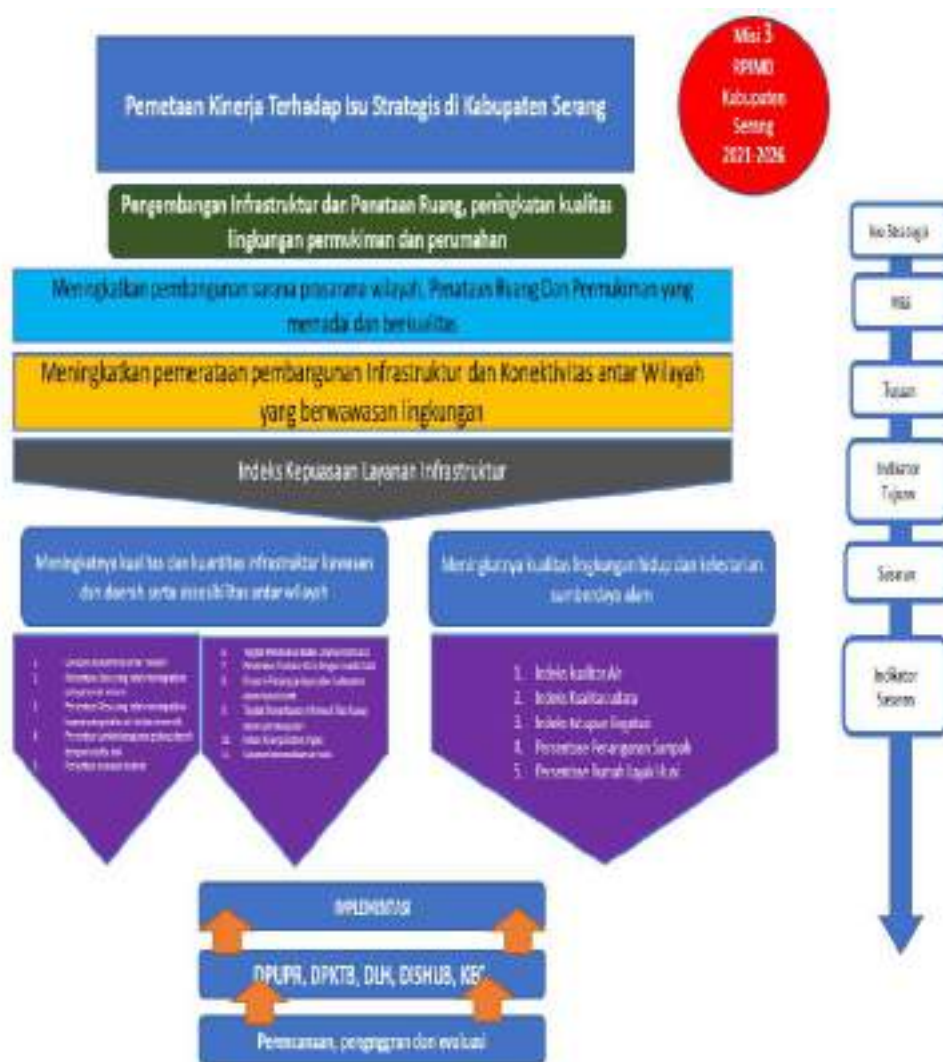
- 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah, dengan indikator yaitu Cakupan aksesibilitas antar wilayah, Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum, Persentase Desa yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik, Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik, Persentase kawasan kumuh, Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi, Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik, Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik, Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan, Indeks Kinerja Sistem Irigasi, Cakupan ketersediaan air baku
- 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam, dengan indikator: Indeks kualitas Air, Indeks Kualitas udara, Indeks tutupan Vegetasi, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Rumah Layak Huni

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami melalui gambar sebagai berikut:



Gambar 5.5 : Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-3

Selanjutnya Untuk mencapai target misi 3 yaitu “Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi mulai dari penentuan isu strategis, misi, tujuan indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dengan OPD yang menganpu implementasi dari misi dimaksud, yang dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 5.6 : Pemetaan Kinerja terhadap pencapaian Isue strategis dalam Misi-3

5.3.4 Misi 4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Tabel 5.4. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 4

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Inflasi 3. Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian
			Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan
		Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri	Proporsi peningkatan SHU koperasi
			Pertumbuhan Wirausaha Baru
			Pertumbuhan PDRB sektor industri
			Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan
		Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah	Kontribusi PAD Pariwisata
		Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan
		Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Persentase Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan
	2. Indeks Gini Rasio	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk	Prosentase PMKS yang mendapatkan program layanan sosial
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)
			Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking
Total Fertility Rate			

a. Tujuan

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa, dengan indikator tujuan yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat pengangguran Terbuka.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan Indikator tujuan yaitu Persentase Tingkat Kemiskinan dan Indeks Gini Rasio.

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas. Dengan indikator yaitu Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri. Dengan indikator yaitu Proporsi peningkatan SHU koperasi, Pertumbuhan Wirausaha Baru, Pertumbuhan PDRB sektor industri, Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan.

- 3) Meningkatnya investasi daerah Dengan indikator Pertumbuhan Nilai Investasi daerah.
- 4) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah. Dengan indikator Kontribusi PAD Pariwisata.
- 5) Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja. Dengan indikator Persentase pencari kerja yang ditempatkan.
- 6) Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa. Dengan indikator Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM.
- 7) Meningkatnya ketahanan pangan, dengan indikator yaitu Indeks ketahanan pangan.
- 8) Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk, dengan indikator: Prosentase PMKS yang mendapatkan program layanan sosial, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking, Total Fertility Rate.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami melalui gambar sebagai berikut:



Gambar 5.7 : Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-4

Selanjutnya Untuk mencapai target misi 4 yaitu “Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi mulai dari penentuan isu strategis, misi, tujuan indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dengan OPD yang menganpu implementasi dari misi dimaksud, yang dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 5.8 : Pemetaan Kinerja terhadap pencapaian Isue strategis dalam Misi-4

5.3.5 Misi 5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional

Tabel 5.5. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 5

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public	Indeks reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK
			Nilai LPPD
			Nilai SAKIP
			Jumlah opd pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Maturitas SPIP
		Meningkatnya Pendapatan asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah
			Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah
			Indek Inovasi Daerah
			Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan
		Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori Baik
			Cakupan standar kompetensi pegawai
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)
			Indeks Kematangan Penerapan SPBE
			Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			Persentase Masyarakat yang Melakukan Kunjungan Perpustakaan
			Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital
			Cakupan kepemilikan dokumen adminduk
			Indeks Risiko Bencana
Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda			

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Dengan indikator tujuan yaitu Indeks reformasi birokrasi

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator: Opini BPK, Nilai LPPD, Nilai SAKIP, Jumlah opd pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK.
- 2) Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator yaitu Tingkat Maturitas SPIP
- 3) Meningkatnya Pendapatan asli Daerah, dengan indikator yaitu Tingkat Pertumbuhan PAD.
- 4) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi, dengan indikator: nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah, Nilai capaian kinerja prioritas perangkat daerah, Indeks Inovasi Daerah, Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan.
- 5) Meningkatnya kualitas SDM aparatur, dengan indikator: Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori Baik dan Cakupan standar kompetensi pegawai.
- 6) Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI, dengan indikator: Indeks keterbukaan informasi publik (PPID), Indeks Kematangan penerapan SPBE, Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI).
- 7) Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI, dengan indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase Masyarakat yang Melakukan Kunjungan Perpustakaan, Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital, Cakupan kepemilikan dokumen adminduk, Indeks Risiko Bencana, Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami melalui gambar sebagai berikut:



Gambar 5.9 : Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-5

Selanjutnya Untuk mencapai target misi 5 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi mulai dari penentuan isu strategis, misi, tujuan indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dengan OPD yang mengampu implementasi dari misi dimaksud, yang dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 5.10 : Pemetaan Kinerja terhadap pencapaian Isue strategis dalam Misi-5

5.3.6 Misi 6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara

Tabel 5.6. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 6

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama ditengah-tengah masyarakat	Indeks Kerukunan Umat beragama	Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama	Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama ditengah-tengah masyarakat, dengan indikator tujuan yaitu Indeks Kerukunan Umat beragama

b. Sasaran

Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama, dengan indikator: Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami melalui gambar sebagai berikut:



Gambar 5.11 : Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-6

Selanjutnya Untuk mencapai target misi-6 yaitu “Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi mulai dari penentuan isu strategis, misi, tujuan indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dengan OPD yang mengampu implementasi dari misi dimaksud, yang dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 5.12 : Pemetaan Kinerja terhadap pencapaian Isue strategis dalam Misi-6

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.7. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, beserta Indikator dan Target Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian awal perencanaan tahun 2020	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan perluasan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya lokal sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat	Meningkatkan Layanan Bidang Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal yang didukung peran generasi muda untuk pembangunan daerah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Angka Rata Rata Lama Sekolah			7,5	7,64	7,79	7,93	8,07	8,22	8,36
	Angka Rata Rata Harapan Bersekolah	Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan	12,57	12,75	12,94	13,12	13,30	13,48	13,67	
	Tingkat Warisan Budaya yang Dilestarikan			47,52	48,10	48,72	49,31	49,91	50,51	51,11	
					0	41,38 %	48,28 %	58,62 %	79,31 %	93,10 %	100%
			Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal serta dukungan generasi muda bagi daerah	Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional	0	41,38 %	48,28 %	58,62 %	79,31 %	93,10 %	100%
		Angka Harapan Hidup (AHH)			64,64	64,85	65,06	65,26	65,47	65,68	65,89

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian awal perencanaan tahun 2020	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang professional	Meningkatnya derajat kesehatan bagi masyarakat		Meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	Angka kematian ibu	204	202	200	194	183	182	180
				Angka kematian bayi	8,29	8,27	8,25	8,23	8,21	8,19	8,17
				Angka Prevelensi Stunting	18.40%	21,1%	18,4 %	16%	14%	13,5%	13%
				Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi	25%	25	30	35	40	45	50
Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas	Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
				Presentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum	48%	50%	52,5 %	55%	57,5 %	60%	62,5 %
Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	96,10%	96,1%	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum	85,89	87,12	87,73	88,34	88,96	89,57	90,18
				Persentase Desa telah	70,25	71,47	72,09	72,70	73,31	73,93	74,54

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian awal perencanaan tahun 2020	Target							
						2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik									
				Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik	50	55	60	65	70	75	80		
				Persentase kawasan kumuh	0.20	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10		
				Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi	35	35	41.66	48,33	55	61.66	68,33		
				Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik	50	51,85 %	52,5 %	55,56 %	58,08 %	60,96 %	63,89 %		
				Proporsi Panjang jaringan kabupaten dalam kondisi baik	84	96	62.5	64.9	67.3	69.7	72.1		

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian awal perencanaan tahun 2020	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat,	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam	Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan	100	100	100	100	100	100	100
				Indeks Kinerja Sistem Irigasi	5	10	20	25	40	100	
				Cakupan ketersediaan air baku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
				Indeks kualitas Air	49.25	50.25	50.75	51.25	51.75	52.25	
				Indeks Kualitas udara	82.25	82.75	83.00	83.25	83.50	83.75	
				Indeks tutupan Vegetasi	69,98	69,990	69,995	70,000	70,005	70,010	
				Persentase Penanganan Sampah	14,53	17,44	19,85	22,27	24,68	27,09	
				Persentase Rumah Layak Huni	89,26%	89,88 %	90,49 %	91,10 %	91,72 %	92,33 %	
				Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-1,96	3,41	2,97	2,42	1,78	2,72	
				Inflasi	1,23	1,5	1,23	1,59	1,65	1,93	
Tingkat Pengangguran Terbuka	12,22	12	11,89	11,55	11,22	11	10,88				

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian awal perencanaan tahun 2020	Target								
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			
untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	masyarakat dan desa		Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	4,02	3.07	2.82	2.84	3.19	2.98	2.96			
				Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	-2.16	2.80	1.99	1.48	1.61	1.97	1.76			
				Proporsi peningkatan SHU koperasi	29%	2%	2%	2%	2%	2%				
				Pertumbuhan Wirausaha Baru	9,64	5	10	10	10	10				
				Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	-1.56	2.06	1.43	0.70	0.06	1.03	0.77			
				Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB	-4.28	3.99	3.58	3.22	2.28	3.27	3.09			
				Pertumbuhan Nilai Investasi daerah										
				PMA	-0,39%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%		
				PMDN	46,28%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%		
				Kontribusi PAD Pariwisata	16.059.553.821	17.000.000.000	20.000.000.000	22.000.000.000	24.000.000.000	25.000.000.000	25.500.000.000			

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian awal perencanaan tahun 2020	Target						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat			pariwisata bagi perekonomian daerah									
			Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Prosentase Desa Maju Mandiri didasarkn dari IDM	15.03	15.95	16.87	17.79	18.71	19.63		
			Meningkatnya dayaasaing dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	13.38	20	25	30	35	40		
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat			Persentase Tingkat Kemiskinan		4.94	4.22	4.18	4.10	4.08	4.04		
			Indeks Gini Rasio		0.303	0.281	0.276	0.271	0.266	0.261		
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77.07%	77.15 %	77.20 %	77.30 %	77.40 %	77.50 %		
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat			Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk	Prosentase PMKS yang mendapatkan program pelayanan sosial	17.38%	3%	3%	3%	3%	3%		

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian awal perencanaan tahun 2020	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Bekerja Integritas, Kompeten Dan Profesional	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,14	92,02	92,06	92,10	92,14	92,18	92,22
					56,17	58	60	65	70	75	80
					2.1	2,29	2,26	2,24	2,21	2,19	2,1
		Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Total Fertility Rate	CC	B	B	B	BB	BB	BB
					WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					3.80	4.00	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50
					BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
					0	1	1	1	1	1	1
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Maturitas SPIP	3	3,11	3,50	3,60	3,70	3,80	4,00

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian awal perencanaan tahun 2020	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Meningkatnya Pendapatan asli Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Tingkat Pertumbuhan PAD	1.36%	4.07%	1.12 %	3.28 %	3.33 %	3.39%	3.44 %
				Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	
				Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	
				Indek Inovasi Daerah	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	
				Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	50,00%	50,00 %	60,00 %	70,00 %	80,00 %	90,00 %	100,00 %
				Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori baik	94%	94%	95%	93%	96%	97%	97%
				Cakupan standar kompetensi pegawai	90%	94.10 %	94.50 %	95.00 %	95.50 %	96.00 %	96.00 %
				Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%
				Indeks Kematangan TI	2,98	2.98	2.98	2.98	2.99	3.00	3.01

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian awal perencanaan tahun 2020	Target										
						2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				Penerapan SPBE												
				Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	100	100	120	140	160	170	175					
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B	B	B	B	B					
				Persentase Masyarakat yang Melakukan Kunjungan Perpustakaan	58.00%	42.00 %	60.00 %	70.00 %	80.00 %	90.00 %	100.00 %					
				Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital	35.71%	44.64 %	53.57 %	62.50 %	71.43 %	80.36 %	100%					
				Cakupan Kepemilikan Dokumen Admindak	79,12%	83,23	84,8	87,4	89,8	92,2	94,6					
				Indeks Risiko Bencana	203,20	203,10	203,05	203,00	202,80	202,50	200,00					
				Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda	7.4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%					

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian awal perencanaan tahun 2020	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama ditengah-tengah masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama	Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat	86.45	86.90	87.40	87.95	88.50	89.00	89.50
					0	0	0	0	0	0	0

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

“Bab ini akan menjelaskan tentang strategi yang akan diterapkan, serangkaian arah kebijakan (rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi) serta program pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah.”

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN AGAMIS			
Misi 1: Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disertai jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal	Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan	Peningkatan standarisasi dan inovasi layanan pendidikan	Pengembangan layanan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang merata di seluruh unit Pendidikan Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan, pendidikan karakter, dan kearifan lokal di tingkat pendidikan Penguatan kapasitas sumberdaya dan manajemen Pendidikan Pemberian beasiswa dan bantuan Pendidikan Inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi informatika

	Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal	Penguatan jati diri dan karakter daerah berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal, seni budaya, dan nilai tradisi berbasis masyarakat	<p>Penguatan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan seni budaya, kearifan lokal dan nilai budaya tradisi di masyarakat sebagai potensi daerah</p> <p>Sinergitas seni budaya di kurikulum pendidikan dalam rangka keberlanjutan daya dukung potensi daerah</p> <p>Fasilitasi kegiatan seni budaya dan nilai tradisi masyarakat sampai dengan tingkat desa</p> <p>Peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan berbasis seni budaya dan tradisi local</p> <p>Pembangunan sarana event seni budaya di tiap kecamatan</p> <p>Penyelenggaraan event seni budaya berskala nasional dan internasional</p> <p>Promosi potensi seni budaya lokal berbasis masyarakat</p>
--	---	---	--

Misi 2: Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat	Meningkatnya akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan serta pemeliharaan kesehatan lingkungan	<p>Meningkatkan pembinaan pola hidup sehat masyarakat</p> <p>Memperbaiki status gizi masyarakat</p> <p>Mengendalikan penyakit menular langung dan penyakit bersumber binatang serta penyehatan lingkungan</p> <p>Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kepesertaan jaminan kesehatan</p> <p>Penerapan pola hidup sehat bagi keluarga</p> <p>Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi</p> <p>Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan</p>
		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	

Memperluas cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin		
Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat		
Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan lansia		
Meningkatkan manajemen dan SDM kesehatan		
Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas serta terjangkau		
Meningkatkan kompetensi dan ketersediaan SDM bidang kesehatan		
Penataan Manajemen RSUD		
Peningkatan promosi kesehatan dalam menghadapi kondisi pandemi.		
Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan sampai dengan desa		
Penambahan layanan Jamkesda		

Misi 3: Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	Memantapkan penyediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna menunjang produktivitas antar wilayah	<p>Pembangunan dan pemeliharaan serta peningkatan daya dukung dan kualitas Jalan dan Jembatan yang menghubungkan kawasan strategis, sentra produksi dan pemasaran</p> <p>Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta sarana irigasi, pengairan dan sarana produksi lainnya di wilayah wilayah sentra produksi pertanian</p> <p>Pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air baku dan air bersih untuk mendukung kebutuhan masyarakat</p> <p>Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah</p> <p>Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman</p> <p>Penataan kawasan guna mendukung harmonisasi dan keberlanjutan wilayah</p>

<p>Pengembangan peta digital ruang wilayah dalam mendukung kebijakan SATU DATA</p> <p>Penyusunan rencana, menyediakan lahan serta membangun prasarana dan sarana Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang</p>		
<p>Pembangunan Rumah Layak Huni</p> <p>Penataan kawasan perumahan dan pemukiman</p> <p>Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan pemukiman</p> <p>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan perumahan dan pemukiman</p> <p>Penataan kawasan kumuh perkotaan</p>	<p>Meningkatkan Penataan perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan</p>	
<p>Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan</p> <p>Penguatan implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana pendukung LLAJ</p>	<p>Memantapkan sistem transportasi antar wilayah guna peningkatan mobilitas orang dan barang antar wilayah</p>	

<p>Peningkatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto</p>			
<p>Peningkatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang</p>			
<p>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p>			
<p>Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</p>			
<p>Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas perhubungan serta ketersediaan, kualitas, manajemen angkutan umum</p>			
<p>Meningkatkan ketersediaan, kualitas, manajemen angkutan Laut</p>			
<p>Pengembangan aplikasi pemantauan kondisi area pembuangan sampah dan limbah (kerjasama dengan kominfo)</p>	<p>Peningkatan tatakelola lingkungan hidup berbasis masyarakat</p>	<p>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam</p>	
<p>Pengawasan lingkungan sampai dengan tingkat kecamatan</p>			

<p>Peningkatan pemanfaatan ruang-ruang hijau di gedung pemerintahan dan sekolah</p>			
<p>Pengembangan kelompok atau komunitas berbasis desa atau kecamatan</p>			
<p>Peningkatan hasil olahan limbah bernilai ekonomi kerjasama dengan ekonomi kreatif</p>			
<p>Memelihara, Merehabilitasi dan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Persampahan</p>			
<p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan di perkotaan</p>			
<p>Meningkatkan perlindungan, konservasi, rehabilitasi dan pemulihan SDA LH</p>			
<p>Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi SDA LH dan sarana pengelolaan lingkungan hidup</p>			
<p>Meningkatkan penataan dan kualitas pemeliharaan ruang terbuka hijau</p>			

Misi 4: Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa	Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian	<p>Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan</p> <p>Pengembangan kawasan pertanian organik</p> <p>Optimalisasi lahan pertanian marginal dan pekarangan</p> <p>Pengembangan komoditas unggulan pertanian</p> <p>Pengembangan komoditas unggulan peternakan</p> <p>Penguatan gerakan pertanian organik, sertifikasi produk, dan kerjasama pemasaran Organik</p> <p>Peningkatan pembinaan dan fasilitas pengelolaan usaha pertanian (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil pertanian)</p>
		Peningkatan produksi dan nilai tambah produk perikanan	<p>Peningkatan produksi perikanan tangkap</p> <p>Pengembangan produksi dan nilai tambah perikanan budidaya</p> <p>Pengembangan olahan dan pemasaran produk perikanan</p>

			<p>Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan</p> <p>Peingkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha perikanan (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil perikanan)</p>
<p>Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri</p>		<p>Peningkatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi</p>	<p>Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi UKM dan Koperasi</p> <p>Pembinaan dan pengembangan usaha bagi wirausahawan baru</p> <p>Peningkatan Akses pasar UMKM dan koperasi ke daerah daerah yang potensial</p> <p>Fasilitasi Penerapan teknologi tepat guna</p> <p>Fasilitasi Kemitraan Usaha dengan perusahaan besar dan stakeholder potensial lainnya</p>
		<p>Meningkatnya kelancaran distribusi arus barang dan jasa</p>	<p>Pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas perdagangan yang semakin tersebar dan merata</p> <p>Peningkatan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di seluruh wilayah</p>

		<p>secara aman dan terkendali</p> <p>Menumbuhkan sektor industri kecil dan menengah berbasis komoditas unggulan daerah</p> <p>Penciptaan iklim investasi yang kondusif</p>	<p>Pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar</p> <p>Peningkatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</p> <p>Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</p> <p>Peningkatan fasilitasi kerjasama perdagangan dan perlindungan konsumen</p> <p>Roadmap pengembangan potensi sektor Industri</p> <p>Fasilitasi Kemitraan Usaha Industri Kecil dengan berbagai pihak potensial lainnya</p> <p>Pembinaan dan Pelatihan bagi pelaku industri kecil berbasis komoditas masyarakat</p> <p>Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha IKM (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil UKM)</p> <p>Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Bidang Penanaman Modal</p> <p>Memperbaharui dan mensosialisasikan kebijakan penanaman modal dan perijinan-perijinan serta meningkatkan</p>
	<p>Meningkatnya investasi daerah</p>		

			<p>promosi, kerjasama dan pelayanan investasi/penanaman modal</p> <p>Pengembangan Peta Digital Potensi Investasi</p> <p>Penigkatan Promosi Potensi Penanaman Modal</p> <p>Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal</p> <p>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan yang terintegrasi dengan SATU DATA Provinsi dan Nasional</p> <p>Pengembangan sinergitas BUMD dengan mitra strategis dalam upaya peningkatan PAD</p>
	<p>Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah</p>	<p>Peningkatan pariwisata lokal berbasis desa dan kawasan</p>	<p>Identifikasi obyek wisata di kawasan pariwisata budaya/religi, kawasan pariwisata alam dan kawasan-kawasan lain yang memiliki keunggulan karakter lokal belum dan sedang berkembang</p> <p>Pengembangan Desa Wisata dan Roadmap Pemulihan Destinasi Wisata</p> <p>Perbaikan sarana pendukung aksesibilitas interkoneksi antar obyek wisata yang bisa ditempuh dalam trip sehari</p>

			<p>Pengembangan Desa Wisata pintar berbasis karakter lokal didukung promosi e-commerce</p> <p>Peningkatan pembinaan dan fasilitasi usaha pariwisata (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, produk, pemasaran pariwisata)</p>
<p>Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja</p>		<p>Mencetak tenaga kerja unggul siap pakai</p>	<p>Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal yang unggul</p> <p>Fasilitasi pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan mendukung ekonomi daerah</p> <p>Fasilitasi pemasaran dan bursa tenaga kerja</p> <p>Perlindungan ketenagakerjaan</p> <p>Fasilitasi sertifikasi tenaga kerja</p> <p>Penyediaan job training</p> <p>Standarisasi sarana prasarana balai latihan kerja</p> <p>Fasilitasi pendampingan dan konsultasi ketenagakerjaan</p> <p>Peningkatan lapangan dan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja</p> <p>Peningkatan Kerjasama Pengembangan, pengerahan dan fasilitasi penempatan pada wilayah Transmigrasi</p>
<p>Meningkatnya kemandirian</p>		<p>Penguatan peran dan partisipasi</p>	<p>Optimalisasi peran lembaga desa dalam pembangunan</p>

	masyarakat dan desa	masyarakat dan desa dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa Penguatan kapasitas pemerintahan desa Pengembangan BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa Fasilitas penyediaan sarana prasarana, akses, dan aktivitas daya dukung perekonomian desa Sinergitas program pemerintah dengan desa
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan diversifikasi dan pengolahan pangan	Pengembangan lumbung pangan desa Peningkatan distribusi pangan Peningkatan ketersediaan pangan Pengembangan olahan pangan berbasis sumberdaya lokal Peningkatan keamanan pangan
	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk	Pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan Melakukan Pemberdayaan dalam Rangka Produktifitas Kelompok Miskin dan Rentan Penanganan dan Penguatan serta Pemberdayaan	Mengembangkan keanekaragaman produk pangan Pengembangan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil Pemberian bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan serta terdampak krisis (contoh pandemi)

	<p>Ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p>	<p>Pemberdayaan keluarga miskin melalui pelatihan life skill dan economic skill</p> <p>Pengembangan program usaha bersama berbasis keluarga</p> <p>Penguatan Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial</p> <p>Penguatan Penanganan Korban Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana</p> <p>Pemberdayaan perempuan di setiap kegiatan pembangunan</p> <p>Pelindungan perempuan dan anak dari kasus kekerasan</p> <p>Penyediaan pusat pendampingan dan konsultasi bagi perempuan dan anak</p> <p>Penguatan dan Penyebarluasan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana</p> <p>Fasilitasi pendampingan tenaga penyuluh KB di desa</p> <p>Fasilitasi alat dan obat kontrasepsi Keluarga Berencana (KB)</p> <p>Penyediaan layanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan konseling</p> <p>Peningkatan pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB</p>
	<p>Pengarusutamaan gender dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak</p> <p>Penguatan Program Keluarga Berencana dan pengendalian penduduk</p>	

Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Percepatan penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi	<p>Evaluasi terhadap peta jalan reformasi birokrasi</p> <p>Perumusan kebijakan percepatan reformasi birokrasi</p> <p>Peningkatan koordinasi kelembagaan antar eksekutif dan legislative</p> <p>Penguatan tugas-tugas kewilayahan</p> <p>Pendelegasian kewenangan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>Penataan dan penguatan organisasi</p> <p>Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintahan daerah</p> <p>Penetapan IKU Pemerintah Daerah berdasarkan target-target RPJMD</p> <p>Penetapan IKU OPD berdasarkan target-target Renstra</p>
		Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan	

		Indikator Kinerja Utama	<p>Pelaksanaan program kegiatan berdasarkan rencana kegiatan tahunan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan tahunan</p> <p>Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan tahunan</p>
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam Lingkup Pemerintah Daerah	<p>Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja dan keuangan</p> <p>Menata kelembagaan dan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)</p> <p>peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengawas internal pemerintah</p> <p>Penyusunan kebijakan operasional dan teknis pengawasan tahunan</p>	<p>Peningkatan Pendapatan dan Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel</p>
Meningkatnya Pendapatan asli daerah	Optimalisasi pendapatan daerah dan penguatan		

	<p>Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi</p>	<p>pengelolaan keuangan daerah</p> <p>Penguatan system perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian pengembangan daerah</p>	<p>Penguatan system Perencanaan Pembangunan Daerah yang komprehensif dan integratif, didukung oleh kapasitas perencanaan yang handal serta data dan informasi yang tepat dan terarah</p> <p>Optimalisasi kegiatan koordinasi dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah</p> <p>Peningkatan kreasi dan inovasi daerah</p>
<p>Meningkatnya kualitas SDM aparatur</p>	<p>Penguatan manajemen pengelolaan kepegawaian</p>	<p>Pemberian reward and punishment di jajaran birokrasi</p> <p>Peningkatan kualitas SDM, disiplin kerja dan kesejahteraan aparatur</p>	
<p>Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI</p>	<p>Digitalisasi Informasi Publik</p>	<p>Penyiapan roadmap dan masterplan digitalisasi informasi public</p> <p>Pengembangan, pengintegrasian, dan pemanfaatan interoperabilitas sistem informasi dalam satu big data</p> <p>Penyediaan infrastruktur pendukung layanan teknologi informatika</p>	

	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI</p>	<p>Digitalisasi Pelayanan Publik</p>	<p>Penguatan jejaring komunikasi informasi dan persandian daerah</p> <p>Penguatan intensitas komunikasi melalui media komunikasi publik yang efektif</p> <p>Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi dan Kerjasama Pelayanan Informasi dengan Media Massa</p> <p>Penyiapan roadmap dan masterplan digitalisasi layanan publik</p> <p>Pengembangan e-government</p> <p>Penetapan Tata Naskah Dinas Elektronik</p> <p>Pengembangan ekonomi digital (e-commerce)</p> <p>Penyediaan infrastruktur pendukung layanan teknologi informatika</p> <p>Pengembangan aplikasi pendukung layanan publik, informasi, promosi potensi daerah, pariwisata, dan aktivitas penunjang masyarakat lainnya</p> <p>Peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi pelayanan public</p>
--	---	--------------------------------------	--

Inovasi pelayanan publik jemput bola		
Penguatan jejaring komunikasi informasi dan persandian daerah		
Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Berbasis Digital		
Peningkatan tertib administrasi arsip dan pelayanan publik		
Peningkatan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Peningkatan Kapasitas Sistem dan Penataan Management Layanan Perizinan		
Peningkatan Kapasitas Sistem dan Penataan Management Pelayanan Dasar bagi Pemerintah Daerah		
Peningkatan Kapasitas Sistem dan Penataan Management Layanan Pajak dan Retribusi Daerah		
Peningkatan Kapasitas Sistem dan Penataan Management Layanan Ketenagakerjaan		

Misi 6: Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama ditengah-tengah masyarakat	Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama	Penguatan dan kampanye nilai agama ditengah masyarakat	Penerapan nilai-nilai agama yang sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut Penguatan peran serta tokoh agama dalam menjalankan kehidupan beragama di masyarakat

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Adapun Program Prioritas Daerah yang disusun dalam kerangka RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026 sebagai jawaban terhadap isu permasalahan strategis, juga menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Melalui program pembangunan daerah inilah dapat dilihat seperti apa nantinya visi dan misi daerah akan dijabarkan dalam program beserta pendanaannya secara berkelanjutan di tiap tahunnya. Adapun program prioritas dimaksud sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
3. Pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang yang sesuai dengan kapasitas anggaran daerah
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang salah satunya melakukan penurunan angka pengangguran
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal yang lebih mengutamakan sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKM serta potensi - potensi yang berhubungan dengan pengembangan industri kreatif yang berada ditengah - tengah masyarakat
7. Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
8. Pemerataan pembangunan antar wilayah (kecamatan)
9. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih difokuskan kepada Penanganan pencemaran lingkungan dan limbah

10. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang lebih difokuskan kepada pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan dan pengelolaan persampahan secara menyeluruh
11. Peningkatan kemampuan fiskal daerah untuk pendanaan pembangunan
12. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai

Selanjutnya selain Program prioritas pembangunan daerah yang telah dipaparkan diatas maka terdapat pula program - program yang menjadi kebutuhan dan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai penjabaran dari urusan – urusan yang menjadi kewenangan daerah dapat diampaikan sebagai berikut:

Tabel 6.2. Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH			
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Misi 1 : Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat																		
	Tujuan 1.1 : Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Rata-Rata Harapan Sekolah	7,5 12,57	7,64	7,79	7,93	8,07	8,22	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
	Sasaran 1.1.1 :																	
	Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan	Angka Pendidikan Dasar yang Ditamatkan	47,52	48,10	48,72	49,31	49,91	50,51	51,11	51,11	51,11	51,11	51,11	51,11	51,11	51,11	51,11	DISDI KBUD
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD	100,00	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DISDI KBUD
		APM SMP	99,45	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DISDI KBUD
		APK PAUD	85,28	100,00	87	88,5	90	91,5	93	93	93	93	93	93	93	93	93	DISDI KBUD
		Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/ esetaraan	100,00	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DISDI KBUD
		Capaian SPM Bidang Pendidikan	83,05	83,10	83,15	83,20	83,25	83,30	83,35	83,35	83,35	83,35	83,35	83,35	83,35	83,35	83,35	DISDI KBUD
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DISDI KBUD
		Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar. PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan terhadap rombel	78,21	78,21	81,21	84,21	87,21	90,21	93,21	93,21	93,21	93,21	93,21	93,21	93,21	93,21	93,21	DISDI KBUD
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN																	DISDI KBUD
																		DISDI KBUD

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase izin pendidikan dasar: PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat	100	100	112.000.000	100	112.000.000	100	112.000.000	100	112.000.000	100	112.000.000	100	112.000.000	560.000.000	DISDI KBUD	
			0	41.38 %	48.28 %	68.62 %	79.31 %	93.10 %						100%				
	Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal serta daya dukung generasi muda bagi daerah	Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional	0	41.38 %	48.28 %	68.62 %	79.31 %	93.10 %						100%			DISDI KBUD	
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan kelompok budaya yang dibina	30,00	30,00	671.415.950	35,00	1.000.000	42,50	1.530.000	57,50	1.680.000	67,50	1.680.000	72,50	1.680.000	8.241.415.950	DISDI KBUD	
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan kelompok kesenian yang dibina	30,00	30,00	157.574.000	35,00	1.000.000	42,50	1.530.000	57,50	1.680.000	67,50	1.680.000	72,50	1.680.000	7.727.574.000	DISDI KBUD	
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan. event. dan organisasi masyarakat	0,00	0,00		9,36	150.000.000	12,49	150.000.000	18,73	150.000.000	28,09	150.000.000	31,32	150.000.000	750.000.000	DISDI KBUD	

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	25,64	171.010.000	38,46	300.000.000	51,28	350.000.000	64,10	400.000.000	84,62	450.000.000	100,00	500.000.000	100,00	2.171.010.000	DISDI KBUD	
		Misi 2 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional																
		Tujuan 2.1 : Meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat	64,64	64,85	65,06		65,26	65,47		65,68		65,89		65,89		65,89		
		Sasaran 2.1.1: Meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	204 Per 100.000 KH	202	200		194	183		182		180		183		183	Dinke s	
		Angka kematian bayi	8,29 Per 1.000 KH	8,27	8,25		8,23	8,21		8,19		8,17		8		8	Dinke s	

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
		Angka Prevalensi stunting	18,40%	21,2		18,4		16		14		13,5		14				Dinke S
		Persentase fasyankes yang terstandar dan terakreditasi	25%	25%		30%		35%		40%		45%		50%				Dinke S
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100%	69,0 31,5 99,8 95	100	41,6 62,8 38,5 00	100	44,9 67,4 44,0 00	100	38,7 91,9 53,2 00	100	59,1 04,5 07,3 25	100	62,5 18,8 47,1 55	100	316,0 77,19 0,075	Dinke S
		Persentase kepemertaan jaminan kesehatan	74%	74		85		90		90		95		98				Dinke S
		Persentase Desa Stop BABS	15 %	15		20		25		35		40		50				Dinke S
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100%	89,3 70,9 99	100	36,0 00,0 00	100	39,0 00,0 00	100	42,0 00,0 00	100	45,0 00,0 00	100	48,0 00,0 00	100	299,3 70,99 9	Dinke S
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	55 %	7,62 3,78 3,50 0	55	7,42 0,83 0,00 0	60	8,62 7,92 1,50 0	65	8,11 3,78 3,50 0	70	9,10 8,17 1,50 0	75	8,98 0,20 9,00 1	75	49,87 4,699 .001	Dinke S
		Persentase Kecamatan menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	0 %	60		60		70		80		90		100				Dinke S

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %	105 4.35 0.00 0	1.21 3.37 0.00 0	100	1.34 4.00 9.00 0	100	1.48 9.57 1.00 0	100	1.58 5.61 8.80 0	100	1.83 4.51 0.00 0	100	8.521 .428. 800	Dinke s		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pemenuhan Pendapatan Puskesmas	100	64.1 66.2 01.4 82	65.7 70.3 56.5 19	100	67.3 74.5 11.5 56	100	68.9 78.6 66.5 93	100	70.5 82.8 21.6 30	100	72.1 86.9 76.6 67	10%	409.0 59.53 4.447	Dinke s		
		Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	80%			80%		80%		80%		80%		80%	-	RS.DR DJATP RAWI RANE GRA		
02 D2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	80,07%	19.9 95.0 00	150. 000. 000 000	90%	150. 000. 000 000	90%	150. 000. 000 000	90%	150. 000. 000 000	90%	150. 000. 000 000	90%	769.9 95.00 0	RS.DR DJATP RAWI RANE GRA		
		Tingkat sarana prasarana RS dalam kondisi baik	66%	655. 649. 952	2.88 9.00 0.00 0	66%	3.00 0.00 0.00 0	76%	3.20 0.00 0.00 0	83%	3.30 0.00 0.00 0	90%	3.30 0.00 0.00 0	90%	16.34 4.649 .952	RS.DR DJATP RAWI RANE GRA		
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase SDM yang mengikuti Diklat sesuai standar kompetensi	20%	-	150. 000. 000 000	25%	250. 000. 000 000	25%	250. 000. 000 000	25%	250. 000. 000 000	25%	250. 000. 000 000	100%	1.150 .000. 000 000	RS.DR DJATP RAWI RANE GRA		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Tingkat Pemenuhan Pendapatan RS	100%	172. 010. 571. 597	176. 372. 551. 137	100%	180. 781. 864. 915	100%	185. 301. 411. 538	100%	189. 933. 946. 827	100%	194. 682. 295. 497	100%	1.099 .082. 641.5 11	RS.DR DJATP RAWI RANE GRA		

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Angkutan Laut	0	1.18 1.01 8.75 0	25%	2.15 6.52 5.00 0	25%	2.15 6.52 5.00 0	25%	3.00 0.00 0.00 0	25%	3.10 0.00 0.00 0	25%	3.20 0.00 0.00 0	0.25	14.79 4.068 .750	DISH UB	
2 15 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang memiliki izin	0	0,00%	20%	100. 000. 000	20%	100. 000. 000	20%	110. 000. 000	20%	110. 000. 000	20%	100. 000. 000	0,2	520.0 00.00 0	DISH UB	
2 15 05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Prasarana Perkeretaapian Umum yang memiliki izin	0%	0	50%	600. 000. 000	50%	600. 000. 000	50%	600. 000. 000	50%	600. 000. 000	50%	600. 000. 000	50%	3.000 .000. 000	DISH UB	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			17.1 24.9 99.9 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP TB	
		Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum	85,89	87,12	87,73	88,34	88,96	89,57	90,18	90,18	90,18	90,18	90,18	90,18	90,18	90,18	DPKP TB	
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses air melalui SPAM	88,58	89,01	89,53	89,95	90,35	90,73	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	DPKP TB	

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH				
			CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025			TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
		70,25	71,47	72,09	72,7	73,31	90,73	73,93	74,54	74,54	74,54	74,54	74,54	74,54	74,54	74,54	74,54	DKPK TB	
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses pengelolaan air limbah domestik	67,01	68,62	69,9	71,07	72,18	72,18	73,27	73,27	73,27	73,27	73,27	73,27	73,27	73,27	73,27	68,10 1.376 .001	DKPK TB
		50	55	60	65	70	75	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	DKPK TB	
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Prasarana Permukiman pada kawasan strategis yang tertangani	7,19 4,04 5,90 0	2,00 0,00 0,00 0	30	40	50	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	10,00 0,000 .000	DKPK TB
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB	32,9 32,6 17,6 25	47,0 00,0 00,0 00	21	23	25	25	27	27	27	27	27	27	27	27	27	279,9 32,61 7,625	DKPK TB
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang teratur	12,0 35,3 87,4 75	25,7 90,0 00,0 00	21	23	25	25	27	27	27	27	27	27	27	27	27	149,5 20,66 8,413	DKPK TB

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH				
			CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025			TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
		Persentase kawasan kumuh	0,2		0,2		0,18		0,16		0,14		0,12		0,1		0,1		DPKP TB
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh	10	408.392.200	10	300.000.000	15	300.000.000	20	300.000.000	25	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	1.800.000.000	DPKP TB
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan perbaikan rumah di kawasan kumuh	6,5	15.830.460.99	6,82	19.500.000.00	18,18	19.500.000.00	22,22	19.500.000.00	28,57	11.000.000.00	40	11.000.000.00	66,67	7.500.000.00	66,67	82.330.460.799	DPKP TB
		Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi	35		35	41,66		48,33		55		61,66		68,33		68,33			DPUP R
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jumlah tenaga terampil konstruksi yang telah bersertifikat (SKT) di Kabupaten Serang	16,7	1.552.965.040	16,7	2.116.405.040	25	2.116.405.040	33,33	2.116.405.040	41,7	2.116.405.040	50	2.116.405.040	58,3	2.116.405.040	58,3	12.134.990.240	DPUP R
		Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik	50		51,85		52,5		55,56		58,08		60,96		63,89		63,89		DPUP R
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan infrastruktur drainase desa kewenangan kabupaten	20,24	6.908.832.250	20,24	6.931.082.250	29,12	6.931.082.250	36,11	6.931.082.250	51,53	6.931.082.250	56,13	6.931.082.250	65,64	8.000.000.00	65,64	42.633.161.250	DPUP R

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
		Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	84	96	62,5	64,9	67,3	69,7	72,1	72,1	72,1					DPUP R		
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Cakupan infrastruktur jalan kabupaten	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.149.000.621.360	DPUP R	
		Tingkat Pemanfaatan Informasi dalam pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		DPUP R	
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Tingkat ketaatan tata ruang dengan rencana tata ruang wilayah	83	85	87,5	90	92,5	93	94	94	94	94	94	94	94	48.145.882.115	DPUP R	
2 10 02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Presentase Penyelesaian Izin Lokasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000.000.000	DPUP R	
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Presentase Penyelesaian ganti kerugian tanah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2.500.000.000	DPUP R	
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH	Presentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	9.783.102.345	DPUP R	

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
		Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	5	13.8 40.7 99,99 %	20.6 24.8 13,80 %	18.18 97.3 54.0 85	23.4 72.0 23.30 %	28.43 14.2 98.4 43	40	25.3 14.2 98.4 43	100	27.3 40.7 28.2 87	100	100	DPUP R			
		Cakupan ketersediaan air baku	100%												DPUP R			
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Infrastruktur Air Baku dalam Kondisi Baik	39	27.3 17.6 80.0 48	27.3 17.6 80.0 48	18,75 80.0 48	30,11 92.9 38.3 35	41,47 35.1 47.2 84	100%	55	31.2 61.5 77.1 28	55	169.8 42.70 2.891	DPUP R				
		Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam	49.25	49,75	50,25	50,75	51,25	51,75	52,25	52,25	52,25	52,25	52,25	DLH				
		Indeks Kualitas Udara	82.25	82,5	82,75	83	83,25	83,5	83,75	83,75	83,75	83,75	83,75	DLH				
2 11 02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan dokumen lingkungan hidup yang dibuat dan diproses	3 Dok	62.9 20.0 00	600. 000. 000	3 dok	600. 000. 000	3 dok	600. 000. 000	3 dok	600. 000. 000	3 dok	1.00 0.00 0.00 0	3.862 .920. 000	DLH			

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
2 11 03	Program Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan IKA, IKU, dan ITV/L	250 Sampel	719,988.300	300 Sampel	1.750.807.200	300 Sampel	1.750.807.200	300 Sampel	1.750.807.200	300 Sampel	1.750.807.200	300 Sampel	300 Sampel	2.000.000	9.972.409.900	DLH	
2 11 05	Program Pengendalian bahan Berbahaya (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Prosentase penataan pengelolaan limbah B3 dan limbah pada kegiatan/usaha	100%	89.878.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	100%	500.000.000	2.339.878.000	DLH	
2 11 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Prosentase penataan pengelolaan lingkungan kegiatan/usaha	100%	252.396.100	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	100%	750.000.000	4.002.396.100	DLH	
2 11 08	Program Peningkatan Pendidikan dan pelatihan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Tingkat peran serta lembaga kemasyarakatan / pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100 Lembaga Kemasarakatan/Pendidikan	189.136.000	100 Lembaga Kemasarakatan/Pendidikan	300.000.000	100 Lembaga Kemasarakatan/Pendidikan	350.000.000	100 Lembaga Kemasarakatan/Pendidikan	375.000.000	100 Lembaga Kemasarakatan/Pendidikan	375.000.000	100 Lembaga Kemasarakatan/Pendidikan	100 Lembaga Kemasarakatan/Pendidikan	400.000.000	2.114.136.000	DLH	
2 11 09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	tingkat kepedulian masyarakat atau kelompok/lembaga masyarakat/ lembaga pendidikan/	4 Kelompok	39.545.000	5 Kelompok	500.000.000	6 Kelompok	500.000.000	7 Kelompok	500.000.000	8 Kelompok	500.000.000	9 Kelompok	500.000.000	2.537.625.000	DLH		

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH			
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.	
		dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup																	
2 11 10	Program Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase pengaduan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang tertangani	100%	189.009.800	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.659.009.800	DLH
		Indeks tutupan Vegetasi	69,98	69,985	69,99	69,995	70	70,005	70,01	70,01	70,01	70,01	70,01	70,01	70,01	70,01	70,01		DLH
2 11 04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan ITV/L	2 Ha	255.034.700	2 Ha	600.000.000	2 Ha	600.000.000	2 Ha	600.000.000	2 Ha	600.000.000	2 Ha	600.000.000	2 Ha	600.000.000	10 ha	3.805.034.700	DLH
		Persentase Penanganan Sampah	14,53	15,03	17,44	19,85	22,27	24,68	27,09	27,09	27,09	27,09	27,09	27,09	27,09	27,09	27,09		DLH
2 11 11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah terangkut	11,53%	11,99%	14,39%	16,78%	19,18%	21,58%	23,98%	23,98%	23,98%	23,98%	23,98%	23,98%	23,98%	23,98%	23,98%	94,24	DLH
		Persentase sampah terkurangi	3%	3,02%	3,04%	3,05%	3,07%	3,08%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	9,978.150	DLH
		Persentase Rumah Layak Huni	89,26%	89,26%	89,88%	90,49%	91,10%	91,72%	92,33%	92,33%	92,33%	92,33%	92,33%	92,33%	92,33%	92,33%	92,33%		DPKP TB
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	59,60	DPKP TB

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH				
			CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025			TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
		rumah layak huni bagi korban bencana dan Relokasi Program Kabupaten/ Kota																	
		Persentase Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin																	
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	10	1.04 1.24 3.69 9	10	4.10 0.00 0.00 0	15	4.10 0.00 0.00 0	20	4.10 0.00 0.00 0	25	6.10 0.00 0.00 0	30	8.82 9.30 3.75 0	30	28.27 0.547 .449	100	5.000 .000. 000	DPKP TB
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah dan PSU Tingkat Kemampuan Kecil yang memiliki sertifikasi dan registrasi	10%	0	10	300. 000. 000	15	450. 000. 000	20	600. 000. 000	25	750. 000. 000	30	900. 000. 000	30%	3.000 .000. 000		DPKP TB	
		Misi 4 : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat untuk optimalisasi penyerapan																	

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
	tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan																	
	Tujuan 4.1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan desa																	
	Sasaran 4.1.1: Meningkatkan produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas																	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	50	55	562.324.500	60	1.000.000.000	65	1.000.000.000	70	1.000.000.000	75	1.000.000.000	80	1.000.000.000	80	5.562.324.500	DISPE RTAN
		Pertumbuhan Sumber Daya Genetik (SDG)	0,08	0,13	0	0,16	500.000.000	0,18	500.000.000	0,19	500.000.000	0,21	500.000.000	0,23	500.000.000	0,23	2.500.000.000	DISPE RTAN
		Prosentase Benih / Bibit bersertifikat	5	6	0	7	1.000.000.000	9	1.000.000.000	11	1.000.000.000	12	1.000.000.000	14	1.000.000.000	14	5.000.000.000	DISPE RTAN
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Prosentase Prasarana pertanian dengan	50	55	162.823.740.000	60	100.000.000.000	65	750.000.000.000	67	750.000.000.000	70	100.000.000.000	75	110.000.000.000	75	62.282.374.000	DISPE RTAN

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
	N PRASARANA PERTANIAN	kondisi baik (JUT. embung, RPH, dll)																
3 27 04	PROGRAM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINERT	Cakupan pencegahan dan penanganan penyakit ternak	10	13	124.732.504	15	500.000.000	17	500.000.000	20	500.000.000	23	750.000.000	25	750.000.000	25	3.124.732.504	DISPE RTAN
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pencegahan dan penanganan bencana pertanian	35	40	193.030.700	45	1.000.000.000	47	1.000.000.000	50	1.000.000.000	55	1.000.000.000	60	1.000.000.000	60	5.193.030.700	DISPE RTAN
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase perizinan usaha pertanian	14	15	0	17	200.000.000	20	300.000.000	23	300.000.000	25	300.000.000	27	350.000.000	27	1.450.000.000	DISPE RTAN
		Prosentase perizinan usaha Perizinan Usaha Benih/Bibit Ternak dan Pakan. Fasilitas Pemeliharaan Hewan. Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan. Rumah Potong Hewan	15	17	0	19	350.000.000	20	450.000.000	22	450.000.000	24	450.000.000	25	500.000.000	25	2.200.000.000	DISPE RTAN
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	45	50	2.330.663.500	53	2.200.000.000	55	2.200.000.000	57	2.200.000.000	60	2.500.000.000	63	2.700.000.000	63	14.130.663.500	DISPE RTAN

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
		Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	-2,16		1,99		1,48		1,61		1,97		1,76		1,76		DKPP	
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Capaian produksi perikanan tangkap	79,15	22,3 95,4 00	82,4 000 000	83,6 000 000	136. 500. 000	84,1 000 000	136. 500. 000	84,7 000 000	84,7 000 000	85,8 000 000	158. 000. 000	85,8 000 000	158. 000. 000	733,8 87,40 0	DKPP	
		Cakupan bantuan sarana penangkapan ikan	7,51%	562. 720. 000	7,51%	567. 840. 000	567. 840. 000	567. 840. 000	567. 840. 000	626. 044. 000	626. 044. 000	657. 346. 000	657. 346. 000	657. 346. 000	657. 346. 000	3.522 .590. 000	DKPP	
		Cakupan bina kelompok nelayan	3,95	27,7 80,0 00	15,81 000 000	17,79 000 000	1,71 5,00 0,00 0	19,76 000 000	1,71 5,00 0,00 0	17,79 000 000	21,74 000 000	23,72 000 000	208. 500. 000	23,72 000 000	208. 500. 000	7.366 .610. 000	DKPP	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	76,92	303. 495. 000	76,92 000 000	76,92 000 000	1,83 4,02 5,00 0	76,92 000 000	1,83 4,02 5,00 0	76,92 000 000	76,92 000 000	76,92 000 000	2,22 9,20 0,00 0	76,92 000 000	2,22 9,20 0,00 0	10,15 7.884 .000	DKPP	
		Persentase tanda daftar kapal perikanan < 10 GT	6,57	198 24,4 00	6,57 000 000	6,57 000 000	52,5 00,0 00	6,57 000 000	52,5 00,0 00	6,57 000 000	6,57 000 000	6,57 000 000	60,7 75,0 00	6,57 000 000	60,7 75,0 00	296,1 06,40 0	DKPP	
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase izin usaha perikanan budidaya	100%	0	100 000 000	100 000 000	63,0 00,0 00	100 000 000	63,0 00,0 00	100 000 000	100 000 000	100 000 000	72,9 30,0 00	100 000 000	72,9 30,0 00	331,5 38,00 0	DKPP	
		Cakupan pembinaan kelompok pembudidaya ikan kecil	5,71	13,3 80,0 00	7,14 000 000	7,14 000 000	628. 215. 000	7,14 000 000	628. 215. 000	7,14 000 000	7,14 000 000	7,14 000 000	727. 238. 000	7,14 000 000	727. 238. 000	3.287 .955. 000	DKPP	
		Persentase tanda daftar pembudidaya ikan kecil	9,46%	12,3 00,0 00	28,37 000 000	37,83 000 000	131. 250. 000	47,28 000 000	131. 250. 000	56,74 000 000	56,74 000 000	66,19 000 000	151. 940. 000	66,19 000 000	151. 940. 000	703,0 07,00 0	DKPP	
		Cakupan bantuan sarana	1,71%	520. 250. 000	7,71 000 000	10,57 000 000	3,80 0,00 0,00 0	13,43 000 000	3,80 0,00 0,00 0	16,29 000 000	16,29 000 000	19,14 000 000	3,80 0,00 0,00 0	19,14 000 000	3,80 0,00 0,00 0	19,52 0,250 .000	DKPP	

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH				
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.		
		perikanan budidaya																		
		Capaian produksi perikanan budidaya	56,35	75,22	44,3	747.000.000	80,2	747.000.000	88,1	747.000.000	90,2	864.745.000	91	907.984.000	91	907.984.000	91	4.058.049.000	DKPP	
		Capaian produksi garam	-	8,20%	0	900.000.000	22,2	900.000.000	50,2	900.000.000	64,2	900.000.000	78,2	1.093.950.000	78,2	1.093.950.000	78,2	4.693.950.000	DKPP	
		Capaian produksi benih ikan	58,57	58,57	448.200.000	61,5	522.960.000	64,43	549.108.000	67,36	549.108.000	70,29	605.392.000	73,21	635.662.000	73,21	635.662.000	73,21	3.310.430.000	DKPP
		Cakupan Surveilenn hama dan penyakit ikan	100%	100%	215.126.700	100%	168.000.000	100%	176.400.000	100%	176.400.000	100%	194.481.000	100%	204.205.050	100%	204.205.050	100%	1.134.612.750	DKPP
3	25	05		80%	0	987.900.000	80%	103.730.000	80%	103.730.000	80%	114.362.000	80%	120.080.000	80%	120.080.000	80%	540.692.000	DKPP	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																		
3	25	06		16	0	500.000.000	16	525.000.000	16	551.250.000	16	578.820.000	16	607.760.000	16	607.760.000	16	276.283.000	DKPP	
		Cakupan pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran	-	20	0	100.526.000	20	105.553.000	20	105.553.000	20	116.372.000	20	122.190.000	20	122.190.000	20	550.194.000	DKPP	

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
		Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi																
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang sehat	16,67%	22,15 %	45,00	25,68 %	205,150	28,90 %	227,745	31,86 %	227,745	34,57 %	242,110	37,08 %	247,110	37,08 %	1.194.860.000	DISKO PERIN DAG
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi terlatih	100	100	234,182	100	610,414	100	610,414	100	610,414	100	610,414	100	610,414	100	3.286.256.400	DISKO PERIN DAG
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	74,72%	75,33	0	76,18	1,05	5,40	5,00	77,72	1,05	5,40	78,42	79,07	1,05	5,40	5.277.025.000	DISKO PERIN DAG
		Pertumbuhan Wirausaha Baru	9,64	5		10		10		10		10		10		55		DISKO PERIN DAG
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	3,31%	4	156,121	4	1,50	0,00	0,00	6	1,50	0,00	7	9	1,50	0,00	7.656.121.600	DISKO PERIN DAG
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil	15,16	0,01	530,000	0,01	3,15	0,00	0,00	0,01	3,15	0,00	0,01	0,01	3,15	0,00	16,28.000.000	DISKO PERIN DAG
		Pertumbuhan PDRB sektor industri	-4,28	3,99		3,58		3,22		2,28		3,27		3,09				DISKO PERIN DAG

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri baru	0,29%	1	73.1 13.4 26	1	445.000.000	1	350.000.000	1	305.000.000	1	310.000.000	1	315.000.000	5	1.798.113.426	DISKO PERIN DAG
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Prosentase perizinan usaha industri	100	100	21.7 50.0 00	100	43.500.000	100	56.000.000	100	56.000.000	100	56.000.000	100	56.000.000	100	289.250.000	DISKO PERIN DAG
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	98,82	98,82	0	98,83	120.000.000	98,84	120.000.000	98,85	120.000.000	98,86	120.000.000	98,87	120.000.000	98,87	600.000.000	DISKO PERIN DAG
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	-1,56	2,06		1,43		0,70	0,06			1,03	0,77			0,77		DISKO PERIN DAG
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang diterbitkan	95,14%	95	0	95	29.500.000	95	29.500.000	95	29.500.000	95	29.500.000	95	29.500.000	95	147.500.000	DISKO PERIN DAG
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Omzet Pedagang	2	2	968.136.730	2	1.739.000.000	2	1.739.000.000	2	1.754.000.000	2	2.000.000.000	2	2.100.000.000	10	10.300.136.730	DISKO PERIN DAG
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100	100	29.125.000	100	210.000.000	100	320.000.000	100	320.000.000	100	280.000.000	100	345.000.000	100	1.504.125.000	DISKO PERIN DAG

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor (US\$ dalam juta dollar)	1000	500	600	1.000.000	850.000.000	700	850.000.000	800	850.000.000	900	850.000.000	1000	850.000.000	1000	4.460.000.000	DISKO PERIN DAG
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal	0,9	0,9	1	800.000.000	850.000.000	1,5	400.000.000	2	400.000.000	2,5	450.000.000	3	450.000.000	3	3.140.000.000	DISKO PERIN DAG
3 30 07	PROGRAM DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	0	0	0	0	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	600.000.000	DISKO PERIN DAG
		Pertumbuhan Nilai Investasi daerah																
		Sasaran 4.1.3: Meningkatkan investasi daerah	-0,39%	3%	3%			3%		3%		3%		3%		3%		
		PMDN	46,28%	3%	3%			3%		3%		3%		3%		3%		
2 18 02	PROGRAM IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai investasi	7,90 Trilyun	5,44 Trilyun	5,60 Trilyun	450.000.000	550.000.000	5,77 Trilyun	260.000.000	5,95 Trilyun	260.000.000	6,12 Trilyun	400.000.000	6,30 Trilyun	350.000.000	6,49 Trilyun	2.022.000.000	DPMP TSP
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	100%	100%	100%	200.000.000	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	300.000.000	100%	1.547.360.000	DPMP TSP
2 18 05	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	100%	100%	100%	325.000.000	350.000.000	100%	375.000.000	100%	375.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	1.926.050.000	DPMP TSP

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH					
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN				
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.			
2	18 06	Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	372.462.000	100%	350.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.372.462.000	DPMP TSP	
2	18 04	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	100%	510.220.000	100%	500.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	525.000.000	100%	600.000.000	100%	3.085.220.000	DPMP TSP	
		Sasaran 4.1.4 : Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah																		
		Kontribusi PAD Pariwisata	16.059.553.821	17.000.000.000	17.010.000.000	17.020.000.000	17.030.000.000	17.040.000.000	17.050.000.000	17.050.000.000	17.050.000.000	17.050.000.000	17.050.000.000	17.050.000.000	17.050.000.000	17.050.000.000	17.050.000.000	17.050.000.000	17.050.000.000	DISP ORAP AR
3	26 02	Persentase Daya tarik destinasi pariwisata Kabupaten	0%	0	75,76 %	81,82 %	87,88 %	93,94 %	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	720.000.000	DISPO RAPA R	
		Persentase Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten	0%	0	20%	40%	60%	80%	100%	200.000.000	20%	300.000.000	40%	350.000.000	60%	600.000.000	100%	1.770.000.000	DISPO RAPA R	
		Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten	0%	204.664.000	20%	300.000.000	40%	340.000.000	80%	390.000.000	60%	510.000.000	80%	510.000.000	100%	520.000.000	100%	2.264.664.000	DISPO RAPA R	
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pelaku	0%	0	16,67 %	33,33 %	52,78 %	75%	100%	150.000.000	16,67 %	150.000.000	33,33 %	150.000.000	52,78 %	150.000.000	100%	720.000.000	DISPO RAPA R	

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Pemasaran PARIWISATA Kabupaten	0%	1.11 4.37 6.00 0	21,62 %	1.09 3.00 0.00 0	41,22 %	1.29 8.60 0.00 0	60,81 %	1.53 5.32 0.00 0	80,41 %	1.81 6.38 4.00 0	100%	2.17 1.66 0.80 0	100%	9.029 .340. 800	DISPO RAPA R
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten	1.374,043	104. 548. 500	2.003.0 00	72.0 00.0 00	2.403.2 00	86.4 00.0 00	2.903.6 00	103. 680. 000	3.504.0 00	124. 416. 000	4.304.6 00	5.105.2 00	149. 299. 200	640.3 43.70 0	DISPO RAPA R
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk dan Ekraf terdaftar HAKI	0%	0	0%	180. 430. 000	25%	250. 000. 000	50%	250. 000. 000	75%	500. 000. 000	100%	450. 000. 000	100%	1.630 .430. 000	DISPO RAPA R
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM PARIWISATA dan Ekonomi Kreatif yang berkompetensi dasar	0%	195. 016. 500	8,86%	95.0 00.0 00	36,71 %	295. 000. 000	54,43 %	195. 000. 000	82,28 %	295. 000. 000	100%	195. 000. 000	100%	1.270 .016. 500	DISPO RAPA R
	Sasaran 4.1.5 : Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	13,38%		20%		25%		30%		35%		40%		40%		DISN AKER TRAN S

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan perencanaan ketenagakerjaan	n/a	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.500.000.000	DISNA KERT RANS
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	100%	100%	544.300.000	100%	3.078.228.191	100%	3.175.800.000	100%	3.175.800.000	100%	4.375.800.000	100%	4.375.800.000	100%	18.725.728.191	DISNA KERT RANS
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase layanan penempatan tenaga kerja lokal	13,38%	15%	373.963.600	20%	938.370.000	25%	1.210.000.000	30%	1.210.000.000	35%	1.510.000.000	40%	1.510.000.000	40%	6.752.333.600	DISNA KERT RANS
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentasi Perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial	71,56%	72,56%	447.200.000	74,56%	1.024.400.000	75,56%	1.241.600.000	76,56%	1.416.600.000	78,56%	1.862.300.000	79,56%	2.324.800.000	80	8.316.900.000	DISNA KERT RANS
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	n/a	10KK	254.674.000	15KK	320.000.000	18KK	345.000.000	25KK	345.000.000	30KK	345.000.000	35KK	345.000.000	133KK	1.954.674.000	DISNA KERT RANS
	Sasaran 4.1.6 : Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM	15.03	15,03		15,95		16,87		17,79		18,71		19,63		19,63		DPM D
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA	Tingkat tertib penyelenggaraan penataan desa	90%	100%	260.200.000	100%	13.120.000.000	100%	13.120.000.000	100%	13.120.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	53.260.000.000	DPMD
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kerjasama antar Desa yang terfasilitasi	50%	100%	200.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	1.270.000.000	DPMD

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH			
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.	
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa	90,00%	100,00 %	427.284.067.600	410.396.022.600	436.995.008.752	435.264.285.367	438.598.947.514	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %	2.590.538.634.738	DPMD	
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT AN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibangun	90%	100%	1.199.811.000	1.599.811.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.000.000.000	13.299.622.000	DPMD
	Tujuan 4.2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Persentase Tingkat Kemiskinan	4,94	4,5		4,22	4,18	4,1	4,08	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04			
	Sasaran 4.2.1 : Meningkatkan Ketahanan Pangan	Indeks Gini Rasio	0.303	0.286		0.281	0.276	0.271	0.266	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261			
		Indeks Ketahanan Pangan	77,07%	77,10 %		77,15 %	77,20 %	77,30 %	77,40 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %			DKPP
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	35,00	40,00	500.000.000	1.745.000.000	1.745.000.000	1.745.000.000	1.800.000.000	95,00	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00	100	2.121.000.000	9.656.000.000	DKPP
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	95	95,25	100.070.104	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	95,5	95,45	95,45	95,55	95,55	95,55	100	3.609.465.000	8.209.535.104	DKPP
		Capaian skor Pola Pangan Harapan	88,9	77,5	609.999.900	864.000.000	864.000.000	864.000.000	1.500.000.000	79,5	79	79	80	80	80	80	2.000.000.000	6.701.999.900	DKPP

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
		(PPH) Konsumsi																
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan jumlah desa rentan rawan pangan	5,52%	3,68	20,00	415,750	3,07	436,538	2,45	458,365	1,84	481,290	1,23	505,347	0,61	2,317,290	0,61	DKPP
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman pangan	85	90%	70,00	326,650	92%	342,983	94%	360,132	95%	378,140	95%	397,046	95%	1,874,951	95%	DKPP
	Sasaran 4.2.2 : Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk	Prosentase PMKS yang mendapatkan program layanan sosial	17,38	3			3		3				3			3		DINS OS
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Fasilitasi Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	80%	80%	3,35	1,36	80%	3,64	80%	4,02	1,42	6,82	80%	6,82	80%	10,67	3,386	DINS OS
1 06 03	PROGRAM WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	6,22	10,00	100%	10,00	100%	10,00	10,00	100%	10,00	10,00	100%	56,22	8,000	DINS OS
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan rehabilitasi sosial	35,46%	16%	689,984	1,73	7,23%	834,485	7,23%	1,67	1,34	7,23%	3,34	3,34	36,15%	9,117,253	36,15%	DINS OS

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan jaminan Sosial	5,57%	1,62 3,13 5,62 0	1,84 2,34 3,02 8	0,08%	1,74 2,34 3,02 8	0,08%	1,68 3,99 7,00 0	1,58 9,19 7,00 0	0,08%	1,58 9,19 7,00 0	0,08%	1,58 9,19 7,00 0	0,40%	10,07 0,212 .676	DINSO S	
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	441. 141. 280	1,32 5,76 8,00 0	100%	1,20 9,86 4,00 0	100%	1,08 8,83 8,00 0	1,08 8,83 8,00 0	100%	1,11 8,83 8,00 0	100%	1,11 8,83 8,00 0	100%	6,273 .287. 280	DINSO S	
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	100%	46,3 85,8 80	217. 998. 972	100%	220. 600. 000	100%	220. 600. 000	220. 600. 000	100%	220. 600. 000	100%	220. 600. 000	100%	1,146 .784. 852	DINSO S	
		Indeks Pembangunan an Gender (IPG)	92,14			92,06		92,10		92,14		92,18		92,22		92,22		DKBP 3A
2 08 02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN	persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100	166. 499. 850	850. 000. 000	100	947. 800. 000	100	980. 080. 000	1,13 0,58 8,00 0	100	1,09 5,14 6,80 0	100	1,09 5,14 6,80 0	100	5,360 .114. 650	DKBP 3A	
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	cakupan home industry perempuan aktif di lokasi P2WKSS	44,59%	48,4 39,7 00	248. 000. 000	46	278. 300. 000	46,5	306. 130. 000	336. 743. 000	47,5	370. 417. 300	48	370. 417. 300	48	1,588 .030. 000	DKBP 3A	
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	OPD yang memiliki Data Pilah Gender dan anak	100	0	27,5 00,0 00	100	30,2 50,0 00	100	33,2 75,0 00	36,6 02,5 00	100	40,2 62,7 50	100	40,2 62,7 50	100	192,8 90,25 0	DKBP 3A	

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta trafficking	56,17%	50%		55%		60%		65%		70%		75%		75%		DKBP 3A
		cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap perempuan yang tertangani sampai selesai																
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		31.07	30	79.533.700	30	212.500.000	30	353.750.000	30	409.125.000	30	449.037.500	30	503.941.250	30	2.007.887.450	DKBP 3A
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		0	0	48.093.000	10	300.000.000	20	350.000.000	30	400.000.000	40	400.000.000	50	500.000.000	50	1.998.093.000	DKBP 3A
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		26.55	20	568.505.000	25	808.563.500	30	908.563.500	35	908.563.500	40	908.563.500	45	1.149.828.179	45	5.252.587.179	DKBP 3A
		Total Fertility Rate	2,1	2,29		2,26		2,24		2,21		2,19		2,1		2,1		DKBP 3A
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Angka prevalensi kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/m CPR)	76,16	69,16	883.596.372,5	69,66	893.596.372,5	70,16	893.596.372,5	70,66	893.596.372,5	71,16	923.596.372,5	71,66	953.596.372,5	71,66	54.415.782.350	DKBP 3A

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	presentase kecamatan yang menyediakan data mikro keluarga	100	1.01 1.50 6.00 0	531. 506. 000	100	430. 706. 000	100	372. 626. 000	100	308. 738. 000	100	238. 461. 200	100	2.703. 543. 200	DKBP 3A		
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase anggota Poktan tribina UPPKA dan PPKS aktif ber KB	80	1.53 2.05 6.00 0	1.60 4.55 9.40 0	80	1.65 0.01 5.34 0	80	1.70 0.01 5.34 0	80	1.80 2.21 8.56 1	80	1.85 2.44 0.41 8	80	10.14 1.305 .059	DKBP 3A		
	Misi 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas. Kompeten Dan Profesional																	
	Tujuan 5.1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks reformasi Birokrasi	CC	B	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB			
	Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
5	02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.	100%	994 728 341 7	115 00.0 00.0 00.0	100%	115 00.0 00.0 00.0	100%	115 00.0 00.0 00.0	100%	115 00.0 00.0 00.0	100%	115 00.0 00.0 00.0	100%	128 00.0 00.0 00.0	100%	68.74 7.283 .417	BPKA D
5	02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.	8	105 790 800 0	180 0.00 0.00 0	8	200 0.00 0.00 0	8	200 0.00 0.00 0	8	200 0.00 0.00 0	8	200 0.00 0.00 0	8	2.00 0.00 0.00 0	40	10.85 7.908 .000	BPKA D
			3,80			4,10		4,20		4,30		4,40		4,50				SETD A
			BB			BB		BB		BB		BB		BB				
4	02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100	473 57.6 95.4 00	473 57.6 95.4 00	100	473 57.6 95.4 00	100	473 57.6 95.4 00	100	473 57.6 95.4 00	100	473 57.6 95.4 00	100	473 57.6 95.4 00	100	284.1 46.17 2.400	SET DPRD
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100			100		100		100		100		100				SELU RUH OPD
				676. 579. 057. 387	676. 779. 057. 387	100	676. 779. 057. 387	100	676. 779. 057. 387	100	676. 779. 057. 387	100	676. 779. 057. 387	100	677. 249. 057. 387	100	4.061 .574. 344.3 22	DISDI KBUD
				101. 804. 969. 296	104. 171. 170. 778	100	104. 171. 170. 778	100	104. 171. 170. 778	100	105. 171. 170. 778	100	105. 171. 170. 778	100	105. 571. 170. 778	100	625.0 60.82 3.186	DINK ES
				62.1 81.4 00.6 31	71.3 41.1 90.1 31	100	71.3 41.1 90.1 31	100	71.3 41.1 90.1 31	100	71.6 41.1 90.1 31	100	71.6 41.1 90.1 31	100	72.1 41.1 90.1 31	100	419.9 87.35 1.286	RS.DR DJATP RAWI RANE GRA

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			31.9	34.1	35.3	35.5	35.7	35.9	35.9	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	208.6	DPUP R
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	06.18	
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan			11.9	14.1	14.3	14.5	14.7	14.9	14.9	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	84.57	DPKP TB
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	5.857	
	Dinas Polisi Pamong Praja			11.8	13.0	13.2	13.2	13.6	13.8	13.8	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	78.73	SATP OL PP
				100	100	100	100	100	100	100	07.4	07.4	07.4	07.4	07.4	07.4	3.844	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			9.82	10.6	10.8	10.8	11.2	11.2	11.2	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	64.56	BPBD
				100	100	100	100	100	100	100	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	8.722	
	Dinas Sosial			7.77	8.27	8.27	8.37	8.57	8.77	8.77	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	50.04	DINAS SOSIAL
				100	100	100	100	100	100	100	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	0.094	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			8.26	9.80	9.22	9.05	9.73	9.71	9.71	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	55.80	DISNA KERT RANS
				100	100	100	100	100	100	100	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	2.168	
	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan			9.44	9.84	9.84	10.0	10.2	10.4	10.4	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	59.87	DKPP
				100	100	100	100	100	100	100	9.36	9.36	9.36	9.36	9.36	9.36	3.536	
	Dinas Lingkungan Hidup			13.4	13.8	13.8	14.0	14.2	14.4	14.4	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	83.93	DLH
				100	100	100	100	100	100	100	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	6.458	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			19.4	19.6	19.8	20.0	20.2	20.4	20.4	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	119.8	DISDU KCAPIL
				100	100	100	100	100	100	100	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	72.17	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			7.77	8.17	8.57	8.67	8.67	8.67	8.67	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	50.52	DPMD
				100	100	100	100	100	100	100	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	5.742	
				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	.810	

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH			
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.	
	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		100	10,0	100	10,7	108	100	10,8	109	100	10,9	109	100	10,9	111,2	64,82	DKBP 3A
				42,0	28,2	75,0	22,8	22,8	80,8	80,8	88,2	25	25	25	25	16,6	7,709	
				28,2	25	18,2	25	18,2	98,2	98,2	18,2	25	25	25	25	20,9	0,050	
				25		25		25	25	25	25				19,0			
	Dinas Perhubungan		100	18,0	42,5	18,2	18,4	18,4	18,6	18,6	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	111,2	DISHU B
				50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	55,30	
				51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	2,706	
	Dinas Komunikasi, Informatika, persandian dan Statistik		100%	6,18	8,03	6,38	6,58	6,58	6,78	6,78	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03	40,12	DISKO MINF OSATI K
				1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	8,190	
				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0,194	
	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan		100	10,4	23,5	10,6	10,8	10,8	11,0	11,0	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	65,54	DISKO PERIN DAG
				24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	1,146	
				08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	0,448	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		100%	11,0	23,4	12,9	13,0	13,0	13,5	13,5	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	77,52	DPMP TSP
				71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	5,827	
				83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	0,698	
	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata		100	6,04	3,65	6,97	7,28	7,28	7,89	7,89	1,71	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	45,15	DISPO RAPA R
				4,99	4,99	8,49	4,99	4,99	4,99	4,99	8,49	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	9,052	
				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0,670		
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		100	5,37	2,14	5,57	5,77	5,77	5,97	5,97	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	35,23	DPKD
				9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	2,895	
				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0,842	
	Dinas Pertanian		100	19,6	41,6	19,8	20,0	20,0	20,2	20,2	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	120,8	DISPE RTAN
				15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	49,69	
				70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	3,420	
	Sekretariat Daerah		100	29,5	59,4	34,3	43,3	43,3	43,7	43,7	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	239,8	SETD A
				14,2	14,2	18,7	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	88,56	
				33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	4,003	
	Sekretariat DPRD		100	58,8	06,4	59,0	59,2	59,2	59,4	59,4	06,4	06,4	06,4	06,4	06,4	06,4	355,8	SET DPRD
				67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	38,80	
				75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	5,450	

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH			
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.	
	Badan perencanaan Pembangunan Daerah		994 0.33 1.47 7	12.1 40.3 31.4 77	100	100	100	100	12.3 83.1 38.1 07	12.6 30.8 00.8 69	100	100	100	100	12.8 83.4 16.8 86	13.1 41.0 85.2 24	73.11 9.104 .039	BAPP EDA
	Badan Pendapatan Daerah		39.5 16.0 82.7 24	39.7 16.0 82.7 24	100	100	100	100	39.9 16.0 82.7 24	40.1 16.0 82.7 24	100	100	100	100	40.3 16.0 82.7 24	40.5 16.0 82.7 24	240.0 96.49 6.344	BAPE NDA
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		11.8 74.4 20.5 89	12.0 74.4 20.5 89	100	100	100	100	12.2 74.4 20.5 89	12.4 74.4 20.5 89	100	100	100	100	12.6 74.4 20.5 89	12.8 74.4 20.5 89	74.24 6.523 .534	BPKA D
	Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia		19.4 05.2 83.0 67	19.6 05.2 83.0 67	100	100	100	100	19.8 05.2 83.0 67	20.0 05.2 83.0 67	100	100	100	100	20.2 05.2 83.0 67	20.4 05.2 83.0 67	119.4 31.69 8.402	BKPS DM
	Inspektorat daerah		18.5 83.3 65.3 95	20.9 33.6 20.6 62	100	100	100	100	21.1 33.6 20.6 62	21.3 33.6 20.6 62	100	100	100	100	21.5 33.6 20.6 62	21.7 33.6 20.6 62	125.2 51.46 8.703	INSPE KTOR AT
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		799. 339. 900	7.70 0.00 0.00 0	100	100	100	100	7.70 0.00 0.00 0	8.10 0.00 0.00 0	100	100	100	100	8.30 0.00 0.00 0	8.50 0.00 0.00 0	40.30 0.000 .000	KESB ANGP OL
	29 KECAMATAN		83.0 72.7 45.6 85	84.0 56.1 96.0 52	100	100	100	100	84.0 56.1 96.0 52	84.0 56.1 96.0 52	100	100	100	100	84.0 56.1 96.0 52	84.0 56.1 96.0 52	536.6 07.55 4.945	KECA MATA N
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.00 0.00 0.00 0	18.3 00.0 00.0 00	100	100	100	100	18.3 00.0 00.0 00	18.3 00.0 00.0 00	100	100	100	100	18.3 00.0 00.0 00	18.3 00.0 00.0 00	170.0 10.80 3.000	KECA MATA N
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan koordinasi pemberdayaan an desa/ kelurahan	3.08 1.72 2.70 0	3.08 1.72 2.70 0	100	100	100	100	3.08 1.72 2.70 0	3.08 1.72 2.70 0	100	100	100	100	3.08 1.72 2.70 0	3.08 1.72 2.70 0	18.49 0.336 .200	KECA MATA N

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	100	169 938 11.5 00	238 44.5 77.3 00	100	238 44.5 77.3 00	238 44.5 77.3 00	100	238 44.5 77.3 00	238 44.5 77.3 00	100	238 44.5 77.3 00	238 44.5 77.3 00	100	238 44.5 77.3 00	31.45 2.066 .000	KECA MATAN
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan	100	247 3.70 0.00 0	247 3.70 0.00 0	100	247 3.70 0.00 0	247 3.70 0.00 0	100	247 3.70 0.00 0	247 3.70 0.00 0	100	247 3.70 0.00 0	247 3.70 0.00 0	100	247 3.70 0.00 0	14.84 2.200 .000	KECA MATAN
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa dibina	100	645 0.76 5.80 0	645 0.76 5.80 0	100	645 0.76 5.80 0	645 0.76 5.80 0	100	645 0.76 5.80 0	645 0.76 5.80 0	100	645 0.76 5.80 0	645 0.76 5.80 0	100	645 0.76 5.80 0	38.70 4.594 .800	KECA MATAN
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	96,67%	375. 000. 000	97,52 % 000	375. 000. 000	98,35 % 000	375. 000. 000	99,18 % 000	375. 000. 000	98,36 % 000	375. 000. 000	99,18 % 000	375. 000. 000	99,18 % 000	99,18 % 000	2.250. 000. 000	DISPO RAPAR
		Persentase Wirausaha Muda	31,38%	568 73.0 00	32,71 % 00	90.0 35,37 % 00	175. 000. 000	36,70 % 000	38,03 % 000	200. 000. 000	38,03 % 000	39,36 % 000	39,36 % 000	225. 000. 000	39,36 % 000	39,36 % 000	817.2 23.000	DISPO RAPAR
		Jumlah Pemuda yang Dibina	137 Orang	1.18 4.31 3.00 0	1.27 4.03 5.00 0	2.605 Orang	3.480 Orang	6.800 Orang	5.230 Orang	6.000 Orang	4.355 Orang	5.230 Orang	6.000 Orang	1.63 0.00 0.00 0	5.230 Orang	5.230 Orang	8.536 .148. 000	DISPO RAPAR
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pembinaan peserta didik Pramuka	99,79%	375. 000. 000	99,83 % 000	375. 000. 000	99,92 % 000	375. 000. 000	99,98 % 000	375. 000. 000	99,96 % 000	375. 000. 000	100% 000	375. 000. 000	100% 000	100% 000	2.250. 000. 000	DISPO RAPAR
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet muda yang dibina	246 Atlet	599. 265. 500	704 Atlet 000	1.494 Atlet 000	1.974 Atlet 000	5.000 0.000 0	5.000 0.000 0	5.000 0.000 0	2.764 Atlet 000	5.000 0.000 0	3.244 Atlet 000	5.000 0.000 0	3.244 Atlet 000	7.499 .265. 500	DISPO RAPAR	

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
		Cakupan pembinaan olahraga	90,57%	90,57 %	3,26	3,15	3,40	3,45	3,47	3,50	3,50	3,47	3,45	3,45	3,47	3,50	20,24	DISPO RAPA R
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	1,64%	-	0	100	115	200	26,52 %	250	300	26,52 %	200	200	250	300	965,0	DISPO RAPA R
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang difasilitasi	100%	100%	2,26	4,62	4,51	72,6	100%	4,33	4,72	100%	12,4	42,2	0	4,72	125,1	KESB ANGP OL
8 01 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	199	650	650	700	100%	700	850	100%	700	700	700	850	3,749	KESB ANGP OL
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Jumlah OPD pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK	100	1	14,5	153	19,3	19,3	100	1	1	100	63,5	04,5	35	19,5	107,4	SETD A
		Tingkat fasilitasi dukungan penyelenggara	100	100	14,8	23,5	67,8	63,5	100	91,2	02,4	100	63,5	04,5	78,1	62,6	63,48	0,139

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
	KESEJAHTERAAN RAKYAT	aan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi tugas Sekretariat Daerah																
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat fasilitas dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tugas Sekretariat Daerah	100	42.3 39.4 54.4 46	100	41.9 49.5 94.2 78	100	29.0 64.5 60.0 00	100	29.2 11.5 22.1 21	100	29.2 53.4 20.9 11	100	29.4 21.1 52.3 95	600	2012 39.70 4.151		SETD A
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat terfasilitasi dukungan penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan yang menjadi tugas Sekretariat Daerah	100	4.48 2.05 4.99 6	100	4.14 7.87 0.56 2	100	4.85 2.85 0.85 4	100	4.86 0.06 0.59 8	100	4.86 7.03 1.50 0	100	4.89 4.93 7.78 9	600	28.10 4.806 .299		SETD A
	Sasaran 5.1.2 : Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Maturitas SPIP	3		3,11	3,5	3,6	3,7	3,8	4					4			INSPEKTORAT

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang didampingi dalam pelaksanaan program kegiatan	100	137 286 660 0	100 100 100 100	372 905 185 7	396 587 134 6	100 100 100 100	414 743 295 3	434 715 072 2	100 100 100 100	456 684 026 7	22.12 9.213 .743	INSPE KTOR AT				
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Tingkat pelaksanaan pengawasan perangkat daerah	100	186 630 400 0	100 100 100 100	529 650 486 7	561 844 230 7	100 100 100 100	586 526 101 1	615 025 526 7	100 100 100 100	635 025 526 7	31.14 7.022 .717	INSPE KTOR AT				
	Sasaran 5.1.3 : Meningkatnya Pendapatan asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	1,36%		4,07%	1,12%	3,28%	3,33%		3,39%	3,44%			BAPE NDA				
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah	92,13%	456 612 780 0	100% 100% 100% 100%	707 563 670 0	726 985 630 0	100% 100% 100% 100%	759 617 590 0	776 876 550 0	100% 100% 100% 100%	788 986 010 0	42.16 6.422 .300	BAPE NDA				
	Sasaran 5.1.4 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah	100		100	100	100	100		100	100			BAPP EDA				
5 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN DAN EVALUASI	Presentase terpenuhinya keseluruhan keselarasan dalam	100	272 048 536 7	100 100 100 100	259 717 800 0	275 000 000 0	100 100 100 100	300 000 000 0	320 000 000 0	100 100 100 100	314 094 900 0	17.50 8.612 .367	BAPP EDA				

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH			
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.	
	PEMBANGUNAN DAERAH	penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah yang disampaikan tepat waktu																	
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase tercapainya kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan Pelaksanaan Kegiatan pada perangkat daerah	100	386.046.2150	100	400.000.0000	100	400.000.0000	100	400.000.0000	100	400.000.0000	100	420.000.0000	100	24.060.462.150		BAPP EDA	
		Indek Inovasi Daerah	inovatif																BAPP EDA
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang telah didiseminasikan	100	821.347.000	100	903.481.700	100	993.829.870	100	1.093.212.857	100	1.202.534.143	100	1.322.787.557	100	6.337.193.127		BAPP EDA	
		Presentase dukungan inovasi daerah	100	425.946.000	100	530.000.000	100	600.000.000	100	850.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	4.155.946.000		BAPP EDA	

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
		Cakupan data statistic sektoral yang dipublikasi kan	50,00%		60,00 %		70,00 %		80,00 %		90,00 %		100,00 %		100,00 %		DISK OMIN FOSA TIK	
		Tingkat ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah	14%	718.000	17%	701.000	31%	966.000	45%	1.075.000	55%	1.135.000	70%	1.199.000	70%	5.788.000	DISKO MINF OSATI K	
2	02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL																
		Sasaran 5.1.5 : Meningkatkan kualitas SDM aparatur	94%		95%		93%		96%		97%		97%		97%	0	BKPS DM	
		Tercapainya kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian	94,90%	3.288.390	95,5%	3.161.140	96,00 %	3.743.980	96,50 %	3.554.400	97,00 %	3.850.950	97,50 %	3.865.320	97,50 %	21.464.199.500	BKPS DM	
5	03	02																
		Cakupan standar kompetensi pegawai	90%		94,50 %		95,00 %		95,50 %		96,00 %		96,00 %		96,00 %		BKPS DM	
		Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya sesuai standar	5%	1.470.000	10%	3.507.000	20%	4.382.310	20%	5.446.900	20%	5.677.840	20%	5.663.480	97%	26.148.305.000	BKPS DM	
5	04	02																
		Sasaran 5.1.6 : Meningkatkan keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	65,00%		70,00 %		75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %		90,00 %		DISK OMIN FOSA TIK	

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui Media Informasi	100%	3.57 5.21 8.01 5	100%	3.60 0.00 0.00 0	100%	3.60 0.00 0.00 0	100%	3.75 9.00 0.00 0	100%	3.86 9.00 0.00 0	100%	3.90 0.00 0.00 0	100	22.30 3.218 .015	DISKO MINF OSATI K	
		Indeks Kematangan Penerapan SPBE	2.97 (Baik)	2.97 (Baik)	2.97 (Baik)	2.97 (Baik)	2.97 (Baik)	2.97 (Baik)	2.97 (Baik)	2.99 (Baik)	2.99 (Baik)	3.00 (Baik)	3.01 (Baik)	3.01 (Baik)	3.01 (Baik)			DISKO OMIN FOSA TIK
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	40%	1.05 8.03 9.80 0	40%	1.20 0.00 0.00 0	70%	1.20 0.00 0.00 0	80%	1.20 0.00 0.00 0	90%	1.20 0.00 0.00 0	100	1.20 0.00 0.00 0	100%	7.058 .039. 800	DISKO MINF OSATI K	
		Persentase Penerapan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah	40%		40%		60%		70%		80%		90%		90%			DISKO MINF OSATI K
		Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	100		100	120	140	160	170	175	175	175	175	175	175			DISKO OMIN FOSA TIK
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	41%	505. 323. 000	41%	499. 000. 000	51%	523. 950. 000	58%	550. 147. 500	65%	577. 654. 875	68%	606. 537. 619	68%	3.262 .612. 994		DISKO MINF OSATI K

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
	Sasaran 5.1.7:																	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B		B		B		B		B		B		B			
		Persentase Masyarakat yang Melakukan Kunjungan Perpustakaan	58%		60.00 %		70.00 %		80.00 %		90.00 %		100%		100%			
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN															
		Persentase kegiatan Gemar Membaca tingkat daerah yang dilaksanakan	92,06%		100		100		100		100		100		100		438.000,00	
		Persentase pembinaan perpustakaan Desa	100%		54%		77%		88%		88%		100%		100%		175.000,00	
		Persentase pelayanan Perpustakaan Daerah	58%		67		100		100		100		100		100		1.692.124.000	
		Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital	35,71%		53,57 %		62,50 %		71,43 %		80,36 %		100%		100%			
		Tingkat tertib pengelolaan arsip perangkat daerah	69,64%		77%		80%		84%		91%		100%		100%		762.247,60	
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP															

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase arsip bersejarah yang berhasil ditelusuri	2,56%	7,69%	28.152.400	12,82%	10.000	17,95%	35.000	23,08%	20.000	28,21%	25.000	33,33%	25.000	33%	143.152.400	DPKD
		Cakupan kepemilikan dokumen administratif	79,12%	83,23		84,8		87,4		89,8		92,2		94,6		94,6		DISD UKCA PIL
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase meningkatnya Kualitas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	100	100	119.591.500	100	985.240.000	100	1.000	100	1.100	100	1.200	100	1.200	100	5.604.831.500	DISDU KCAPI L
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Presentase meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	100	100	1133.000	100	250.000	100	300.000	100	300.000	100	350.000	100	350.000	100	1.663.300.000	DISDU KCAPI L
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase kerjasama pemantapan data kependudukan	100	100	580.682.900	100	815.320.000	100	896.852.000	100	986.537.200	100	1.085.190.920	100	1.193.710.012	100	5.558.293.032	DISD UKCA PIL
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Terkelola dan tersajinya data kependudukan Buku Profil Perkembangan Kabupaten Serang	100	100	16.030.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	150.000	100	150.000	100	616.030.000	DISD UKCA PIL
		Indeks Risiko Bencana	203,20	203,10		203,05		203,00		202,80		202,50		200,00		200,00		BPBD
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANG AN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat pelayanan pencegahan penanggulangan n. penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	1.731.810.000	100%	2.400.000	100%	2.600.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.100.000	100%	15.831.810.000	BPBD

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan bencana serta penanganan pascabencana	100%	2.53 2.88 0.00 0	2.75 0.00 0.00 0	2.75 0.00 0.00 0	2.75 0.00 0.00 0	2.75 0.00 0.00 0	2.75 0.00 0.00 0	2.75 0.00 0.00 0	2.75 0.00 0.00 0	2.90 0.00 0.00 0	100%	100%	100%	16.43 2.880 .000	BPBD	
		Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda	7,4%															SATP OL PP
7 01 04	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Ketertaman dan ketertiban Umum yang ditangani	60%	3.01 9.27 4.45 0	5.53 3.91 6.00 0	5.89 7.25 7.60 0	6.28 6.98 3.36 0	6.28 6.98 3.36 0	6.28 6.98 3.36 0	6.28 6.98 3.36 0	6.28 6.98 3.36 0	6.58 6.98 3.36 0	60%	70%	75%	33.91 1.398 .130	SATP OL PP	
		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%															SATP OL PP
		Misi 6 : Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu. Bermasyarakat Dan Bernegara																

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
	Tujuan 6.1 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama ditengah-tengah masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	86,45	86,9	87,4	87,95	88,5	89	89,5	89,5		89,5						
	Sasaran 6.1.1 : Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama	Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KESB ANGP OL	
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan organisasi kemasyarakatan	100%	263.770.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	750.000.000	850.000.000	850.000.000	3.813.770.000	100%	100%	100%	KESB ANGP OL	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial terselesaikan	100%	529.599.900	941.751.834	970.664.914	1.200.000.000	1.200.000.000	1.230.000.000	1.230.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	6.174.853.545	100%	100%	100%	KESB ANGP OL	
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait nar.koba. kerukunan umat beragama dan kepercayaan	100%	687.090.000	1.140.000.000	1.140.000.000	1.140.000.000	1.140.000.000	1.240.000.000	1.240.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	6.648.215.126	100%	100%	100%	KESB ANGP OL	
	Jumlah			3.056.711.791.000	2.992.773.509.182	3.058.029.106.468	3.132.782.084	3.132.782.084	3.144.331.809.572	3.194.182.403	3.194.182.403	18.427.537.289.555						

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

“Bab memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.”

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dan diimplementasikan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Selanjutnya guna memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program, maka dalam proses penyusunan RPJMD telah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dan Indikasi Program Prioritas Yang Disertai Dengan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Serang disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah
1	KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH						
	Pendapatan Daerah	3,061,285,487,661	3,006,026,122,913	3,052,281,720,198	3,130,235,395,815	3,138,084,423,303	3,187,737,456,134
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	2,901,230,182,348	2,872,518,453,079	2,927,324,114,378	2,975,208,285,956	3,022,468,121,091	3,071,963,672,198
		160,055,305,313	133,507,669,834	124,957,605,820	155,027,109,859	115,616,302,212	115,773,783,936
2	BELANJA DAERAH						
2.01	Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	3,058,285,487,661	2,984,026,122,913	3,049,281,720,198	3,127,235,395,815	3,135,084,423,303	3,184,737,456,134
	• Gaji dan Tunjangan	1,646,309,723,824	1,587,722,802,363	1,596,309,723,825	1,665,040,881,067	1,664,811,714,985	1,659,272,872,186
	• Belanja Modal dan Pos Belanja Operasi Lainnya	633,458,796,151	646,127,972,074	659,050,531,516	662,231,542,146	685,676,172,989	699,389,696,449
		1,012,850,927,673	941,594,830,289	937,259,192,309	1,002,809,338,921	979,135,541,996	959,883,175,737
2.02	Belanja Program Bidang Urusan Terkait dengan Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah	957,523,276,176	968,354,225,550	998,908,451,277	1,007,149,698,750	1,014,226,996,000	1,068,397,957,384
2.03	Belanja Transfer	449,451,522,600	422,949,095,000	449,063,545,096	450,044,815,998	451,045,712,318	452,066,626,564
2.04	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
	Sisa Kapasitas Riil	3,000,000,000	22,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
3	Pengeluaran Pembiayaan						
	Penyertaan Modal Daerah	3,000,000,000	22,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu aktif	55 %	7,623, 783,50 0	55	7,420,8 30,000	60	8,627,9 21,500	65	8,113,7 83,500	70	9,108,1 71,500	75	8,980,2 09,001	75	49,874,6 99,001			
		Prosentase Kecamatan menerapka n Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	0 %	30,000 ,000	60	700,000 ,000	70	900,00 0,000	80	960,00 0,000	90	1,190,2 50,000	100	1,368,4 37,000	100	5,148,68 7,000			
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %	1,054, 350,00 0	100	1,213,3 70,000	100	1,344,0 09,000	100	1,489,5 71,000	100	1,585,6 18,800	100	1,834,5 10,000	100	8,521,42 8,800			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Tingkat Penerimaan Pendapatan Puskesmas	100	64,166 ,201,4 82	100	65,770, 356,519	100	67,374, 511,55 6	100	68,978, 666,59 3	100	70,582, 821,63 0	100	72,186, 976,66 7	10%	409,059, 534,447			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	80.07%	19,995 ,000	90%	150,000 ,000	90%	150,00 0,000	90%	150,00 0,000	90%	150,00 0,000	90%	150,00 0,000	90%	769,995, 000			
		Tingkat sarana prasarana RS dalam kondisi baik	66%	655,64 9,952	72%	2,889,0 00,000	76%	3,000,0 00,000	83%	3,200,0 00,000	86%	3,300,0 00,000	90%	3,300,0 00,000	90%	16,344,6 49,952			

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase SDM yang mengikuti Diklat sesuai standar kompetensi	20%	25%	-	150,000 ,000	25%	250,00 0,000	25%	250,00 0,000	25%	250,00 0,000	25%	250,00 0,000	25%	250,00 0,000	100%	1,150,00 0,000
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Penerimaan Pendapatan RS	100%	100%	172,01 0,571, 597	176,372 ,551,13 7	100%	180,78 1,864,9 15	100%	185,30 1,411,5 38	100%	189,93 3,946,8 27	100%	194,68 2,295,4 97	100%	1,099,08 2,641,51 1	100%	1,099,08 2,641,51 1
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jumlah tenaga terampil konstruksi yang telah bersertifikat (SKT) di Kabupaten Serang	16.7	16.7	1,552, 965,04 0	2,116,4 05,040	25	2,116,4 05,040	33.33	2,116,4 05,040	41.7	2,116,4 05,040	50	2,116,4 05,040	58.3	2,116,4 05,040	58.3	12,134,9 90,240
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan infrastrukturu drainase desa kewenangan kabupaten			6,908, 832,25 0	6,931,0 82,250	29.12	6,931,0 82,250	36.11	6,931,0 82,250	51.53	6,931,0 82,250	56.13	6,931,0 82,250	65.64	8,000,0 00,000	9.43	42,633,1 61,250
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Cakupan infrastrukturu jalan kabupaten	100	100	336,48 6,752, 315	156,274 ,492,65 0	100	163,48 7,299,6 97	100	158,33 9,822,4 93	100	165,94 0,641,5 57	100	168,47 1,612,6 48	100	1,149,00 0,621,36 0	100	1,149,00 0,621,36 0
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGAR	Tingkat ketaatan tata ruang	83	85	3,662, 779,77 0	7,666,6 20,469	87.5	7,666,6 20,469	90	8,166,6 20,469	92.5	13,716, 620,46 9	93	7,266,6 20,469	94	48,145,8 82,115	94	48,145,8 82,115

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	
	AAN PENATAAN RUANG	dengan rencana tata ruang wilayah																
		Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	5	13,84 0,788, 500	10	20,624, 867,35 0	20	20,897 ,354,0 85	25	23,472 ,089,4 94	40	25,314 ,298,4 43	100	27,340, 728,28 7	100			
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Infrastruktur Air Baku dalam Kondisi Baik	39	27,317 ,680,0 48	10.2	27,317, 680,048	18.75	27,317, 680,04 8	30.11	27,392, 938,33 5	41.47	29,235, 147,28 4	55	31,261, 577,12 8	55			169,842, 702,891
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMUKAN																	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			17,124 ,999,9 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga mendapatka n akses air melalui SPAM	88.58	19,140 ,782,6 61	89.53	22,000, 000,000	89.95	22,000, 000,00 0	90.35	22,000, 000,00 0	90.73	22,000, 000,00 0	91.08	30,840, 000,00 0	91.08			137,980, 782,661
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga mendapatka n akses pengelolaan air limbah domestik	65.92	8,958, 787,23 0	68.62	6,516,2 98,152	69.9	10,097, 557,78 2	71.07	10,097, 557,78 2	72.18	15,190, 243,20 7	73.27	17,240, 931,84 8	73.27			68,101,3 76,001

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Prasarana Permukiman pada kawasan strategis yang tertangani		20	2,000,000,000	30	2,000,000,000	40	2,000,000,000	50	2,000,000,000	60	2,000,000,000	60	10,000,000,000		
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB	15	19	47,000,000,000	21	50,000,000,000	23	50,000,000,000	25	50,000,000,000	27	50,000,000,000	27	279,932,617,625		
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang teratur	15	19	25,790,000,000	21	25,790,000,000	23	20,790,000,000	25	30,950,868,750	27	34,164,412,188	27	149,520,668,413		
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh	10	10	408,392,200	15	300,000,000	20	300,000,000	25	300,000,000	30	300,000,000	30	1,800,000,000		
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan perbaikan rumah di kawasan kumuh	6.5	18.18	15,830,460,799	22.22	19,500,000,000	28.57	11,000,000,000	40	11,000,000,000	66.67	7,500,000,000	66.67	82,330,460,799		
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota	100	100	10,200,000,000	100	10,200,000,000	100	9,200,000,000	100	10,200,000,000	100	12,613,670,000	0	59,607,715,900		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
		Persentase Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin		100	1.000,000,000	100	1.000,000,000	100	1.000,000,000	100	1.000,000,000	100	1.000,000,000	100	1.000,000,000	100	1.000,000,000	5,000,000,000	
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	10	10	4,100,000,000	15	4,100,000,000	20	4,100,000,000	25	6,100,000,000	30	8,829,303,750	30	8,829,303,750	30	28,270,547,449		
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI KUALIFIKASI KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah dan PSU Tingkat Kemampuan Kecil yang memiliki sertifikasi dan registrasi	10%	10%	300,000,000	15	450,000,000	20	600,000,000	25	750,000,000	30	900,000,000	30%	900,000,000	30%	3,000,000,000		
	PERHUBUNGAN																		
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	13%	13%	30,272,932,511	13%	33,115,001,066	14%	32,115,001,066	14%	38,326,924,672	14%	38,326,924,672	14%	38,326,924,672	14%	205,271,785,053		
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Angkutan Laut	0	0%	1,181,018,750	25%	2,156,525,000	25%	3,000,000,000	25%	3,100,000,000	25%	3,200,000,000	0.25	3,200,000,000	0.25	14,794,068,750		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	
2 15 04	PROGRAM PENGLOLAAN PENERBANGAN	Persentase Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang memiliki izin	0	0	20%	100,000 ,000	20%	100,00 0,000	20%	110,00 0,000	20%	110,00 0,000	20%	110,00 0,000	20%	100,00 0,000	0.2	520,000, 000
2 15 05	PROGRAM PENGLOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Prasarana Perkeretaap ian Umum yang memiliki izin	0%	0	50%	600,000 ,000	50%	600,00 0,000	50%	600,00 0,000	50%	600,00 0,000	50%	600,00 0,000	50%	600,00 0,000	50%	3,000,00 0,000
7 01 04	PROGRAM PENINGKATAN KETERAMAMAN DAN KETERIBAN UMUM	Prosentase Gangguan Ketertama n dan ketertiban Umum yang ditangani Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perkada	60%	3,019, 274,45 0	65%	5,533,9 16,000	70%	5,897,2 57,600	75%	6,286,9 83,360	75%	6,586,9 83,360	75%	6,586,9 83,360	75%	6,586,9 83,360	75%	33,911,3 98,130
			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp.	
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.			
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat pelayanan pencegahan penanggula ngan, penyelamata n kebakaran dan non kebakaran	100%	1,731, 810,000	100%	2,400,0 00,000	100%	2,600,0 00,000	100%	3,000,0 00,000	100%	3,000,0 00,000	100%	3,100,0 00,000	100%	3,100,0 00,000	100%	15,831,8 10,000
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggula ngan bencana serta penanganan pasca bencana	100%	2,532, 880,000	100%	2,750,0 00,000	100%	2,750,0 00,000	100%	2,750,0 00,000	100%	2,750,0 00,000	100%	2,900,0 00,000	100%	2,900,0 00,000	100%	16,432,8 80,000
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang difasilitasi	100%	2,263, 572,500	100%	4,620,0 00,000	100%	4,515,0 00,000	100%	72,612, 442,218	100%	4,330,0 00,000	100%	4,720,0 00,000	100%	4,720,0 00,000	100%	125,158, 572,500
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan organisasi kemasyarak atan	100%	263,77 0,000	100%	650,000 ,000	100%	650,00 0,000	100%	650,00 0,000	100%	750,00 0,000	100%	850,00 0,000	100%	850,00 0,000	100%	3,813,77 0,000

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	199,52 0,000	650,000 ,000	100%	650,00 0,000	100%	700,00 0,000	100%	700,00 0,000	100%	850,00 0,000	100%	3,749,52 0,000		
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial terselesaikan	100%	529,59 9,900	941,751 ,834	100%	970,66 4,914	100%	1,200,0 00,000	100%	1,232,8 36,897	100%	1,300,0 00,000	100%	6,174,85 3,545		
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan umat beragama dan kepercayaan	100%	687,09 0,000	1,140,0 00,000	100%	1,140,0 00,000	100%	1,140,0 00,000	100%	1,240,0 00,000	100%	1,301,1 25,126	100%	6,648,21 5,126		
	SOSIAL																
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Fasilitasi Pembinaan Tenaga Kesejahtera an Sosial	80%	3,356, 582,63 0	1,369,6 94,900	80%	1,383,6 48,122	80%	1,424,0 20,150	80%	1,626,8 20,160	80%	1,626,8 20,160	80%	10,673,3 86,122		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	
1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	6,228, 000	100%	10,000, 000	100%	10,000, 000	100%	10,000, 000	100%	10,000, 000	100%	10,000, 000	100%	10,000, 000	100%	56,228,0 00
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan rehabilitasi sosial	35,46%	689,98 4,500	7.23 %	1,730,8 90,000	7.23% %	1,458,3 44,850	7.23% %	1,671,3 44,850	7.23% %	1,733,3 44,840	7.23 %	1,833,3 44,840	36.15 %	9,117,25 3,880		
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatka n Jaminan Sosial	5,57%	1,623, 135,62 0	0,08 %	1,842,3 43,028	0,08% %	1,742,3 43,028	0,08% %	1,683,9 97,000	0,08% %	1,589,1 97,000	0,08 %	1,589,1 97,000	0.40% %	10,070,2 12,676		
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	441,14 1,280	100%	1,325,7 68,000	100%	1,209,8 64,000	100%	1,088,8 38,000	100%	1,088,8 38,000	100%	1,118,8 38,000	100%	6,273,28 7,280		
1 06 07	PROGRAM PENGLOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	100%	46,385 ,880	100%	217,998 ,972	100%	220,60 0,000	100%	220,60 0,000	100%	220,60 0,000	100%	220,60 0,000	100%	1,146,78 4,852		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	KETENAGAKERJA AN																		
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan perencanaan ketenagakerj aan	n/a	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	1,500,000,000
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatka n Pelatihan Berbasis Kompetensi	100%	100%	544,300,000	100%	3,078,281,911	100%	3,175,800,000	100%	3,175,800,000	100%	4,375,800,000	100%	4,375,800,000	100%	4,375,800,000	100%	18,725,728,191
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase layanan penempata n tenaga kerja lokal	13.38%	15%	373,963,600	20%	938,370,000	25%	1,210,000,000	30%	1,210,000,000	35%	1,510,000,000	40%	1,510,000,000	40%	1,510,000,000	40%	6,752,333,600
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentasi Perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial	71.56%	72.56	447,200,000	74.56	1,024,400,000	75.56	1,241,600,000	76.56	1,416,600,000	78.56	1,862,300,000	79.56	2,324,800,000	80	2,324,800,000	80	8,316,900,000
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah calon transmigran yang diangkat an	n/a	10KK	254,674,000	15KK	320,000,000	18KK	345,000,000	25KK	345,000,000	30KK	345,000,000	35KK	345,000,000	133KK	345,000,000	133KK	1,954,674,000

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
2 08 02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	100	166,49 9,850	100	850,000 ,000	100	947,80 0,000	100	980,08 0,000	100	1,130,5 88,000	100	1,095,1 46,800	100	5,360,11 4,650	
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	cakupan home industry perempuan aktif di lokasi P2WKSS	44.59%	48,439 ,700	46	248,000 ,000	46.5	278,30 0,000	47	306,13 0,000	47.5	336,74 3,000	48	370,41 7,300	48	1,588,03 0,000	
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	OPD yang memiliki Data Pihak Gender dan anak	100	0	100	27,500 000	100	30,250 000	100	33,275, 000	100	36,602, 500	100	40,262, 750	100	192,890, 250	
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap perempuan yang tertangani sampai selesai	31.07	79,533 ,700	30	212,500 ,000	30	353,75 0,000	30	409,12 5,000	30	449,03 7,500	30	503,94 1,250	30	2,007,88 7,450	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase kecamatan dan desa layak anak yang aktif	0	48,093 ,000	10	300,000 ,000	20	350,00 0,000	30	400,00 0,000	40	400,00 0,000	50	500,00 0,000	50	1,998,09 3,000	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG	Rp.		
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.		
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap anak yang tertangani sampai dengan selesai	26.55	20	568,50 5,000	25	808,563 ,500	30	908,56 3,500	35	908,56 3,500	40	908,56 3,500	45	908,56 3,500	45	1,149,8 28,179	45	5,252,58 7,179
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Angka prevalensi kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/m CPR)	76.16	69.16	8,835, 963,72 5	69.66	8,935,9 63,725	70.16	8,935,9 63,725	70.66	8,935,9 63,725	71.16	8,935,9 63,725	71.66	9,235,9 63,725	71.66	9,535,9 63,725	71.66	54,415,7 82,350
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	prosentase kecamatan yang menyediakan data mikro keluarga	100	100	1,011, 506,00 0	100	531,506 ,000	100	430,70 6,000	100	372,62 6,000	100	308,73 8,000	100	238,46 1,200	100	2,703,54 3,200	100	2,703,54 3,200
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prosentase anggota Poktan tribina . UPPKA dan PPKS aktif ber KB	80	80	1,532, 056,00 0	80	1,604,5 59,400	80	1,650,0 15,340	80	1,700,0 15,340	80	1,802,2 18,561	80	1,852,4 40,418	80	10,141,3 05,059	80	10,141,3 05,059

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	35.00	40.00	500,000,000	80.00	1,745,000,000	85.00	1,745,000,000	90.00	1,745,000,000	95.00	1,800,000,000	100.00	2,121,000,000	100	9,656,000,000
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	95	95.25	100,070,104	95.35	1,000,000,000	95.4	1,000,000,000	95.45	1,000,000,000	95.5	1,500,000,000	95.55	3,609,465,000	100	8,209,535,104
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Persentase penurunan jumlah desa rentan rawan pangan	5.52%	3.68	20,000,000	3.07	415,750,000	2.45	436,538,000	1.84	458,365,000	1.23	481,290,000	0.61	505,347,000	0.61	2,317,290,000
2 09 05	PROGRAM PENGAJARAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman pangan	85	90%	70,000,000	92%	326,650,000	94%	342,983,000	95%	360,132,000	95%	378,140,000	95%	397,046,000	95%	1,874,951,000

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	
	PERTANAHAN																	
2 10 02	PROGRAM PENGLOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	1,000,000,000
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian kerugian tanah	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	2,500,000,000
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan	100	1,596,620,469	100	1,596,620,469	100	1,596,620,469	100	1,596,620,469	100	1,596,620,469	100	2,096,620,469	100	2,096,620,469	100	9,783,102,345
	LINGKUNGAN HIDUP																	
2 11 02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan dokumen lingkungan hidup yang dibuat dan diproses	3 Dok	600,000,000	3 dok	600,000,000	3 dok	600,000,000	3 dok	600,000,000	3 dok	600,000,000	3 dok	600,000,000	3 dok	1,000,000,000	3 dok	3,862,920,000
2 11 03	Program Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan in IKA IKU, dan ITV/L	250 Sampel	1,750,807,200	300 Sampel	1,750,807,200	300 Sampel	1,750,807,200	300 Sampel	1,750,807,200	300 Sampel	1,750,807,200	300 Sampel	1,750,807,200	300 Sampel	2,000,000,000	300 Sampel	9,972,409,900
2 11 05	Program Pengendalian bahan Berbahaya (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase penataan pengelolaan B3 dan limbah B3 pada kegiatan/ usaha	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	500,000,000	100%	2,339,878,000

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp.	
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	
2 11 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Prosentase pemaataan pengelolaan lingkungan kegiatan/usaha	100%	252,39 6,100	100%	750,000	100%	750,000	100%	750,000	100%	750,000	100%	750,000	100%	750,000	100%	4,002,39 6,100
2 11 08	Program Peningkatan Pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Tingkat peran serta lembaga kemasyarakatan / pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100 Lembaga Kemasyarakatan/pendidikan	189,13 6,000	100 Lembaga Kemasyarakatan/pendidikan	300,000	100 Lembaga Kemasyarakatan/pendidikan	350,000	100 Lembaga Kemasyarakatan/pendidikan	375,000	100 Lembaga Kemasyarakatan/pendidikan	400,000	100 Lembaga Kemasyarakatan/pendidikan	500,000	100 Lembaga Kemasyarakatan/pendidikan	500,000	100 Lembaga Kemasyarakatan/pendidikan	2,114,13 6,000
2 11 09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	tingkat kepedulian masyarakat atau kelompok/lembaga masyarakat/lembaga pendidikan/dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	4 Kelompok	39,545 ,000	5 Kelompok	500,000	6 Kelompok	500,000	7 Kelompok	500,000	8 Kelompok	500,000	9 Kelompok	500,000	500,000	500,000	2,537,62 5,000	
2 11 10	Program Peningkatan penguasaan Lingkungan Hidup	Prosentase penguasaan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang tertangani	100%	189,00 9,800	100%	500,000	100%	500,000	100%	500,000	100%	500,000	100%	500,000	100%	500,000	100%	2,659,00 9,800

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
2 11 04	Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (KEHATI)	Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan ITV/L	2 Ha	255,03 4,700	2 Ha	600,000 ,000	2 Ha	600,00 0,000	2 Ha	600,00 0,000	2 Ha	750,00 0,000	2 Ha	1,000,0 00,000	10 ha	3,805,03 4,700	
2 11 11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah terangkut Persentase sampah terkurangi	11.53%	10,349 ,978,1 50	14.39 %	15,820, 000,000	16.78 %	10,820, 000,000	19.18 %	10,820, 000,000	21.58 %	20,820, 000,000	23.98 %	20,820, 000,000	23.98 %	94,249,9 78,150	
			3%	3.02%	3.04 %		3.05%	3.07%	3.07%	3.07%	3.08%	3.10%	3.10%				
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL																
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase meningkatn ya Kualitas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudu kan	100	119,59 1,500	100	985,240 ,000	100	1,100,0 00,000	100	1,100,0 00,000	100	1,200,0 00,000	100	1,200,0 00,000	100	5,604,83 1,500	
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Prosentase meningkatn ya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	100	11330 0000	100	250,000 ,000	100	300,00 0,000	100	300,00 0,000	100	350,00 0,000	100	350,00 0,000	100	1,663,30 0,000	
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase Kerjasama Pemanfaata n Data Kependudu kan	100	580,68 2,900	100	815,320 ,000	100	986,53 7,200	100	896,85 2,000	100	1,085,1 90,920	100	1,193,7 10,012	100	5,558,29 3,032	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.		
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Terkelola dan tersaji nya data kependudu kan Buku Profil Perkembangan Kab. Serang	100	16,030 ,000	100	100,000 ,000	100	100,00 ,000	100	100,00 ,000	100	100,00 ,000	100	150,00 ,000	100	150,00 ,000	100	150,00 ,000	616,030, 000
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA	Tingkat tertib penyeleng saraan penataan desa	90%	26,020 ,000,000	100%	13,120, 000,000	100%	13,120, 000,000	100%	100%	100%	100%	100%	350,00 ,000	100%	350,00 ,000	100%	350,00 ,000	53,260,0 00,000
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kerjasama antar Desa yang terfasilitasi	50%	20,000 ,000	100%	150,000 ,000	100%	200,00 ,000	100%	100%	100%	100%	100%	300,00 ,000	100%	300,00 ,000	100%	350,00 ,000	1,270,00 0,000
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Tingkat tertib administrasi pemerintah an desa	90.00%	427,28 4,067, 600	100.00 %	410,396 ,022,60 0	100%	436,99 5,008,7 52	100%	100%	100%	100%	100%	438,59 8,947,5 14	100%	442,00 0,302,9 05	100.00 %	442,00 0,302,9 05	2,590,53 8,634,73 8
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT AN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarak atan yang dibina	90%	1,199, 811,00 0	100%	1,599,8 11,000	100%	2,500,0 00,000	100%	100%	100%	100%	100%	2,500,0 00,000	100%	3,000,0 00,000	100%	3,000,0 00,000	13,299,6 22,000

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
		Indeks Keterbuka an Informasi Publik (PPID)	65%		70%		75%		80%		85%		90%		90%		
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui Media Informasi	100%	3,575, 218,01 5	100%	3,600,0 00,000	100%	3,600,0 00,000	100%	3,759,0 00,000	100%	3,869,0 00,000	100%	3,900,0 00,000	100	22,303,2 18,015	
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	40%	1,058, 039,80 0	50%	1,200,0 00,000	70%	1,200,0 00,000	80%	1,200,0 00,000	90%	1,200,0 00,000	100	1,200,0 00,000	100%	7,058,03 9,800	
		Persentase Penerapan e- Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah	40%		50%		60%		70%		80%		90%		90%		
	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH																
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang dilayani	100%	40,000 ,000	100%	145,000 ,000	100%	145,000 ,000	100%	145,000 ,000	100%	145,000 ,000	100%	145,000 ,000	100%	765,000, 000	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG	Rp.	
				ET	Rp.	ET	Rp.	ET	Rp.	ET	Rp.	ET	Rp.	ET	Rp.	ET	Rp.	
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	Tingkat pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	0	0	6.11	47,930, 000	6.11	47,930, 000	6.11	47,930, 000	6.11	47,930, 000	6.11	47,930, 000	6.11	47,930, 000	30.55	239,650, 000
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang sehat	16.67%	22.15 %	25.68 %	205,150 ,000	28.90 %	227,74 5,000	31.86 %	227,74 5,000	34.57 %	242,11 0,000	37.08 %	247,11 0,000	37.08 %	247,11 0,000	37.08 %	1,194,86 0,000
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi terlatih	100	100	100	610,414 ,800	100	610,41 4,800	100	610,41 4,800	100	610,41 4,800	100	610,41 4,800	100	610,41 4,800	100	3,286,25 6,400
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	74.72%	75.33	76.18	1,055,4 05,000	76.97	1,055,4 05,000	77.72	1,055,4 05,000	78.42	1,055,4 05,000	79.07	1,055,4 05,000	79.07	1,055,4 05,000	79.07	5,277,02 5,000
2 17 07	PROGRAM USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	3.31%	4	4	1,500,0 00,000	5	1,500,0 00,000	6	1,500,0 00,000	7	1,500,0 00,000	9	1,500,0 00,000	9	1,500,0 00,000	9	7,656,12 1,600
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil	15,16	0.01	0.01	3,150,0 00,000	0.01	3,150,0 00,000	0.01	3,150,0 00,000	0.01	3,150,0 00,000	0.01	3,150,0 00,000	0.01	3,150,0 00,000	0.05	16,280,0 00,000

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
2 18 02	PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai investasi	7.90 Trilyun	5.44 Trilyun	12,000 ,000	5.60 Trilyun	450,000 ,000	5.77 Trilyun	550,000 ,000	5.95 Trilyun	260,000 ,000	6.12 Trilyun	400,000 ,000	6.30 Trilyun	350,000 ,000	6.49 Trilyun	2,022,000 ,000
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	100%	100%	97,360 ,000	100%	200,000 ,000	100%	300,000 ,000	100%	300,000 ,000	100%	350,000 ,000	100%	300,000 ,000	100%	1,547,360 ,000
2 18 05	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	100%	100%	76,050 ,000	100%	325,000 ,000	100%	350,000 ,000	100%	375,000 ,000	100%	400,000 ,000	100%	400,000 ,000	100%	1,926,050 ,000
2 18 06	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	372,462 ,000	100%	350,000 ,000	100%	300,000 ,000	100%	350,000 ,000	100%	500,000 ,000	100%	500,000 ,000	100%	2,372,462 ,000
2 18 04	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	100%	100%	510,220 ,000	100%	500,000 ,000	100%	450,000 ,000	100%	500,000 ,000	100%	525,000 ,000	100%	600,000 ,000	100%	3,085,220 ,000

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	96.67%	375,000,000	97.50%	375,000,000	97.52%	375,000,000	98.35%	375,000,000	98.36%	375,000,000	99.18%	375,000,000	99.18%	375,000,000	99.18%	2,250,000,000	
		Persentase Wirasaha Muda	32.71%	56,873,000	34.04%	70,350,000	35.37%	90,000,000	36.70%	175,000,000	38.03%	200,000,000	39.36%	225,000,000	39.36%	225,000,000	39.36%	817,223,000	
		Jumlah Pemuda yang Dibina Cakupan Pembinaan peserta didik Pramuka	855 Orang	1,184, 313,000	1,730 Orang	1,274,0 35,000	2,605 Orang	3,480 Orang	3,480 Orang	1,506,8 00,000	4,355 Orang	1,566,0 00,000	5,230 Orang	1,630,0 00,000	5,230 Orang	1,630,0 00,000	5,230 Orang	8,536,148,000	
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		99.79%	375,000,000	99.83%	375,000,000	99.88%	375,000,000	99.92%	375,000,000	99.96%	375,000,000	100%	375,000,000	100%	375,000,000	100%	2,250,000,000	
2 19 03	PROGRAM PENG. KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet muda yang dibina	224 Atlet	599,265,500	704 Atlet	900,000,000	1,494 Atlet	1,425,000,000	1,974 Atlet	1,575,000,000	2,764 Atlet	1,425,000,000	3,244 Atlet	1,575,000,000	3,244 Atlet	1,575,000,000	3,244 Atlet	7,499,265,500	
		Cakupan pembinaan olahraga	90.57%	3,262, 370,000	92.45%	3,150,000,000	94.34%	3,405,000,000	96.23%	3,450,000,000	98.11%	3,475,000,000	100%	3,500,000,000	100%	3,500,000,000	100%	20,242,370,000	
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	1.64%	0	12.05%	100,000,000	16.88%	115,000,000	21.70%	200,000,000	26.52%	250,000,000	31.34%	300,000,000	31.34%	300,000,000	31.34%	965,000,000	
	STATISTIK																		
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGAR AN STATISTIK SEKTORAL	Tingkat ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah	14%	718,527,272	17%	701,000,000	31%	966,750,000	45%	1,075,087,500	55%	1,135,091,875	70%	1,192,346,469	70%	1,192,346,469	70%	5,788,803,116	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
2 21 02	PERSANDIAN PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	41%	499,000,000	48%	499,000,000	51%	523,950,000	58%	550,147,500	65%	577,654,875	68%	606,537,619	68%	3.262.612.994	
2 22 02	KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan kelompok budaya yang dibina	30,00	1,000,000,000	35,00	1,000,000,000	42,50	1,530,000,000	57,50	1,680,000,000	67,50	1,680,000,000	72,50	1,680,000,000	72,50	8.241,415,950	
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan kelompok kesenian yang dibina	30,00	1,000,000,000	35,00	1,000,000,000	42,50	1,530,000,000	57,50	1,680,000,000	67,50	1,680,000,000	72,50	1,680,000,000	72,50	7.727,574,000	
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan. event dan organisasi kemasyarakatan	0,00	150,000,000	9,36	150,000,000	12,49	150,000,000	18,73	150,000,000	28,09	150,000,000	31,32	150,000,000	31,32	750,000,000	
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	25,64	300,000,000	38,46	300,000,000	51,28	350,000,000	64,10	400,000,000	84,62	450,000,000	100,00	500,000,000	100,00	2.171,010,000	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
	PERPUSTAKAAN																
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase kegiatan Gemar Membaca tingkat daerah yang dilaksanakan	92.06%	100	78,000, ,000	100	30,000, ,000	100	55,000, ,000	100	60,000, ,000	100	85,000, ,000	100	130,000, ,000	100	438,000, ,000
		Persentase pembinaan perpustakaan Desa	100%	54%	30,000, ,000	65%	20,000, ,000	77%	30,000, ,000	88%	30,000, ,000	88%	25,000, ,000	100%	40,000, ,000	100%	175,000, ,000
		Persentase pelayanan Perpustakaan Daerah	58%	67	652,52 ,4,000	67	185,000, ,000	100	137,000, ,000	100	217,000, ,000	100	242,80 ,0,000	100	257,80 ,0,000	100	1,692,12 ,4,000
	KEARSIPAN																
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat tertib pengelolaan arsip perangkat daerah	69,64%	73%	131,84 ,7,600	77%	70,000, ,000	80%	113,000, ,000	84%	113,000, ,000	91%	147,20 ,0,000	100%	187,20 ,0,000	100%	762,247, ,600
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip bersejarah yang berhasil ditelusuri	2.56%	7.69%	28,152 ,400	12.82 %	10,000, ,000	17.95 %	35,000, ,000	23.08 %	20,000, ,000	28.21 %	25,000, ,000	33.33 %	25,000, ,000	33%	143,152, ,400
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN																
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Capaian produksi perikanan tangkap	79.15	81.02	22,395 ,400	82.4	130,000, ,000	83.6	136,50 ,000	84.1	136,50 ,000	84.7	150,49 ,2,000	85.8	158,00 ,0,000	85.8	733,887, ,400

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
		Cakupan bantuan sarana penangkapan ikan	7.51%	562,720,000	7.51%	540,800,000	7.51%	567,840,000	7.51%	567,840,000	7.51%	567,840,000	7.51%	626,040,000	7.51%	657,340,000	7.51%	3,522,590,000	
		Cakupan bina kelompok nelayan	3.95	27,780,000	15.81	1,715,000,000	19.76	1,715,000,000	19.76	1,715,000,000	21.74	1,985,300,000	23.72	2,229,200,000	23.72	2,229,200,000	23.72	7,366,610,000	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	76.92	303,495,000	76.92	1,834,025,000	76.92	1,834,025,000	76.92	1,834,025,000	76.92	2,123,140,000	76.92	2,229,200,000	76.92	2,229,200,000	76.92	10,157,884,000	
		Persentase tanda daftar kapal perikanan < 10 GT	6.57	19,824,400	6.57	50,000,000	6.57	52,500,000	6.57	55,125,000	6.57	57,882,000	6.57	60,775,000	6.57	60,775,000	6.57	296,106,400	
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase izin usaha perikanan budidaya	100%	0	100	60,000,000	100	63,000,000	100	66,150,000	100	69,458,000	100	72,930,000	100	72,930,000	100	331,538,000	
		Cakupan pembinaan kelompok pembudidaya ikan kecil	5.71	13,380,000	7.14	598,300,000	47.28	628,215,000	7.14	628,215,000	7.14	692,607,000	7.14	727,238,000	7.14	727,238,000	7.14	3,287,955,000	
		Persentase tanda daftar pembudidaya ikan kecil	9.46%	12,300,000	28.37	125,000,000	37.83	131,250,000	47.28	137,813,000	56.74	144,704,000	66.19	151,940,000	66.19	151,940,000	66.19	703,007,000	
		Cakupan bantuan sarana perikanan budidaya	1.71%	520,250,000	4.57	3,800,000,000	13.43	3,800,000,000	13.43	3,800,000,000	16.29	3,800,000,000	19.14	3,800,000,000	19.14	3,800,000,000	19.14	19,520,250,000	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
		Capaian produksi perikanan budidaya	56.35	75.22	44,320,000	80.2	747,000,000	85.7	747,000,000	88.1	747,000,000	90.2	864,745,000	91	907,984,000	91	4,058,049,000
		Capaian produksi garam	-	8.20%	0	22.2	900,000,000	36.2	900,000,000	50.2	900,000,000	64.2	900,000,000	78.2	1,093,950,000	78.2	4,693,950,000
		Capaian produksi benih ikan	58.57	58.57	448,200,000	61.5	522,960,000	64.43	549,108,000	67.36	549,108,000	70.29	605,392,000	73.21	635,662,000	73.21	3,310,430,000
		Cakupan Survailen hama dan penyakit ikan	100%	100%	215,126,700	100%	168,000,000	100%	176,400,000	100%	176,400,000	100%	194,481,000	100%	204,205,050	100%	1,134,612,750
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya di perairan umum daratan	-	80%	0	80%	98,790,000	80%	103,730,000	80%	103,730,000	80%	114,362,000	80%	120,080,000	80%	540,692,000
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase tanda daftar usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil	-	16	0	16	50,000,000	16	52,500,000	16	55,125,000	16	57,882,000	16	60,776,000	16	276,283,000

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
		Cakupan pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil	-	20	0	100,526,000	20	105,553,000	20	105,553,000	20	116,372,000	20	122,190,000	20	550,194,000	20	550,194,000	
		Capaian produksi pengolahan hasil usaha perikanan	-	94.59	0	25,635,000	94.59	26,917,000	94.59	26,917,000	94.59	29,676,000	94.59	31,160,000	94.59	140,305,000	94.59	140,305,000	
		Capaian angka Konsumsi Ikan daerah	37,21 kg/kapita /tahun	37.46	0	67,035,000	37.96	70,387,000	38.21	70,387,000	38.46	77,600,000	38.71	81,482,000	38.71	366,891,000	38.71	366,891,000	
		Cakupan bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	-	0	0	617,680,000	16	617,680,000	16	617,680,000	16	715,000,000	16	750,800,000	16	3,318,840,000	16	3,318,840,000	
3 27 02	PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	50	55	562,324,500	60	1,000,000,000	65	1,000,000,000	70	1,000,000,000	75	1,000,000,000	80	1,000,000,000	80	5,562,324,500	80	5,562,324,500

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
		Pertumbuhan Sumber Daya Genetik (SDG)	0.08	0	500,000,000	0.16	500,000,000	0.18	500,000,000	0.19	500,000,000	0.21	500,000,000	0.23	500,000,000	0.23	2,500,000,000		
		Prosentase Benih / Bibit bersertifikat	5	0	1,000,000,000	7	1,000,000,000	9	1,000,000,000	11	1,000,000,000	12	1,000,000,000	14	1,000,000,000	14	5,000,000,000		
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (JUT. embung RPH.dll)	50	16,282,374,000	10,000,000,000	60	10,000,000,000	65	7,500,000,000	67	7,500,000,000	70	10,000,000,000	75	11,000,000,000	75	62,282,374,000		
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINERT	Cakupan pencegahan dan penanganan penyakit ternak	10	124,732,504	500,000,000	15	500,000,000	17	500,000,000	20	500,000,000	23	750,000,000	25	750,000,000	25	3,124,732,504		
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pencegahan dan penanganan bencana pertanian	35	193,030,700	1,000,000,000	45	1,000,000,000	47	1,000,000,000	50	1,000,000,000	55	1,000,000,000	60	1,000,000,000	60	5,193,030,700		
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase perizinan usaha pertanian	14	0	200,000,000	17	200,000,000	20	300,000,000	23	300,000,000	25	300,000,000	27	350,000,000	27	1,450,000,000		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp.
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.		
		Prosentase perizinan usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan. Fasilitas Pemeliharaan Hewan. Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan. Rumah Potong Hewan	15	17	0	19	20	22	24	25	25	25	25	25	25	25	2,200,000,000
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	45	50	2,330,663,500	53	2,200,000,000	57	2,200,000,000	60	2,500,000,000	63	2,700,000,000	63	14,130,663,500		
	PARIWISATA																
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya tarik destinasi pariwisata Kabupaten	0%	0%	0	75.76%	50,000,000	81.82%	87.88%	93.94%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	720,000,000		
		Persentase Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten	0%	0%	0	20%	200,000,000	60%	120,000,000	80%	500,000,000	100%	600,000,000	100%	1,770,000,000		
		Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten	0%	0%	204,664,000	20%	300,000,000	60%	390,000,000	80%	510,000,000	100%	520,000,000	100%	2,264,664,000		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	0%	0	150,000,000	33.33 %	150,000,000	52.78 %	120,000,000	75%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	720,000,000		
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Pemasaran Pariwisata Kabupaten	0%	1,114,376,000	1,093,000,000	41.22 %	1,298,600,000	60.81 %	1,535,320,000	80.41 %	1,816,384,000	100%	2,171,660,800	100%	9,029,340,800		
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten	1,374,043	104,548,500	72,000,000	2,403,200	86,400,000	2,903,600	103,680,000	3,504,000	124,416,000	4,304,600	149,299,200	5,105,200	640,343,700		
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk dan Karya Ekraf terdaftar HAKI	0%	0	180,430,000	25%	250,000,000	50%	250,000,000	75%	500,000,000	100%	450,000,000	100%	1,630,430,000		
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkompetensi dasar	0%	195,016,500	95,000,000	36.71 %	295,000,000	54.43 %	195,000,000	82.28 %	295,000,000	100%	195,000,000	100%	1,270,016,500		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	
	PERDAGANGAN																	
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang diterbitkan	95.14%	95	0	29,500, 000	95	29,500, 000	95	29,500, 000	95	29,500, 000	95	29,500, 000	95	29,500, 000	95	147,500, 000
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Omzet Pedagang	2	2	968,13 6,730	1,739,0 00,000	2	1,739,0 00,000	2	1,754,0 00,000	2	2,000,0 00,000	2	2,100,0 00,000	2	2,100,0 00,000	10	10,300,1 36,730
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100	100	29,125 ,000	210,000 ,000	100	320,000 ,000	100	320,000 ,000	100	280,000 ,000	100	345,000 ,000	100	345,000 ,000	100	1,504,12 5,000
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor (Us\$ dalam juta dollar)	1000	500	60,000 ,000	1,000,0 00,000	600	850,000 ,000	800	850,000 ,000	700	900	850,000 ,000	1000	850,000 ,000	1000	4,460,00 0,000	
3 30 06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal	0.9	0.9	190,00 0,000	800,000 ,000	1	850,000 ,000	2	400,000 ,000	1.5	2.5	450,000 ,000	3	450,000 ,000	3	3,140,00 0,000	
3 30 07	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	0	0	0	0	0	150,000 ,000	1	150,000 ,000	1	150,000 ,000	1	150,000 ,000	1	150,000 ,000	4	600,000, 000

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	
3 31 02	PERINDUSTRIAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri baru	0.29%	1	73,113 ,426	1	445,000 ,000	1	350,000 ,000	1	305,000 ,000	1	310,000 ,000	1	315,000 ,000	5	1,798,11 3,426	
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Prosentase perizinan usaha industri	100	100	21,750 ,000	100	43,500 ,000	100	56,000 ,000	100	56,000 ,000	100	56,000 ,000	100	56,000 ,000	100	289,250, 000	
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	98.82	98.82	0	120,000 ,000	98.83	120,000 ,000	98.84	120,000 ,000	98.85	120,000 ,000	98.86	120,000 ,000	98.87	120,000 ,000	98.87	600,000, 000
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
	SEKRETARIAT DAERAH																	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat fasilitasi dukungan penyelengga raan program pemerintah n dan kejahteraan n rakyat yang menjadi tugas Sekretariat Daerah	100	100	14,514 ,816,4 00	100	15,323, 573,347	100	19,367, 845,00 0	100	19,363, 504,59 4	100	19,391, 278,13 5	100	19,502, 462,66 4	600	107,463, 480,139	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat fasilitasi dukungan penyeleng araan urusan pemerintah daerah yang menjadi tugas Sekretariat Daerah	100	42,339 ,454,4 46	100	41,949, 594,278	100	29,064, 560,00 0	100	29,211, 522,12 1	100	29,253, 420,91 1	100	29,421, 152,39 5	600	201,239, 704,151	
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat terfasilitasi a dukungan penyeleng aan program perekonomia n dan pembanguna nyang menjadi tugas Sekretariat Daerah	100	4,482, 054,99 6	100	4,147,8 70,562	100	4,852,8 50,854	100	4,860,0 60,598	100	4,867,0 31,500	100	4,894,9 37,789	600	28,104,8 06,299	
	SEKRETARIAT DPRD																
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Layanan dan fasilitasi Fungsi DPRD	100	47,357 ,695,4 00	100	47,357, 695,400	100	47,357, 695,40 0	100	47,357, 695,40 0	100	47,357, 695,40 0	100	47,357, 695,40 0	100	284,146, 172,400	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
5 01 02	PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase terpenuhinya keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan pembanguna n daerah yang disampaikan tepat waktu	100	2,720, 485,36 7	100	2,597,1 78,000	100	2,750,0 00,000	100	3,000,0 00,000	100	3,200,0 00,000	100	3,140,9 49,000	100	17,508,6 12,367	
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase tercapainya kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan Pelaksanaan Kegiatan pada perangkat daerah	100	3,860, 462,15 0	100	4,000,0 00,000	100	4,000,0 00,000	100	4,000,0 00,000	100	4,000,0 00,000	100	4,200,0 00,000	100	24,060,4 62,150	
	KEUANGAN																
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.	Tertlaksananya a Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	9,947, 283,41 7	100%	11,500, 000,000	100%	11,500, 000,000	100%	11,500, 000,000	100%	11,500, 000,000	100%	12,800, 000,000	100%	68,747,2 83,417	
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.	Persentase laporan Pengelolaan Aset Daerah.	8	1,057, 908,00 0	8	1,800,0 00,000	8	2,000,0 00,000	8	2,000,0 00,000	8	2,000,0 00,000	8	2,000,0 00,000	40	10,857,9 08,000	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah	92.13%	100%	4,566, 127,80 0	100%	7,075,6 36,700	100%	7,269,8 56,300	100%	7,596,1 75,900	100%	7,768,7 65,500	100%	7,889,8 60,100	100%	42,166,4 22,300
	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensi ya sesuai standar	5%	7%	1,470, 761,00 0	10%	3,507,0 00,000	20%	4,382,3 16,000	20%	5,446,9 00,000	20%	5,677,8 48,000	20%	5,663,4 80,000	97%	26,148,3 05,000
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tercapainya kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian	94,90%	95,00 %	3,288, 399,50 0	96,00 %	3,161,1 44,000	97,00 %	3,743,9 84,000	97,50 %	3,554,4 00,000	97,00 %	3,850,9 52,000	97,50 %	3,865,3 20,000	97,50 %	21,464,1 99,500
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang telah didiseminas ikan	100	100	821,34 7,000	100	903,481 ,700	100	993,82 9,870	100	1,093,2 12,857	100	1,202,5 34,143	100	1,322,7 87,557	100	6,337,19 3,127
		Prosentase dukungan inovasi daerah	100	100	425,94 6,000	100	530,000 ,000	100	600,00 0,000	100	850,00 0,000	100	850,00 0,000	100	900,00 0,000	100	4,155,94 6,000

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
	UNSUR PENGAWASAN																		
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang didampingi dalam pelaksanaan program kegiatan	100	1,372, 866,60 0	3,729,0 51,857	100	3,965,8 71,346	100	4,147,4 32,953	100	4,347,1 50,722	100	4,566,8 40,267	100	4,566,8 40,267	100	22,129,2 13,743		
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Tingkat pelaksanaan pengawasan perangkat daerah	100	1,866, 304,00 0	5,296,5 04,867	100	5,618,4 42,307	100	5,865,2 61,011	100	6,150,2 55,267	100	6,350,2 55,267	100	6,350,2 55,267	100	31,147,0 22,717		
	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelengga raan kegiatan pemerintah ningkat kecamatan	100	7,000, 000,00 0	18,300, 000,000	100	18,300, 000,00 0	100	18,300, 000,00 0	100	18,300, 000,00 0	100	18,300, 000,00 0	100	18,300, 000,00 0	100	170,010, 803,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan koordinasi pemberday aan desa/ kelurahan	100	3,081, 722,70 0	3,081,7 22,700	100	3,081,7 22,700	100	3,081,7 22,700	100	3,081,7 22,700	100	3,081,7 22,700	100	3,081,7 22,700	100	18,490,3 36,200		
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelengg araan urusan pemerintah an umum di wilayah kecamatan	100	16,993 ,811,5 00	23,844, 577,300	100	23,844, 577,30 0	100	23,844, 577,30 0	100	23,844, 577,30 0	100	23,844, 577,30 0	100	23,844, 577,30 0	100	31,452,0 66,000		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG	Rp.	TARG	Rp.
				ET	Rp.	ET	Rp.	ET	Rp.	ET	Rp.	ET	Rp.	ET	Rp.	ET	Rp.	ET	Rp.
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan ketertiban di wilayah kecamatan	100	2,473, 700,00 0	100	2,473,7 00,000	100	2,473,7 00,000	100	2,473,7 00,000	100	2,473,7 00,000	100	2,473,7 00,000	100	2,473,7 00,000	100	14,842,2 00,000	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa dibina	100	6,450, 765,80 0	100	6,450,7 65,800	100	6,450,7 65,800	100	6,450,7 65,800	100	6,450,7 65,800	100	6,450,7 65,800	100	6,450,7 65,800	100	38,704,5 94,800	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan. barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah		1,330, 603,62 5,039	100	1,381,4 75,706, 592	100	1,395,0 39,849, 169	100	1,400,3 08,804, 111	100	1,408,0 16,176, 987	100	1,413,7 82,477, 267	100	1,413,7 82,477, 267	100	8,328,45 7,339,26 3	
	TOTAL			3,056, 711,7 91,00 9		2,999,4 24,274, 982		3,064, 679,87 2,268		3,143, 133,54 7,884		3,150, 982,57 5,372		3,200,8 35,608, 203		3,200,8 35,608, 203		18,427, 537,289 ,555	

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

“Bab memuat indikator kinerja pemerintahan daerah selama lima tahun ke depan.”

Kerangka Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Serang disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Serang

No	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Indikator Makro								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,41	2,97	2,42	1,78	2,72	2,56		
2	Laju Inflasi	1,5	1,59	1,65	1,93	1,32	2,46		
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,00	67,29	67,57	67,83	68,08	68,31		
4	Persentase tingkat Kemiskinan	4,50	4,22	4,18	4,10	4,08	4,04		
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	12,00	11,89	11,55	11,22	11,00	10,88		
	Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah								
1	Angka Rata Rata Lama Sekolah	7,64	7,79	7,93	8,07	8,22	8,36		
2	Angka Rata Rata Harapan Bersekolah	12,75	12,94	13,12	13,30	13,48	13,67		
	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan	48,10	48,72	49,31	49,91	50,51	51,11		
2.	Tingkat Warisan Budaya yang Dilestarikan	41.38%	48.28%	58.62%	79.31%	93.10%	100%		
	Cakupan seni budaya dan kearifan lokal skala kabupaten dan nasional	41.38%	48.28%	58.62%	79.31%	93.10%	100%		
3.	Angka Harapan Hidup (AHH)	64,85	65,06	65,26	65,47	65,68	65,89		
	Angka kematian ibu	202	200	194	183	182	180		
	Angka kematian bayi	8,27	8,25	8,23	8,21	8,19	8,17		
	Angka Prevelensi Stunting	21,1%	18,4%	16%	14%	13,5%	13%		
	Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi	25	30	35	40	45	50		
	Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	80%	80%	80%	80%	80%	80%		

No	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur						
	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	50%	52,5%	55%	57,5%	60%	62,5%
	Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum	96,1%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Desa yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestic	87,12	87,73	88,34	88,96	89,57	90,18
	Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik	71,47	72,09	72,70	73,31	73,93	74,54
	Persentase kawasan kumuh	55	60	65	70	75	80
	Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi	0.2	0.18	0.16	0.14	0.12	0.1
	Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik	35	41.66	48,33	55	61.66	68,33
	Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	51,85%	52,5%	55,56%	58,08%	60,96%	63,89%
	Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan	96	62.5	64.9	67.3	69.7	72.1
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	100	100	100	100	100	100
	Cakupan ketersediaan air baku	5	10	20	25	40	100
	Indeks kualitas Air	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Kualitas udara	49.75	50.25	50.75	51.25	51.75	52.25
	Indeks tutupan Vegetasi	82.5	82.75	83	83.25	83.5	83.75
	Persentase Penanganan Sampah	69.985	69.99	69.995	70	70.005	70.01
	Persentase Rumah Layak Huni	15.03	17.44	19.85	22.27	24.68	27.09
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	89.26%	89.88%	90.49%	91.10%	91.72%	92.33%
6.	Inflasi	3,41	2,97	2,42	1,78	2,72	2,56
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,5	1,23	1,5	1,59	1,65	1,93
		12	11.89	11.55	11.22	11	10.88

No	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	3.07	2.82	2.84	3.19	2.98	2.96
	Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	2.8	1.99	1.48	1.61	1.97	1.76
	Proporsi peningkatan SHU koperasi	2%	2%	2%	2%	2%	2%
	Pertumbuhan Wirasaha	5	10	10	10	10	10
	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	2.06	1.43	0.70	0.06	1.03	0.77
	Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB	3.99	3.58	3.22	2.28	3.27	3.09
	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	PMA	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	PMDN	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	Kontribusi PAD Pariwisata	17.000.000.000	17.010.000.000	17.020.000.000	17.030.000.000	17.040.000.000	17.050.000.000
	Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM	15.03	15.95	16.87	17.79	18.71	19.63
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	15	20	25	30	35	40
8	Persentase Tingkat Kemiskinan	4.5	4.22	4.18	4.1	4.08	4.04
9	Indeks Gini Rasio						
	Indeks Ketahanan Pangan	77.10%	77.15%	77.20%	77.30%	77.40%	77.50%
	Prosentase PMKS yang tertangani	17.38%	3%	3%	3%	3%	3%
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,02	92,06	92,10	92,14	92,18	92,22
	Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking	58	60	65	70	75	80
	Total Fertility Rate	2,29	2,26	2,24	2,21	2,19	2,1
10	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB	BB
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai LPPD	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB
	Jmlh opd pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK	1	1	1	1	1	1

No	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tingkat Maturitas SPIP	3,11	3,50	3,60	3,70	3,80	4,00
	Tingkat Pertumbuhan PAD	4.07%	1.12%	3.28%	3.33%	3.39%	3.44%
	Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100
	Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100
	Indek Inovasi Daerah	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif
	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
	Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori baik	94%	95%	93%	96%	97%	97%
	Cakupan standar kompetensi pegawai	94.10%	94.50%	95.00%	95.50%	96.00%	96.00%
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	65%	70%	75%	80%	85%	90%
	Indeks Kematangan Penerapan SPBE	2.98	2.98	2.98	2.99	3	3.01
	Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI)	100	120	140	160	170	175
	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	B	B	B
	Cakupan kepemilikan dokumen adminduk	83.23	84.8	87.4	89.8	92.2	94.6
	Persentase Masyarakat yang Melakukan Kunjungan Perpustakaan	42.00%	60.00%	70.00%	80.00%	90.00%	100%
	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital	44.64%	53.57%	62.50%	71.43%	80.36%	100%
	Cakupan kepemilikan dokumen adminduk	83,23	84,8	87,4	89,8	92,2	94,6
	Indeks Risiko Bencana	203,10	203,05	203,00	202,80	202,50	200,00
	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda	5%	5%	5%	5%	5%	5%
11	Indeks Kerukunan Umat Beragama	86.9	87.4	87.95	88.5	89	89.5
	Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat	0	0	0	0	0	0

Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR PERENCA NAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	KETAHANAN PANGAN									
1.1	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lambung Pangan	%	35.00	40.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100
1.2	Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	95	95.25	95.35	95.4	95.45	95.5	95.55	100
1.3	Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	88.9	77.5	78	78.5	79	79.5	80	80
1.4	Persentase penurunan jumlah desa rentan rawan pangan	%	5.52%	3.68	3.07	2.45	1.84	1.23	0.61	0.61
1.5	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman pangan	%	85	90%	92%	94%	95%	95%	95%	95%

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR PERENCA NAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Pelayanan Urusan Wajib									
	Terkait Pelayanan Dasar									
1.	PENDIDIKAN									
1.1	APM SD	%	100,00	100,00	100	100	100	100	100	100
1.2	APM SMP	%	99,45	100,00	100	100	100	100	100	100
1.3	APK PAUD	%	85,28	100,00	87	88,5	90	91,5	93	93
1.4	Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/esetaraan	%	100,00	100,00	100	100	100	100	100	100
1.5	Capaian SPM Bidang Pendidikan	%	83,05	83,10	83,15	83,20	83,25	83,30	83,35	83,35
1.6	Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap rombongan	%	78,21	78,21	81,21	84,21	87,21	90,21	93,21	93,21
1.8	Prosentase izin pendidikan dasar.	%	100	100	100	100	100	100	100	100

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
	PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat										
2.	KESEHATAN										
2.1	Prosentase Pemenuhan 12 indikator SPM Kesehatan	%	100%	100	100	100	100	100	100	100	
2.2	Prosentase kepesertaan jaminan kesehatan	%	74%	74	85	90	90	95	98	98	
2.3	Prosentase Desa Stop BABS	%	15 %	15	20	25	35	40	50	50	
2.4	Prosentase PKM dengan ketersediaan obat esensial, vaksin, alkes	%	100%	100%	100	100	100	100	100	100	
2.5	Prosentase Posyandu aktif	%	55 %	55	55	60	65	70	75	75	
2.6	Prosentase Kecamatan menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	%	0 %	60	60	70	80	90	100	100	
2.7	Prosentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100 %	100	100	100	100	100	100	100	

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
2.8	Tingkat Penerimaan Pendapatan Puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	%	80.07%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
2.10	Tingkat sarana prasarana RS dalam kondisi baik	%	66%	72%	76%	83%	86%	90%	90%	90%	
2.11	Prosentase SDM yang mengikuti Diklat sesuai standar kompetensi	%	20%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	
2.12	Tingkat Penerimaan Pendapatan RS	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
3.1	Persentase jumlah tenaga terampil konstruksi yang telah bersertifikat (SKT) di Kabupaten Serang	%	16.7	25	33.33	41.7	50	58.3	58.3	58.3	
3.2	Cakupan infrastruktur drainase desa kewenangan kabupaten	%	20.24	29.12	36.11	51.53	56.13	65.64	65.64	9.43	

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
3.3	Cakupan infrastruktur jalan kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.4	Tingkat ketaatan tata ruang dengan rencana tata ruang wilayah	%	83	87.5	90	92.5	93	94	94	94	
3.5	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	99.99	13.80	18.18	23.30	28.43	34.83	100	100	
3.6	Persentase Infrastruktur Air Baku dalam Kondisi Baik	%	39	10.2	18.75	30.11	41.47	55	55	55	
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
4.1	Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses air melalui SPAM	%	88.58	89.53	89.95	90.35	90.73	91.08	91.08	91.08	
4.2	Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses pengelolaan air limbah domestik	%	65.92	68.62	69.9	71.07	72.18	73.27	73.27	73.27	
4.3	Persentase Prasarana Permukiman pada kawasan strategis yang tertangani	%		20	30	40	50	60	60	60	

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
4.4	Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB	%	15	17	19	21	23	25	27	27	
4.5	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang teratur	%	15	17	19	21	23	25	27	27	
4.6	Persentase Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh	%	10	10	10	15	20	25	30	30	
4.7	Cakupan perbaikan rumah di kawasan kumuh		6.5	6.82	18.18	22.22	28.57	40	66.67	66.67	
4.8	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan Relokasi Program Kabupaten/ Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	0	
4.9	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin	%		100	100	100	100	100	100	100	
4.10	Persentase Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	%	10	10	10	15	20	25	30	30	

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4.11	Persentase Rumah dan PSU Tingkat Kemampuan Kecil yang memiliki sertifikasi dan registrasi	%	10%	10%	10	15	20	25	30	30%
5.	KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
5.1	Persentase Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditangani	%	60%	60%	65%	70%	75%	75%	75%	75%
5.2	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Tingkat pelayanan pencegahan penanggulangan. penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
5.4	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan bencana serta penanganan pasca bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	SOSIAL										
6.1	Persentase Fasilitas Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
6.2	Persentase Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.3	Cakupan rehabilitasi sosial	%	35,46%	16%	7.23%	7.23%	7.23%	7.23%	7.23%	36.15%	
6.4	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	%	5,57%	5%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.40%	
6.5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
6.6	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.	KETENAGAKERJAAN										
1.1	Cakupan perencanaan ketenagakerjaan	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	
1.2	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.3	Persentase layanan penempatan tenaga kerja lokal	%	13.38%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	40%	
1.4	Prosentasi Perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial	%	71.56%	72.56	74.56	75.56	76.56	78.56	79.56	80	
1.5	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	KK	n/a	10KK	15KK	18KK	25KK	30KK	35KK	133KK	

KO DE	INDIKTOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2.1	presentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.2	cakupan home industry perempuan aktif di lokasi P2WKSS	%	44.59%	45	46	46.5	47	47.5	48	48	
2.3	cakupan OPD yang memiliki Data Pilah Gender dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.4	cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap perempuan yang tertangani sampai selesai	%	31.07	30	30	30	30	30	30	30	
2.5	Prosentase kecamatan dan desa layak anak yang aktif	%	0	10	20	30	40	50	50	50	
2.6	cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap anak yang tertangani sampai dengan selesai	%	26.55	20	25	30	35	40	45	45	

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
3.	PANGAN									
3.1	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	%	35.00	40.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100
3.2	Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	95	95.25	95.35	95.4	95.45	95.5	95.55	100
3.3	Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	88.9	77.5	78	78.5	79	79.5	80	80
3.4	Persentase penurunan jumlah desa rentan rawan pangan	%	5.52%	3.68	3.07	2.45	1.84	1.23	0.61	0.61
3.5	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman pangan	%	85	90%	92%	94%	95%	95%	95%	95%
4.	PERTANAHAN									
4.1	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Prosentase Penyelesaian ganti kerugian tanah	%	100	100	100	100	100	100	100	100

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
4.3	Prosentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.	LINGKUNGAN HIDUP										
5.1	Tingkat ketersediaan dokumen lingkungan hidup yang dibuat dan diproses	Dok	3 Dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	18 dok	
5.2	Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan IKA, IKU, dan ITY/L	Sampel	250 Sampel	250 Sampel	300 Sampel	300 Sampel	300 Sampel	300 Sampel	300 Sampel	1.750 sampel	
5.3	Prosentase penataan pengelolaan B3 dan limbah B3 pada kegiatan/usaha	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.4	Prosentase penataan pengelolaan lingkungan kegiatan/usaha	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.5	Tingkat peran serta lembaga kemasyarakatan / pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
5.6	tingkat kepedulian masyarakat atau kelompok/lembaga masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	5 Kelompok	6 Kelompok	7 Kelompok	8 Kelompok	9 Kelompok	9 Kelompok	
5.7	Prosentase pengaduan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.8	Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan ITV/L	Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	10 Ha	
5.9	Persentase sampah terangkut	%	11.99%	14.39%	16.78%	19.18%	21.58%	23.98%	23.98%	23.98%	
	Persentase sampah terkurangi	%	3.02%	3.04%	3.05%	3.07%	3.08%	3.10%	3.10%	3.10%	
6.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL										
6.1	Prosentase meningkatnya Kualitas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR PERENCA NAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
6.2	Prosentase meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.3	Prosentase meningkatnya pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.4	Terkelola dan tersajinya data kependudukan Buku Profil Perkembangan Kab. Serang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
7.1	Tingkat tertib penyelenggaraa penataan desa	%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.2	Persentase Kerjasama antar Desa yang terfasilitasi	%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.3	Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa	%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
7.4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
8.1	Angka prevalensi kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/ m CPR.)		76.16	69,16	69,66	70,16	70,66	71,16	71,66	71,66	
8.2	prosentase kecamatan yang menyediakan data mikro keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
8.3	Prosentase anggota Poktan tribina . UPPKA dan PPKS aktif ber KB	%	80	80	80	80	80	80	80	80	
9	PERHUBUNGAN										
9.1	Persentase layanan angkutan darat	%	13%	13%	13%	13%	14%	14%	14%	14%	
9.2	Persentase Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Angkutan Laut	%	0	0%	25%	25%	25%	25%	25%	0.25	

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
9.3	Persentase Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang memiliki izin	%	0	0.00%	20%	20%	20%	20%	20%	0.2
9.4	Persentase Prasarana Perkeretaapian Umum yang memiliki izin	%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
10.1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	%	65%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
10.2	Cakupan Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui Media Informasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
10.3	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	%	40%	40%	50%	70%	80%	90%	100	100%
10.4	Persentase Penerapan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah	%	40%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	90%

KO DE	INDIKTOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
11.	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH										
11.1	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang dilayani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11.2	Tingkat pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi		0	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	#REF!	
11.3	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang sehat	%	16.67%	22.15%	25.68%	28.90%	31.86%	34.57%	37.08%	34.57%	
11.4	Persentase SDM Koperasi terlatih	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
11.5	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	%	74.72%	75.33	76.18	76.97	77.72	78.42	79.07	78.42	
11.6	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	%	3.31%	4	4	5	6	7	9	9	
11.7	Persentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil	%	15,16	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
12.	PENANAMAN MODAL									
12.1	Nilai investasi	Trilyun	7.90 Trilyun	5.44 Trilyun	5.60 Trilyun	5.77 Trilyun	5.95 Trilyun	6.12 Trilyun	6.30 Trilyun	6.49 Trilyun
12.2	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.3	Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.4	Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.5	Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	96.67%	96.67%	97.50%	97.52%	98.35%	98.36%	99.18%	99.18%
13.2	Persentase Wirasaha Muda	%	31.38%	32.71%	34.04%	35.37%	36.70%	38.03%	39.36%	39.36%

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
13.3	Jumlah Pemuda yang Dibina	Orang	137 Orang	855 Orang	1.730 Orang	2.605 Orang	3.480 Orang	4355 Orang	5.230 Orang	5.230 Orang	
13.4	Cakupan Pembinaan peserta didik Pramuka	%	99.79%	99.79%	99.83%	99.88%	99.92%	99.96%	100%	100%	
13.5	Jumlah atlet muda yang dibina	Atlet	246 Atlet	224 Atlet	704 Atlet	1.494 Atlet	1.974 Atlet	2.764 Atlet	3.244 Atlet	3.244 Atlet	
13.6	Cakupan pembinaan olahraga	%	90.57%	90.57%	92.45%	94.34%	96.23%	98.11%	100%	100%	
13.7	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	%	1.64%	-	12.05%	16.88%	21.70%	26.52%	31.34%	31.34%	
14.	STATISTIK										
14.1	Tingkat ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah	%	14%	14%	17%	31%	45%	55%	70%	70%	
15.	PERSANDIAN										
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	41%	41%	48%	51%	58%	65%	68%	68%	

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
16.	KEBUDAYAAN										
16.1	Cakupan kelompok budaya yang dibina		30,00	30,00	35,00	42,50	57,50	67,50	72,50	72,50	
16.2	Cakupan kelompok kesenian yang dibina		30,00	30,00	35,00	42,50	57,50	67,50	72,50	72,50	
16.3	Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan. event. dan organisasi kemasyarakatan		0,00	9,36	12,49	18,73	28,09	31,32		31,32	
16.4	Persentase Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	25,64	38,46	51,28	64,10	84,62	100,00		100,00	
17.	PERPUSTAKAAN										
17.1	Persentase kegiatan Gemar Membaca tingkat daerah yang dilaksanakan	%	92.06%	100	100	100	100	100	100	100	
17.2	Persentase pembinaan perpustakaan Desa	%	100%	65%	77%	88%	88%	88%	100%	100%	
17.3	Persentase pelayanan Perpustakaan Daerah	%	58%	67	100	100	100	100	100	100	

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
18.	KEARSIPAN										
18.1	Tingkat tertib pengelolaan arsip perangkat daerah	%	69.64%	73%	77%	80%	84%	91%	100%	100%	
18.2	Prosentase arsip bersejarah yang berhasil ditelusuri	%	2.56%	7.69%	12.82%	17.95%	23.08%	28.21%	33.33%	33.33%	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
1.	KELAUTAN DAN PERIKANAN										
1.1	Capaian produksi perikanan tangkap		79.15	81.02	82.4	83.6	84.1	84.7	85.8	85.8	
1.2	Cakupan bantuan sarana penangkapan ikan	%	7.51%	7.51%	7.51%	7.51%	7.51%	7.51%	7.51%	7.51%	
1.3	Cakupan bina kelompok nelayan		3.95	3.95	15.81	17.79	19.76	21.74	23.72	23.72	
1.4	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	%	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92	
1.5	Persentase tanda daftar kapal perikanan < 10 GT	%	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	
1.6	Persentase izin usaha perikanan budidaya	%	100%	100	100	100	100	100	100	100	

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1.7	Cakupan pembinaan kelompok pembudidaya ikan kecil		5.71	5.71	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	
1.8	Persentase tanda daftar pembudidaya ikan kecil	%	9.46%	18.91	28.37	37.83	47.28	56.74	66.19	56.74	
1.9	Cakupan bantuan sarana perikanan budidaya	%	1.71%	4.57	7.71	10.57	13.43	16.29	19.14	19.14	
1.10	Capaian produksi perikanan budidaya		56.35	75.22	80.2	85.7	88.1	90.2	91	91	
1.11	Capaian produksi garam		-	8.20%	22.2	36.2	50.2	64.2	78.2	78.2	
1.12	Capaian produksi benih ikan		58.57	58.57	61.5	64.43	67.36	70.29	73.21	73.21	
1.13	Cakupan Surveilans hama dan penyakit ikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.14	Cakupan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya di perairan umum daratan		-	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
1.15	Persentase tanda daftar usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil		-	16	16	16	16	16	16	16	

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1.16	Cakupan pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil		-	20	20	20	20	20	20	20	
1.17	Capaian produksi pengolahan hasil usaha perikanan		-	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	
1.18	Capaian angka Konsumsi Ikan daerah	kg/kapita a/tahun	37,21	37.46	37.71	37.96	38.21	38.46	38.71	38.71	
1.19	Cakupan bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		-	0	0	16	16	16	16	16	
2.	PERTANIAN										
2.1	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	%	50	55	60	65	70	75	80	80	
2.2	Pertumbuhan Sumber Daya Genetik (SDG)		0.08	0.13	0.16	0.18	0.19	0.21	0.23	0.23	
2.3	Prosentase Benih / Bibit bersertifikat	%	5	6	7	9	11	12	14	14	

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2.4	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (JUT. embung, RPH. dll)	%	50	55	60	65	67	70	75	75
2.5	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak		10	13	15	17	20	23	25	25
2.6	Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian		35	40	45	47	50	55	60	60
2.7	Prosentase perizinan usaha pertanian	%	14	15	17	20	23	25	27	27
2.8	Prosentase perizinan usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan. Fasilitas Pemeliharaan Hewan. Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan. Rumah Potong Hewan	%	15	17	19	20	22	24	25	25
2.9	Cakupan bina kelompok tani		45	50	53	55	57	60	63	63
3.	PERDAGANGAN									
3.1	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang diterbitkan	%	95.14%	95	95	95	95	95	95	95

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
3.2	Persentase Peningkatan Omzet Pedagang	%	2	2	2	2	2	2	2	10	
3.3	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.4	Nilai ekspor (US\$ dalam juta dollar)	Dalam juta Dollar	1000	500	600	700	800	900	1000	1000	
3.5	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal	%	0.9	0.9	1	1.5	2	2.5	3	2.5	
3.6	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	%	0	0	0	1	1	1	1	4	
4.	PERINDUSTRIAN										
4.1	Pertumbuhan industri baru	%	0.29%	1	1	1	1	1	1	5	
4.2	Persentase perizinan usaha industri	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.3	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional		98.82	98,82	98,83	98,84	98,85	98,86	98,87	98,87	

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
5	PARIWISATA										
5.1	Persentase Daya tarik destinasi pariwisata Kabupaten	%	0%	75.76%	81.82%	87.88%	93.94%	100%	100%	100%	
5.2	Persentase Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten	%	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	
5.3	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten	%	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	
5.4	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	%	0%	16.67%	33.33%	52.78%	75%	100%	100%	100%	
5.5	Cakupan Pemasaran Pariwisata Kabupaten	%	0%	21.62%	41.22%	60.81%	80.41%	100%	100%	100%	
5.6	Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten	Orang	1,374,043	2,003,000	2,403,200	2,903,600	3,504,000	4,304,600	5,105,200		
5.7	Persentase Produk dan atau Karya Ekraf terdaftar HAKI	%	0%	0%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	
5.8	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkompetensi dasar	%	0%	8.86%	36.71%	54.43%	82.28%	100%	100%	100%	

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH										
1.1	Tingkat fasilitas dukungan penyelenggaraan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi tugas Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.2	Tingkat fasilitas dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi tugas Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.3	Tingkat terfasilitasinya dukungan penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan yang menjadi tugas Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	SEKRETARIAT DPRD										
2.1	Tingkat Layanan dan fasilitas Fungsi DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
1.	PERENCANAAN										
	Prosentase terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai jadwal perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.1											
	Prosentase tercapainya keselarasan antara penyusunan dokumen perencanaan daerah dengan Pelaksanaan Kegiatan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.2											

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	KEUANGAN										
2.1	Tertindakannya Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.2	Persentase laporan Pengelolaan Aset Daerah.	%	8	8	8	8	8	8	8	40	
2.3	Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah	%	92.13%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	KEGAWAJIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
3.1	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya sesuai standar	%	5.00%	7.00%	10%	20%	20%	20%	20%	97%	
3.2	Tercapainya kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian	%	94,90%	95,00%	96,00%	96,50%	97,00%	97,50%	97,50%	97,50%	
3.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
3.1	Prosentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang telah didiseminasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

KO DE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
3.2	Prosentase dukungan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.	UNSUR PENGAWASAN										
4.1	Persentase perangkat daerah yang didampingi dalam pelaksanaan program kegiatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.2	Tingkat pelaksanaan pengawasan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.	UNSUR KEWILAYAHAN										
5.1	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.2	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

KO DE	INDIKTOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
5.3	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.4	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.5	Persentase pemerintahan desa dibina	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
6.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
6.1	Persentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan. barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

BAB IX PENUTUP

RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 merupakan dokumen penerjemahan janji kampanye pasangan Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE., M.Ak. dan Drs. H. Pandji Tirtayasa, M.Si. Keduanya secara resmi telah ditetapkan dan dilantik sebagai Bupati Serang dan Wakil Bupati Serang terpilih sesuai hasil Pilkada serentak tahun 2020. Di dalam RPJMD ini berisi penjabaran visi “Terwujudnya Kabupaten Serang yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”, dan enam poin misi, serta program keduanya sebagai pemimpin sah Kabupaten Serang selama periode 2021-2026.

Dokumen RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 akan menjadi panduan bagi berbagai stakeholders dalam proses pembangunan Kabupaten Serang selama periode lima tahun mendatang. Penyusunan RPJMD Kabupaten Serang ini berpedoman pada RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026, RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, dan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026.

RPJMD ini merupakan dokumen yang menjadi panduan bagi berbagai stakeholders dalam proses pembangunan Kabupaten Serang selama periode lima tahun (2021-2026) mendatang. Dokumen sembilan bab ini juga merupakan penjabaran tahapan keempat RPJPD Kabupaten Serang 2006-2026 yang pada periode terakhir ini diharapkan mencapai cita-cita ‘Serang yang Islami, Maju, Adil, Sejahtera dan Harmonis’.

Pada akhirnya, implementasi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 ini diharapkan didukung oleh semua komponen mulai dari lingkup pemerintah, anggota legislatif, dunia usaha, akademisi, dan terutama masyarakat Serang yang menjadi subjek sekaligus penerima kebijakan. Berbagai dukungan dari seluruh pihak berlandaskan semboyan ‘Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe’ menjadi daya dorong untuk merealisasikan program dan target yang telah tertuang dalam RPJMD ini, dan diharapkan akan memberikan hasil terbaik demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Serang yang telah dirumuskan.

